



**PERUBAHAN STRATEGI POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA
TAHUN 2016**

**(POLITICAL STRATEGY CHANGES OF ENNAHDA PARTY IN
TUNISIA AT 2016)**

SKRIPSI

Oleh:

ALI HASEMI

NIM 120910101085

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERUBAHAN STRATEGI POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA
TAHUN 2016**

**(POLITICAL STRATEGY CHANGES OF ENNAHDA PARTY IN
TUNISIA AT 2016)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

ALI HASEMI

NIM 120910101085

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara khusus saya dedikasikan untuk:

1. Ibunda tercinta Sripa Lubnah, dan Ayahanda tersayang Abdul Mutholib.
Terimakasih atas segala dukungan, doa, usaha, peluh dan pengharapan yang telah diberikan kepada saya;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater.

MOTO

“Aturlah urusanmu dengan pengaturan yang apabila kamu melihat pada kesudahannya itu terdapat kebaikan maka lanjutkanlah dan apabila kamu melihat kerusakan maka tahanlah”. (Nabi Muhammad SAW)¹.

“We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow”.

(Kita tidak memiliki sekutu abadi, dan kita tidak memiliki musuh abadi. Kepentingan kitalah yang abadi dan terus ada, dan semua kepentingan itu adalah tugas yang wajib kita patuhi). (Henry John Temple Palmerston (1784-1865), politisi Inggris)².

¹ (HR. Ibnu Adiy dari sahabat Anas)

² Wikiquote. 2019. *Henry Temple, 3rd Viscount Palmerston*. Wikiquote: https://en.wikiquote.org/wiki/Henry_Temple,_3rd_Viscount_Palmerston. [Diakses pada tanggal Rabu 26 Juni 2019].

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Hasemi

NIM : 120910101085

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juli 2019

Yang Menyatakan

Ali Hasemi

NIM 120910101085

SKRIPSI

**PERUBAHAN STRATEGI POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA
TAHUN 2016**

Oleh

**ALI HASEMI
NIM 120910101085**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Selasa
tanggal : 9 Juli 2019
waktu : 09.00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tim Penguji
Ketua

Fuat Albayumi, S.IP, M.A.
NIP. 197404242005011002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum.
NIP. 195904231987021001

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.
NIP. 196105151988021001

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197212041999031004

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP. 195803171985031003

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016; Ali Hasemi; 120910101085; 2019; 104 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ennahda adalah nama dari salah satu partai politik di Tunisia yang awalnya bergerak dalam haluan ideologi Islamisme. Dalam sejarah sepak terjangnya, Ennahda menjadi wadah bagi para aktivis politik Islamis untuk melakukan kegiatan dakwah dan upaya menjadikan *syari'ah* Islam sebagai pedoman hidup dalam aspek sosial, budaya serta politik. Tetapi ketika masa terpilihnya Ennahda menjadi kepala pemerintahan pada tahun 2011, partai tersebut secara perlahan menunjukkan sikap dan tindakan politik yang terbuka terhadap aspek serta prinsip-prinsip demokrasi. Namun Ennahda masih berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam agenda politiknya, seperti usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi Tunisia. Sebaliknya pada pasca kegagalan pemerintahannya di tahun 2013, Ennahda menjadi lebih kompromi dengan realitas politik yang ada dan mengedepankan pilihan rasional dalam menentukan sikap maupun pilihan politik. Pada tahun 2015, Ennahda membentuk pemerintahan koalisi dengan partai pemenang pemilu sekaligus rival politiknya dari kelompok haluan sekularisme, yaitu partai Nidaa Tounes. Sebagaimana pendukung setia Ennahda, kebijakan partainya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai ideologinya sendiri karena menerima paham sekularisme dan langkah tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari keyakinan Islam. Terlebih lagi, pada kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016, Ennahda yang sebelumnya dipandang sebagai simbol partai Islamisme, mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa partainya memisahkan diri dari aktivitas keagamaan dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik yang terjadi pada partai Ennahda di Tunisia.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia pada tahun 2016 karena adanya: tantangan politik yang baru, yakni kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dalam rangka membangun masyarakat madani (*civil society*); kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia; peristiwa kudeta militer atas Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2013; dan peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai tersebut.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda di Tunisia Tahun 2016”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si., selaku dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
4. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat;
6. Ibunda tercinta Sripa Lubnah dan Ayahanda Abdul Mutholib yang selalu menjadi sosok inspirasi; Adik-adikku Muhammad Syarif, dan Zainab Aqilah beserta segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik doa maupun nasehat dan juga semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2012. *Special regard* kepada Saudara M. Taufik Qurrahman (Taufik), Yulian Adi Kurniawan (Yulian), Lutfia Khorida (Fia), A'idatulhaqq Adi Nastiti (Aida), Aad Rifqy (Aad), Tri Indah Oktavianti (Trin), Rifqa Ayudiah Choirun Nisak (Rifqa), Minanti Asmarani A (Tika), M. Maharani Subroto (Itok), Syah Than Thawi (Towi), Radita N. Aini (Radita) dan Nyiratih Haruming Ayu Hapsari (Nyi) yang bersedia menjadi *partner* diskusi selama perkuliahan dan telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi;
8. Para Pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) periode 2015-2016 yang sudah menemani berproses dalam menjalankan organisasi;
9. Keluarga Besar Protokol FISIP (PROFIS) Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, pengembangan kepribadian dan pembelajaran kehidupan yang sangat berkesan dan berguna bagi penulis;
10. Segenap pengurus inti komunitas IR-Progress yang menjadi tempat berdiskusi dan berbagi ilmu bagi penulis;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 9 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	10
1.5.1 Post-Islamism	10

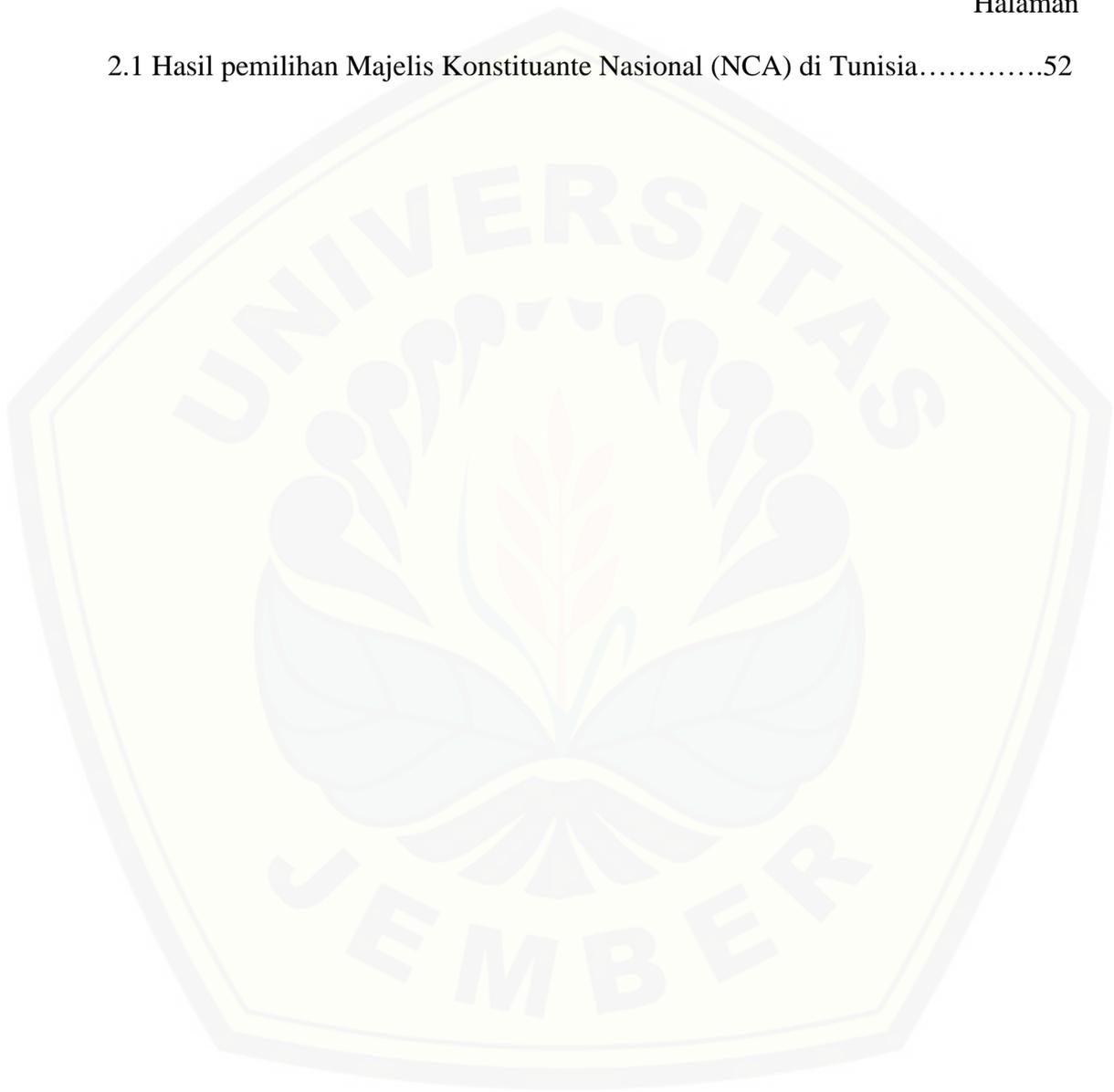
1.6 Argumen Utama	21
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.7.1. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.7.2. Teknik Analisis Data.....	23
1.8 Sistematika Penelitian	23
BAB 2. ENNAHDA DALAM TATANAN POLITIK TUNISIA.....	24
2.1 Kondisi Geografis dan Sistem Politik Tunisia.....	28
2.2 Sejarah Gerakan Kelompok Islamis dan Rekam Jejak Partai Ennahda di Tunisia.....	29
2.2.1 Embrio Gerakan Kelompok Islamis di Tunisia.....	31
2.2.2 Latar Belakang Kemunculan Ennahda.....	32
2.2.3 Ennahda dan Rezim Ben Ali.....	42
2.2.4 Meningkatnya Minat Publik terhadap Islam.....	44
2.2.5 Pemberontakan Rakyat Tunisia: <i>Tsauratu al Karama</i> (Revolusi Martabat); Awal dari <i>Arab Spring</i>	50
2.2.6 Peranan Ennahda dalam Menyusun Konstitusi.....	53
BAB 3. DINAMIKA POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA	57
3.1 Kebangkitan Gerakan Salafisme di Tunisia.....	57
3.1.1 Salafisme.....	58
3.1.2 Gerakan dan Institusi Salafi di Tunisia	60
3.1.3 Terbunuhnya Dua Politisi dari Oposisi Pemerintahan Troika	68
3.2 Jatuhnya Ikhwanul Muslimin pada Tahun 2013	70
3.3 Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda.....	74
BAB 4. ALASAN PERUBAHAN STRATEGI POLITIK ENNAHDA.....	77
4.1 Reformasi Politik Partai Ennahda	78
4.2 Peristiwa Kudeta Militer atas Ikhwanul Muslimin di Mesir Tahun 2013....	82

4.3 Penurunan Daya Tarik Pemerintahan Koalisi Pimpinan Ennahda (Troika) di Tunisia	90
BAB 5. KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Hasil pemilihan Majelis Konstituante Nasional (NCA) di Tunisia.....	52



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Grafik Pandangan Masyarakat terhadap Pemerintahan Tunisia.....	93



DAFTAR SINGKATAN

AKP	<i>Adalet ve Kalkinma Partisi / Justice and Development Party / (Partai Keadilan dan Pembangunan)</i>
ASQ	<i>Association for the Safeguard of the Qur'an</i>
CIA	<i>Central Intelligence America (Pusat Intelejen Amerika)</i>
CPR	<i>Congrès pour la République / Congree for the Republic</i>
FDTL	<i>Forum démocratique pour le travail et les libertés; at-Takattul ad-Dīmuqrāfī min ajl il-'Amal wal-Ḥurriyyāt / Ettakol</i>
FIS	<i>Front Islamique du Salut; al-Jabha al-Islamiyya lil-Inqadh</i>
FJP	<i>Freedom and Justice Party (Partai Kebebasan dan Keadilan)</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
IMF	International Monetary Fund
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah)</i>
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MTI	<i>Mouvement de la Tendance Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami (Gerakan Tendensi Islam)</i>
NCA	<i>National Constituent Assembly (Majelis Konstituante Nasional)</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDP	<i>Progressive Democratic Party; al-Hizb al Dimuqrati alTaqaddumi (Partai Demokrat Progresif)</i>
PSD	<i>Parti Socialiste Destourien / the Destourian Socialist Party</i>
RCD	<i>Rassemblement Constitutionnel Démocratique</i>
SCAF	<i>Supreme Council of Armed Forces (Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata)</i>
TIF	<i>Tunisian Islamic Front (Front Islam Tunisia)</i>
UGET	<i>Union Générale des Étudiants de Tunisie (Serikat Umum Mahasiswa Tunisia)</i>
UGTE	<i>Union Générale Tunisienne des Étudiants</i>

UGTT *Union Générale Tunisienne du Travail* (Serikat Buruh Umum Tunisia)

UKM Usaha Kecil Menengah



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal mula kemunculan Ennahda dapat ditelusuri pada tahun 1967, ketika Mesir, Jordan dan Suriah mengalami kekalahan dalam perang melawan Israel yang dikenal dengan peristiwa *Six Day War* (Wolf, 2017:33). Akibatnya, banyak pihak mengkritisi pemikiran politik sekularisme dan nasionalisme Arab yang diterapkan pada masa itu. Hal tersebut kemudian disusul dengan kemunculan gerakan-gerakan Islam politik di Tunisia dan beberapa negara Timur Tengah¹. Salah satu dari gerakan kelompok Islam tersebut ialah ASQ (*Association for the Safeguard of the Qur'an*) yang berada di Tunisia (Internationalrelations.org, tanpa tahun). ASQ dibentuk pada tahun 1967 oleh rezim Bourguiba untuk memfasilitasi aspirasi dan kegiatan kelompok Islamis pada masa itu. Tujuan lain dari dibentuknya ASQ adalah untuk mengendalikan gerakan kelompok Islamis (Alexander, 2016:47). Sehingga, kelompok Islamis mengeluhkan pembatasan ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah terhadap mereka.

Pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, Rachid Ghannouchi² beserta aktivis Islam politik lainnya yaitu Hmida Ennaifer, dan Abdelfattah Mourou mendirikan organisasi yang baru bernama *al-Jama'a al-Islamiyya* (kelompok Islam). Organisasi yang dibentuk oleh para pemikir religius ini memfungsikan dirinya sebagai kelompok agama yang fokus pada gerakan dakwah agama Islam dan studi al-Quran. Organisasi inilah yang menjadi bibit awal dari kemunculan entitas

¹ Fenomena tersebut sebenarnya dapat ditemukan sejak tahun 1928 di mana muncul gerakan kelompok Islam di Mesir yang bernama "Ikhwanul Muslimin" (Internationalrelations.org, tanpa tahun).

² Rachid Ghannouchi, salah satu pemikir paling terkemuka dalam bidang pemikiran Islam kontemporer. Rachid Ghannouchi merupakan tokoh penting dalam rekam jejak partai Ennahda. Ia adalah salah seorang yang memprakarsai terbentuknya MTI (*Mouvement de la Tendence Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*) dan Ennahda. Rachid Ghannouchi telah menjadi ideolog sentral, kekuatan pemersatu, ahli strategi dan pemimpin pengasingan gerakan Islam Tunisia Ennahda (Tamimi, 2001:vi).

Ennahda di waktu mendatang. Melalui organisasi ini, kelompok Islamis bertujuan untuk ikut andil memberi kontribusi tidak hanya dalam ruang privat, namun menghidupkan kembali Islam dalam ruang publik, termasuk masjid-masjid, asosiasi-asosiasi dan fasilitas pendidikan. Banyak dari anggota ASQ tertarik untuk bergabung dengan *Jama'a al-Islamiyya* yang dinilai lebih bersemangat membela Islam. Salah satu pendiri *al-Jama'a al-Islamiyya*, yakni Abdelfattah Mourou, juga merupakan mantan anggota ASQ. Program kegiatan *al-Jama'a al-Islamiyya* tidak hanya seputar masalah keaslian budaya dan agama saja, namun juga melakukan serangkaian kegiatan sosial seperti acara sosial, olahraga, belajar dan musik. Sehingga *al-Jama'a al-Islamiyya* mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat (Wolf, 2017:32-38).

Pemerintah Tunisia pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, Habib Bourguiba, mendukung gerakan kelompok Islam tersebut dan memanfaatkan keberadaannya untuk membendung pengaruh paham komunisme. Bourguiba bahkan membiarkan faksi partainya, PSD (*Parti Socialiste Destourien / the Destourian Socialist Party*), menyerukan Islamisasi dan Arabisasi masyarakat Tunisia, membiarkan mereka mendekati para pemimpin aktivis *al-Jama'a al-Islamiyya* dalam upaya untuk meyakinkan mereka (*al-Jama'a al-Islamiyya*) supaya mempengaruhi garis politik rezim. Namun, tindakan dari anggota partai tersebut dianggap sebagai perantara untuk mendekati diri dengan masyarakat muslim. Sebab fokus perhatian Bourguiba ditujukan untuk melawan kelompok gerakan vokal sayap kiri. Bourguiba memerlukan pengaruh kelompok Islamis untuk melawan kelompok gerakan vokal sayap kiri, sehingga mencoba mengendalikan kelompok Islamis. Bourguiba memfasilitasi pertumbuhan kelompok Islamis dan membiarkan kelompok Islamis mengutuk Marxisme yang salah satu konsepnya dari ajaran komunisme dinilai 'anti Tuhan atau ateis' (Wolf, 2017:39). Memang secara umum pemerintah negara-negara Arab pada masa tersebut, memiliki fokus untuk menghentikan laju perkembangan komunisme sehingga kelompok gerakan Islamis dianggap dapat mendukung upaya pemerintah dalam menentang laju pergerakan komunisme di Timur Tengah,

Afrika Utara dan berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia sesuai dengan kapasitasnya (Internationalrelations.org, tanpa tahun).

Pada perkembangan selanjutnya, gerakan kelompok Islam di Tunisia tersebut tidak hanya aktif dalam gerakan keagamaan saja. Namun kelompok Islamis di Tunisia juga aktif bergerak terkait dengan isu-isu budaya di dalam negeri dan kawasan Afrika. Kelompok gerakan Islamis tersebut menyikapi persoalan-persoalan militer Arab dan krisis sosial sebagai akibat negatif yang timbul dari ideologi dan nilai budaya asing. Oleh sebab itu, mereka bekerja untuk mendidik warga Tunisia mengenai kesadaran Islam dan nilai-nilai budaya melalui dakwah dan media cetak untuk berbagi informasi.

Pada awalnya, kelompok Islam masih berada dalam naungan pemerintahan dan fokus terhadap gerakan edukasi keagamaan sehingga pergerakan itu tidak banyak memperhatikan urusan politik. Tetapi pola pergerakan kelompok religius tersebut mulai berubah pada tahun 1970-an, ketika Habib Bourguiba mulai menerapkan gaya kepemimpinan otoriter dalam pemerintahan. Hal ini juga tidak lepas dari pengaruh kemerosotan ekonomi di dalam negeri pada tahun 1970-an yang menjadi pemicu bagi kelompok religius untuk mengubah haluan pergerakannya. Kelompok gerakan Islamis tersebut mulai memperhatikan urusan politik di negerinya, lalu berkembang mencari pengaruh ke masyarakat hingga melakukan upaya-upaya menentang pemerintahan (Internationalrelations.org, tanpa tahun).

Pada tahun 1979, pergerakan kelompok Islamis tersebut pada akhirnya berubah dari gerakan sosial menjadi organisasi yang berorientasi politik. Mereka membentuk dirinya menjadi sebuah partai yang dinamakan MTI (*Mouvement de la Tendance Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*) (Wolf, 2017:8). Sejak awal pembentukannya, MTI menjadi wadah organisasi kubu konservatif dan Islamis di Tunisia yang merasa terancam dengan perlakuan Habib Bourguiba. Rezim Habib Bourguiba dianggap memerintah dengan corak yang sekuler, menjalankan kebijakan politiknya melalui cara yang represif, dan berusaha memanipulasi interpretasi Islam

untuk memonopoli kontrol politik sehingga kelompok Islamis tersebut sering bertentangan langsung dengan pemerintahan pada masa tersebut (Souli, 2016a). Menyadari akan peningkatan pengaruh organisasi tersebut di kalangan masyarakat serta kendali masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya, Bourguiba tidak bisa membiarkan organisasi tersebut berkembang. Bourguiba juga memandang kelompok Islamis sebagai simbol kemunduran dan hanya beranggotakan orang-orang fanatik yang nantinya akan menghalangi progresivitas politik pemerintahan Tunisia yang kala itu pro terhadap Barat. Oleh sebab itu, Bouguiba menolak untuk mengakui secara legal dan menjatuhkan tindakan keras terhadap gerakan kelompok islamis tersebut dengan memenjarakan ribuan anggotanya di pertengahan 1980-an (Internationalrelations.org, tanpa tahun).

Rezim Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Zine El Abidine Ben Ali di tahun 1987. Pada tahun-tahun awal Ben Ali berkuasa, MTI kembali mencoba untuk mendapatkan pengakuan secara legal. Tetapi adanya aturan hukum² di Tunisia menyebabkan kelompok Islamis kemudian mengubah nama dan karakteristiknya yang berkaitan langsung dengan aspek religius dalam rangka mendapatkan legalitas tersebut karena (Wolf, 2017:69). Kelompok pergerakan Islamis tersebut untuk ketiga kalinya mengubah namanya menjadi partai 'Ennahda' yang berarti 'kebangkitan kembali'. Meski demikian, Ben Ali tidak mengabulkan permohonan mereka untuk mengakui pergerakannya sebagai partai yang legal, namun kelompok islamis tetap diizinkan untuk mengikuti kompetisi pemilu dengan syarat tidak menggunakan nama resmi partainya (Ennahda). Langkah itu ditujukan agar tidak menimbulkan kemarahan bagi warga Tunisia yang memberikan dukungannya kepada Ennahda. Walaupun anggota Ennahda maju sebagai calon independen, tetapi hasil dari pemilihan parlemen pada tahun 1989 menunjukkan bahwa partai ini mendapatkan dukungan yang kuat dari warga Tunisia. Hal ini membuat Ben Ali khawatir dan mulai menekan Ennahda secara politik dengan menuduhnya sebagai dalang peristiwa serangan terhadap sebuah

² Hukum partai politik yang baru yang disetujui oleh enam partai oposisi, telah melarang pembentukan partai yang berdasarkan alasan etnis, agama, ras, dan wilayah geografis atau teritorial (Wolf, 2017:69).

kantor partai yang berkuasa pada tahun 1991. Akibatnya, 265 anggota dari partai tersebut dihukum oleh pengadilan militer Tunisia atas tuduhan makar kudeta (Arieff, 2011).

Rezim Zine El Abidine Ben Ali tidak jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya (Habib Bourguiba) sehingga Ennahda mengalami masa-masa sulit akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan (Souli, 2016a). Rezim Ben Ali mempersulit gerak-gerik para penentang pemerintahannya, mengendalikan lembaga peradilan dan kepolisian untuk kepentingannya, bahkan mengecap kelompok Islamis yang menentang dirinya sebagai kelompok ekstrimis dan teroris (Louden, 2015). Tetapi akibat dari kebijakan politik represif Ben Ali terhadap para penentang pemerintahannya, justru membuat Ennahda semakin banyak mendapat simpati dari warga Tunisia. Pada tanggal 17 Desember 2010 di daerah Sidi Bouzid, seorang warga Tunisia yang bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap seorang polisi wanita yang menyita keranjang sayurnya. Satu hari pasca insiden tersebut, kemarahan publik muncul dengan cepat hingga memicu pemberontakan warga Tunisia yang dinamakan *Tsaurat al Karama* (Revolusi Martabat)³. Peristiwa ini kemudian memicu kemunculan protes besar-besaran dari warga Tunisia terhadap pemerintahannya pada tahun 2010 yang menjadi titik awal fenomena “*Arab Spring*”. Protes dan pemberontakan warga Tunisia tersebut pada akhirnya berhasil menjatuhkan rezim Zine El Abidine Ben Ali pada 14 Januari 2011 (Ayari, 2015).

Setelah terbebas dari rezim Ben Ali, Ennahda mulai berkampanye dalam pemilihan parlemen pada tahun 2011. Adanya popularitas Ennahda yang tinggi serta nilai keislaman (non-sekuler) sebagai identitasnya membuat Ennahda mampu memenangkan suara dalam pemilihan parlemen untuk majelis konstituante. Partai Ennahda memperoleh 37 persen dari total suara dengan 89

³ Beberapa artikel menyebutnya dengan *Jasmine Revolution*. Namun warga Tunisia tidak menyukai istilah *Jasmine Revolution* yang berasal dari Prancis. Warga Tunisia lebih memilih nama *Thawrat al-Karama* (Revolusi Martabat) atau *Thawrat al-Shabab* (Revolusi Para Pemuda) (Jaouad, 2011).

dari 217 kursi parlemen (Ayari, 2015). Suara yang diperoleh Ennahda tersebut menjadikannya sebagai partai terbesar di dalam parlemen legislatif. Berkat kemenangannya tersebut, Ennahda akhirnya memiliki kendali dalam pemerintahan Tunisia.

Sejak Ennahda memegang kendali pemerintahan pada tahun 2011 - 2013, Ennahda secara perlahan telah menunjukkan perubahan menuju sikap politik yang lebih moderat. Meskipun menyandang identitas sebagai partai Islamis, Ennahda masih membuka diri untuk bekerja sama di dalam parlemen dengan partai haluan sekularisme. Ennahda bersedia untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem parlemen campuran. Padahal sebelumnya Ennahda pada awalnya menyerukan sistem parlementer secara eksklusif. Ennahda juga menyetujui untuk menyusun konstitusi baru Tunisia berdasarkan mekanisme demokrasi, peraturan hukum, dan berbagai hak-hak agama, sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Ghannouchi, 2016). Namun, Ennahda masih berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam agenda politiknya, seperti usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi Tunisia.

Tetapi kemenangan Ennahda tidak berlangsung lama. Ennahda mengalami kemunduran pada tahun 2013 akibat tekanan politik dari kelompok-kelompok oposisi. Kebijakan Ennahda dinilai tidak efektif dalam memerangi terorisme di Tunisia, tidak mampu memperbaiki perekonomian dalam negeri, dan dituduh sebagai dalang dari peristiwa pembunuhan pemimpin oposisi, Mohamed Brahmi (Guazzone, 2013). Atas desakan dari kelompok-kelompok oposisi, Ennahda membuat kesepakatan dengan mereka untuk mengundurkan diri dari kekuasaan pada bulan Januari 2014 dan menyerahkan pemerintahan sementara kepada teknokrat atau non-partisan sampai pemilu selanjutnya. Pada tanggal 27 Januari 2014, Ennahda berhasil memasukkan gagasan Islam ke dalam undang-undang di Pasal 1, yang telah menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi Tunisia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segala sesuatu yang dinilai sakral (Ayari, 2015; Wolf, 2017:156).

Ennahda kembali mengikuti pemilu pada tanggal 21 Desember 2014⁴ tetapi dikalahkan oleh partai Nidaa Tounes pimpinan Beji Caid Essebsi⁵ yang berpaham sekularisme. Walaupun kalah dalam pemilu, Ennahda masih memperoleh 69 kursi dari 217 kursi di dalam parlemen. Namun, ada 28 anggota legislatif Nidaa Tounes telah mengundurkan diri dari partai, mengurangi kursi parlemennya dari 86 menjadi 58 kursi. Dengan demikian, Ennahda yang memiliki 69 kursi sekali lagi menjadi kekuatan terbesar di parlemen (The Guardian, 2014; Wolf, 2017:160). Pada tahun 2015 kemudian, Ennahda membuat suatu langkah yang mengejutkan banyak pihak dan belum pernah terdengar sebelumnya yaitu membentuk pemerintahan koalisi dengan partai pemenang sekaligus rival politiknya dari kelompok haluan sekularisme, Nidaa Tounes (Bleiweis, 2016). Peristiwa ini membuat beberapa pendukung dari kedua belah pihak merasa kecewa. Bagi sebagian pendukung setia Ennahda, kebijakan partainya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai ideologinya sendiri karena menerima paham sekularisme dan langkah tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari keyakinan Islam. Terlebih lagi, pada kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016, Ennahda yang sebelumnya dipandang menganut ideologi Islamisme, mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa partainya memisahkan aktivitas keagamaan dan politik:

“Ennahda has changed from an ideological movement engaged in the struggle for identity to a protest movement against the authoritarian regime and now to a national democratic party. We must keep religion far from political struggles” (Souli, 2016b). (Ennahda telah berubah dari gerakan ideologis yang mengajak untuk berjuang meraih identitas ke gerakan protes melawan rezim otoriter

⁴Putaran kedua pemilihan presiden di Tunisia diselenggarakan pada hari Minggu 21 Desember 2014. Tidak ada calon yang memenangkan suara mayoritas, jadi pemilu putaran kedua diperlukan. Hasil pemilu putaran kedua dimenangkan oleh Beji Caid Essebsi dengan 39,46 % suara dan Mohamed Moncef Marzouki dengan 33,43 %. Putaran pertama diadakan pada hari Minggu 23 November 2014. Ini adalah pemilihan presiden pertama sejak Revolusi Jasmine dan jatuhnya mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada Januari 2011 (Electionguide, tanpa tahun).

⁵ Beji Caid Essebsi merupakan ketua partai Nidaa Tounes, seorang mantan menteri di bawah pemerintahan Habib Bourguiba dan pernah menjadi ketua parlemen di bawah rezim Zein El Abidine Ben Ali (Ayari, 2015; Al Arabiya English, 2016).

dan sekarang menjadi partai demokratik nasional. Kita harus menjaga agama agar jauh dari perjuangan politik).

Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Rachid Ghannouchi di hadapan publik dalam kongres. Rachid Ghannouchi selaku politisi terkemuka dan pendiri partai Ennahda, menjelaskan kepada wartawan mengenai sikap mereka terhadap kelompok non-muslim dan kelompok muslim lainnya (Bleiweis, 2016). Ghannouchi menjelaskan bahwa Ennahda akan memberikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis, serta memberi sebutan baru bagi partainya dengan nama “Demokrat Muslim” sehingga gerakan partainya akan bersikap yang lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim (Ibish, 2016).

Keputusan partai Ennahda yang memilih untuk meninggalkan politik identitas dan menolak politisasi agama Islam membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Pasalnya, dengan keputusan Ennahda memurnikan diri hanya untuk melakukan aktivitas politik saja tanpa mengkaitkan aktivitas keagamaan membuat hubungannya dengan organisasi Islamis internasional lainnya seperti Ikhwanul Muslimin menjadi memburuk (Affan, 2016). Tentu hal ini merupakan langkah besar bagi Ennahda yang sebelumnya telah menjalin hubungan yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin kemudian mengubah haluan gerakannya dengan mengambil jalan yang berbeda dengan partai bentukan Hasan al-Banna ini (Wolf, 2017:6). Evolusi peran politik Ennahda bisa menjadi figur politik Islam yang berpengaruh luas terhadap kawasan Arab khususnya organisasi Islam internasional karena menolak taktik atau strategi politisasi agama Islam namun tetap menjadikan agama sebagai pedoman kehidupan masyarakat sosial. Oleh karena latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengajukan judul: **“PERUBAHAN STRATEGI POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA TAHUN 2016”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam suatu karya ilmiah agar apa yang diteliti dapat fokus kepada pokok permasalahan. Sehingga permasalahan

yang dibahas tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Maka dari itu, penulis membagi dan membatasi ruang lingkup pembahasan ini menjadi batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan dalam suatu penelitian akademik untuk memfokuskan pembahasan mengenai masalah yang akan diteliti. Batasan materi yang penulis tentukan dalam karya ilmiah ini yaitu alasan partai Ennahda di Tunisia mengubah strategi politiknya pada tahun 2016.

1.2.2 Batasan Waktu

Rentang waktu yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Tahun 2011 dipilih karena pada 1 Maret 2011 Ennahda baru muncul sebagai partai politik yang sah (Ayari, 2015). Sedangkan pada tahun 2016, Partai Ennahda mengeluarkan pernyataan secara resmi pada Kongres ke-10 tanggal 20 Mei bahwa partainya memisahkan diri dari aktivitas keagamaan dan politik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa Partai Ennahda di Tunisia mengubah strategi politiknya pada tahun 2016?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk menjawab rumusan masalah dengan menggabungkan fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk memastikan kedudukan argumen. Tujuan penelitian ini menjelaskan fenomena, alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia pada tahun 2016.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep di dalam suatu penulisan karya ilmiah diperlukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan. Menurut Mohtar Mas'ood, konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Misalnya, “kekuasaan”, “demokrasi”, “modernisasi”, “deterensi (*deterrence*) nuklir”, “revolusi”, “agresi”, dan “fungsionalisme” adalah konsep-konsep yang umum ditemui dalam ilmu politik (Mas'ood, 1990:109). Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari objek yang dipelajarinya (misalnya individu, kelompok, negara, atau organisasi internasional) yang relevan bagi studi tertentu.

Konsep dapat digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkatagorikan hal-hal yang ditemui berdasarkan ciri-cirinya yang relevan dengan suatu permasalahan. Seseorang peneliti mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan ideologi, misalnya negara sosialis. Dengan klasifikasi itu seseorang bisa membuat suatu dugaan tertentu. Misalnya, negara sosialis tidak akan membebaskan operasi perusahaan multinasional. Upaya pengklasifikasian atau pemberian nama pada sesuatu memungkinkan seseorang untuk membuat prediksi tentang suatu permasalahan. Dalam contoh tadi, ‘negara sosialis atau sosialisme’ adalah lambang bagi sekumpulan sifat-sifat tertentu (Mas'ood, 1990:109-110). Dengan demikian, konsep berfungsi sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi, dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi. Dengan menggunakan konsep, peneliti melakukan kategorisasi, strukturalisasi, penataan (*order*) dan generalisasi terhadap fenomena yang dialami dan diamatinya (Mas'ood, 1990:111). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Post-Islamism* untuk menganalisis perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia.

1.5.1 Post-Islamism

Konsep Islam dalam konteks realitas sosial maupun politik telah mengalami beberapa kali transformasi makna. Entitas Islam itu sendiri sebagai sistem

kepercayaan yang menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan sosial. Sedangkan penambaham "isme" pada setelah kata Islam mencerminkan konversi ide asli menjadi ideologi (Tibi, 2012:7-8). Oleh karena itu, perlu untuk menjelaskan perbedaan istilah Islam, Islamisme dan *Post-Islamism* untuk menghindari kesalahan dalam memahami ketiga konsep tersebut.

Islam adalah paham agama tauhid yang mengajak kepada keimanan (Mahmudah, 2018). Seseorang dianggap sebagai seorang Muslim jika ia menganut lima prinsip Islam atau *al-arkan al-khamsah* (lima rukun Islam). Adapun lima prinsip Islam tersebut yaitu mengucapkan dua kalimat Syahadat (bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya); mengerjakan ibadah sholat; berpuasa di bulan Ramadhan; membayar zakat kepada orang fakir miskin; dan melakukan perjalanan ke Mekkah untuk menunaikan kewajiban haji jika mampu. Poin utama dari Islam adalah mengajak para pemeluknya untuk menjadi pribadi yang shalih dan beriman, sedangkan Islamisme mengutamakan prinsip *din wa dawla* (kesatuan negara dan agama) di bawah sistem hukum syariat yang diamanatkan secara konstitusional (Tibi, 2012:3). Islam sebagai sistem etika dan iman agama dapat diselaraskan dengan demokrasi jika dipadukan dengan upaya reformasi agama (Tibi, 2012:97). Makna dari reformasi agama adalah adanya kajian yang serius mengenai interpretasi dari ajaran agama terhadap realitas sosial dan politik. Misalnya, istilah Quran "*syura*" berarti dalam bahasa Arab "konsultasi," bukan demokrasi. Namun, muslim dapat merujuk pada istilah *syura* sebagai pendekatan menyelesaikan masalah mengenai adaptasi Islam dengan modernitas budaya dan memperkenalkan demokrasi ke Islam. Dengan demikian, istilah "*syura*" dapat dipandang sebagai interpretasi baru sebagai etika demokrasi (Tibi, 2012:97).

Islamisme atau Islam politik mengacu pada gagasan bahwa Islam tidak hanya menyediakan pedoman untuk kehidupan sosial dan pribadi, tapi juga untuk ruang politik. Islamisme berasal dari interpretasi politik Islam sehingga menghasilkan suatu tatanan kehidupan politik yang sarat akan simbol dan entitas keagamaan (Tibi, 2012:1). Islamisme dapat diidentifikasi sebagai ideologi yang

menghubungkan *din* (agama) dengan *dawla* (negara) dalam tatanan politik berbasis *syari'ah* (Tibi, 2012:2). Singkatnya, istilah Islamisme mengacu ke Islam yang digunakan untuk tujuan politik (Koch, 2014).

Istilah Islamis adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memperjuangkan nilai-nilai serta *syari'ah* Islam untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Istilah Islamis juga dipakai untuk menyebut orang-orang yang “bergerak di sekitar gagasan pendirian negara Islam sebagai sebuah solusi bagi masalah sosial dan politik yang masyarakat hadapi di dunia saat ini”. Oliver Roy mendefinisikan Islamisme sebagai "suatu jenis fundamentalisme Islam dalam konteks politik modern yang bertujuan untuk menciptakan kembali suatu tatanan masyarakat Islam sejati". Dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat tersebut, Islamisme bukan hanya mengulas tentang masalah penerapan *syari'ah*, namun juga hal-hal yang berkaitan dengan pendirian sebuah negara Islam melalui aksi politik. Lebih lanjut Roy berpendapat bahwa Islamis menganggap Islam tidak hanya sebagai sebuah agama, namun memandangnya sebagai sebuah "ideologi politik yang seharusnya diimplementasikan dalam rangka membentuk ulang setiap aspek kehidupan sosial" (Koch, 2014).

Islamisme tidak memberikan ruang kompromi dalam menghadapi isu-isu globalisasi dan modernitas, karena “gerakan yang sakral” ini tidak boleh dicemari dengan pemikiran asing. Berdasarkan pertimbangan *syari'ah* yang mereka terapkan, gerakan-gerakan Islamis ini menolak pembagian kekuasaan dengan partai-partai sekuler atau minoritas non-Muslim. Mereka hanya mengakui bahwa *syari'ah* harus diterapkan secara menyeluruh atau totaliter (Tibi, 2012:123). Meskipun pada konteks pemilihan pemimpin, kelompok Islamis terkadang memilih pemimpin mereka dengan menggunakan instrumen demokrasi (seperti melakukan *voting* atau menggunakan kotak suara). Namun, konsep-konsep penting dalam demokrasi seperti kebebasan pers tidak diperbolehkan mendapatkan ruang. Sebab, menurut kelompok Islamis, nilai pluralisme dan

toleransi terhadap keberagaman harus ditolak karena dianggap sumber masalah perpecahan umat (Tibi, 2012:123).

Dalam konteks pluralisme, Islamisme memiliki aturan yang ketat untuk menjaga 'kesucian' umatnya. Sehingga seringkali Islamis memiliki konflik dengan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan pertikaian terjadi antar kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai Islamis itu sendiri (Tibi, 2012:7). Misalnya, rivalitas Arab Saudi yang dikenal menganut mazhab Wahabi dan Iran yang dikenal mengikuti mazhab Syiah. Keduanya saling bermusuhan untuk berebut pengaruh di Timur Tengah dan dunia internasional. Pengikut agama non-monoteistik (semua sistem kepercayaan selain Yudaisme, Kristen, dan Islam) oleh kaum Islamis digolongkan ke dalam keadaan kafir dan wajib diperangi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan Al-Qur'an (Tibi, 2012:166). Bahkan kaum Islamis juga memusuhi komunitas Yahudi dan Nasrani. Keduanya digolongkan ke dalam "musuh-musuh Islam" atau "kafir" (Tibi, 2012:vii). Semua itu disebabkan kaum Islamis hanya mengakui kemurnian *syariat* Islam sebagai satu-satunya hukum yang sah dan harus dijadikan dasar undang-undang di dalam suatu negara (Tibi, 2012:123).

Islamisme memiliki potensi untuk terus berkembang dan menyebarkan pengaruhnya di aspek sosial dan politik karena dalam sejarah, Islam dinilai telah banyak memberikan kontribusi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi pada setiap masyarakat muslim. Begitu juga dengan ajaran serta filosofi Islam mengenai moral, etika, kesetaraan dan keadilan telah melekat dalam setiap warga muslim. Selain itu, Islam tidak hilang akibat perkembangan zaman meskipun melewati masa 14 abad di dalam keragaman budaya, sosial, dan geografi pada masing-masing negara. Fenomena tersebut merupakan potensi Islam untuk memadukan aspek agama, sosial, budaya dan prinsip kebebasan dengan cara meningkatkan keseimbangan antara stabilitas sosial dan mobilitas sosial melalui pencerahan spiritual, menanamkan rasa keadilan dalam ekonomi, sosial dan politik. Ajaran Islam yang amat memperhatikan kaum miskin dan tertindas menjadikannya sebagai filsafat agama yang egaliter dan dekat dengan rakyat

(Hossain, 2016). Oleh karena itu, peradaban Islam dinilai telah mencakup semua aspek yang ada dan mewakili lebih dari sekumpulan doktrin serta filosofi agama.

Munculnya semangat untuk kembali ke ajaran Islam atau Islamisme di dunia Arab dipicu oleh peristiwa kekalahan Arab dalam *Six Day War* pada tahun 1967. Dalam enam hari pasukan Israel tidak hanya mengalahkan Mesir, Yordania, dan Suriah, tetapi juga menguasai Jalur Gaza, Semenanjung Sinai Mesir, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah (Wolf, 2017:33). Hasil dari perang tersebut membuat banyak pihak di dunia Arab mendiskreditkan ideologi nasionalis dan sosialis, khususnya Nasserisme yang dianggap sebagai sebuah model (pemikiran) untuk persatuan Arab dan perjuangan melawan Zionisme dan Kolonialisme Barat (Machairas, 2017).

Nasserisme adalah istilah politik yang mengacu pada jenis nasionalisme Arab atau Pan-Arabism yang dipopulerkan oleh mantan Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser. Atas dasar ideologi ini terutama dibentuk oleh pemikiran dan implikasi politik dari Presiden Nasser, maka ideologi tersebut menggunakan namanya. Ide dari Nasserisme ialah semua negara-negara Arab di Timur Tengah bersatu di bawah atap satu negara. Meskipun masyarakat Arab dengan ragam agamanya bersatu, Nasserisme dianggap sebagai 'ideologi sekuler sebagian' karena fakta bahwa nasionalisme Nasserisme tidak membangun dirinya sendiri atas dasar agama, tetapi berdasarkan ikatan linguistik dan budaya bangsa Arab (Bilecen, tanpa tahun:1).

Hasil dari perang pada tahun 1967 memberikan dorongan bagi kemunculan Islam-fundamental. Menurut John L. Esposito, kemenangan Israel 'berfungsi sebagai katalis utama untuk kebangkitan Islam' di seluruh dunia Arab (Wolf, 2017:33). Semangat tersebut diikuti oleh penafsiran agama tentang perang, bahwa menerima ideologi asing dan meninggalkan ajaran agama telah mengakibatkan kekalahan militer yang luar biasa sebagai bentuk hukuman berat. Islamisme dipromosikan sebagai satu-satunya sumber kekuatan perlawanan terhadap Israel yang semakin kuat (Machairas, 2017).

Tujuan utama dari ajaran Islamisme adalah ingin mewujudkan terbentuk negara Islam yang berlandaskan pada hukum syariat agama Islam dan terutama menolak ideologi serta pemikiran demokrasi. Meskipun beberapa gerakan institusi Islam berkomitmen untuk bekerja dengan instrumen demokratis, seperti menggunakan kotak suara untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi tetap menolak dengan tegas substansi serta nilai-nilai standar demokrasi seperti nilai kebebasan (*freedom*), kesetaraan (*equality*), dan toleransi (*tolerance*) (Tibi, 2012:95-98). Penolakan Islamis terhadap konsep-konsep demokrasi dapat diamati dari pernyataan tegas dari para tokoh Islamisme seperti Sayid Qutb, Abu al-A'la al-Mawdudi, dan Yusuf al-Qaradawi.

Sayid Qutb di dalam bukunya yang berpengaruh, *Ma'alim fi al-tariq* (penuntun di dalam perjalanan), meneliti mengenai sebab "kegilaan Barat" runtuh beserta prinsip demokrasinya. Barat harus digantikan oleh kekuatan Islam yang dibayangkan akan mengambil alih kekuasaan dunia dalam rangka "kembali ke sejarah" yang mana memiliki arti yang sama dengan kembali ke kejayaan Islam. Pemikiran semacam ini banyak ditemukan di dalam tulisan-tulisan kelompok Islamis. Qutb menulis:

"Humanity is at the brink... most clearly in the West itself ... after the Bankruptcy of democracy, which is finished ... the rule of the Western man is about to breakdown It is only Islam that possesses the needed values and method It is now the turn of Islam and its umma community in the most tense time to take over" (Tibi, 2012:96). ("Kemanusiaan berada di ambang kehancuran ... tampak paling jelas di Barat itu sendiri... setelah kebangkrutan demokrasi, yang telah berakhir... kekuasaan bangsa Barat akan segera hancur hanya Islam yang memiliki nilai-nilai dan metode yang diperlukan kini saatnya giliran Islam dan umatnya pada masa yang begitu menegangkan untuk mengambil alih kekuasaan").

Ini lah *al-hal al-Islami*, (Islam adalah solusinya), yang juga diserukan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Salah satu pendiri Islamisme sekaliber Qutb adalah seorang muslim India Abu al-A'la al-Mawdudi yang menegaskan penolakannya terhadap demokrasi dengan bahasa yang keras,

"I tell you Muslim Brothers in all frankness that democracy ... stands in contrast to what you embrace as religion and its dogma. The Islam you believe in and according to which you identify yourself as Muslims differs in its substance from this hateful system [of democracy] Where this system of democracy prevails Islam is in absence, and where Islam prevails there is no place [la makan] for this system of democracy" (Tibi, 2012:96). ("Saya mengatakan kepada kalian Ikhwanul Muslimin dengan terus terang bahwa demokrasi... sangat berbeda dengan apa yang kalian anut sebagai agama dan dogmanya. Islam yang kalian yakini dan berdasarkan pada diri kalian yang mengaku sebagai muslim berbeda substansinya dari sistem 'kebencian' [demokrasi] ini.... di mana sistem demokrasi ini berlaku maka Islam menjadi tiada, dan di mana Islam berlaku maka tidak ada tempat [la makan] untuk sistem demokrasi ini").

Qutb dieksekusi di depan umum pada tahun 1966, dan Mawdudi meninggal satu dekade kemudian.

Tokoh Islamis selanjutnya yang memiliki pengaruh dan dampak yang besar adalah Yusuf al-Qaradawi yang secara luas dianggap sebagai pewaris Qutb. Televisi al-Jazeera membesarkan namanya sehingga ia dijuluki "Mufti global". Yusuf al-Qaradawi menjadi salah satu tokoh Islamis terkemuka setelah kekalahan Arab di *Perang Enam Hari* atau dikenal dengan istilah *Six Day war* 1967. Dalam bukunya *al-Hall al-Islami wa al-hulul al-mustawradah* (Solusi Islami dan Solusi Impor), menganjurkan penolakan nilai-nilai yang berasal dari Barat dan harus diganti dengan nilai-nilai islami. Yusuf al-Qaradawi menyebut semua budaya 'pinjaman' termasuk demokrasi sebagai "solusi impor". Dalam salah satu fatwanya, Yusuf al-Qaradawi menulis bahwa:

"The term liberal democracy reflects its European origin...Liberal democratic thought entered into the life of Muslims through colonization....What looms behind this thought is the wicked colonial notion that religion is to be separated from politics and from the state. Behind this wickedness are the familiar villains: "The colonial crusaders and world Jewry are

the instigators of this fitna within Islam” (Tibi, 2012:96-97). (“Istilah demokrasi liberal mencerminkan sumber Eropa-nya....Pemikiran demokratis liberal masuk ke dalam kehidupan umat Islam melalui kolonialisasi....Apa yang ada di balik pemikiran ini adalah gagasan kolonial jahat bahwa agama harus dipisahkan dari politik dan negara. Di balik kejahatan ini adalah penjahat yang tidak asing lagi: Tentara salib kolonial dan Yahudi dunia adalah penghasut fitnah ini dalam Islam”).

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi, demokrasi merupakan ‘sistem yang asing di dalam dunia Islam. “*Syari’ah*” merupakan solusi alternatif bagi dunia Islam daripada solusi yang diimpor (demokrasi). Sistem demokrasi liberal dinilai gagal di dunia Islam sehingga harus diganti dengan sistem syariat Islam (Tibi, 2012:97). Oleh karena itu, Islamisme menghendaki penerapan nilai-nilai dan syariat Islam di dalam pemerintahan suatu negara.

Kondisi sosial dan budaya kontemporer yang telah dialami oleh masyarakat di dunia muslim membuat mereka harus mencari formula baru untuk menyelenggarakan sistem politik dan pemerintahannya. Sebab, sistem Islamisme dinilai tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya pluralisme dan modernitas sehingga menjadi hambatan untuk kemajuan negara yang kompetitif. Pada perkembangan berikutnya, kaum Islamis mencoba untuk menyelaraskan konsep Islamisme ke dalam segala aspek kehidupan modern, seperti yang dikatakan oleh Yvonne Haddad, “untuk mengislamisasikan modernitas, daripada memodernisasikan Islam” (Machairas, 2017). Oleh karena itu, *Post-Islamism* muncul sebagai alternatif baru dari dua posisi ideologi ekstrem, yaitu Sekularisme dan Islamisme (Hossain, 2016).

Post-Islamism mulai menjadi topik pembahasan di kancah internasional pasca revolusi Iran yang terjadi pada Februari 1979 (Bayat, 1996). Sejak peristiwa revolusi tersebut, masyarakat dunia mulai memberi perhatian pada perkembangan gerakan kelompok Islam politik. Mereka terus melakukan pengkajian dan penyelidikan mengenai apakah gagasan Islamisme mampu diterapkan ke dalam pemerintahan atau tidak. Pembahasan mengenai

kompatibilitas Islam dengan politik demokrasi terus berkembang pasca Revolusi Iran yang dipimpin oleh mullah atau santri Islam.

Haluan *Post-Islamism* berbeda dengan ideologi politik Islamisme yang menolak nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi, toleransi pluralisme (Tibi, 2012:116-117), dan kesetaraan gender (Tibi, 2012:6-7). Asef Bayat mengartikan *Post-Islamism* sebagai kondisi ide-ide Islamisme, simbol-simbol dan upaya Islamisasi dalam setiap bidang persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah kehilangan daya tariknya. Sebab, kehadiran Islamisme dinilai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Gagasan *Post-Islamism* muncul sebagai jawaban dari ketidakmampuan Islamisme dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Ide dari *Post-Islamism* dapat ditandai dengan adanya upaya membatasi peranan politisasi agama Islam (Bayat, 1996).

Post-Islamism diekspresikan dalam upaya penggabungan gagasan Islam (sebagai sebuah sistem kepercayaan) dan hak pilih serta kebebasan individual. *Post-Islamism* berarti konsep Islam yang dihubungkan dengan setiap nilai demokrasi dan aspek modernitas. *Post-Islamism* menyiratkan pemahaman bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan modernitas, tetapi kelangsungan eksistensinya sebagai agama bergantung pada pencapaian kompatibilitas ini. *Post-Islamism* dapat diringkas dalam kalimat, “Kami tidak keberatan menghancurkan masjid untuk membangun jalan raya”. Tindakan tersebut digambarkan oleh *Post-Islamism* sebagai hasil dari pemikiran dan upaya rasionalisasi yang kompleks. Penghancuran masjid bukan dimaknai sebagai peralihan menjadi sekularisme, namun hal tersebut sebagai kebijakan yang dihasilkan dari perpaduan nilai-nilai Islam dan politik. Jadi keputusan tersebut telah dibenarkan untuk meraih kepentingan masyarakat yang lebih signifikan (Bayat, 1996).

Post-Islamism dikonseptualisasikan sebagai upaya sadar untuk menyusun strategi rasional dengan tujuan melampaui Islamisme di dalam sosial, politik, dan

intelektual. Gerakan Islam politik dalam bingkai *Post-Islamism* akan berusaha untuk memadukan nilai-nilai Islam, kebebasan berpendapat, dan hak asasi sehingga menjadikan agama sebagai realitas plural yang bersifat akomodatif terhadap aspek-aspek demokratisasi, hak asasi, pluralisme, dan multikulturalisme (Hasan, 2015). Sehingga Islam tidak lagi bersifat kaku terhadap proses globalisasi dan dinamika politik.

Dalam menjalankan pemerintahan, negara berhaluan *Post-Islamism* tidak lagi memperjuangkan berdirinya negara berlandaskan *syari'ah* Islam. Namun, negara akan menampung beberapa aspek sekularisme pasif dan Islamisme pasif dalam kerangka demokrasi sehingga akan membentuk pola rumusan baru yang mencakup kepentingan masyarakat plural. Undang-undang akan dibuat tidak hanya untuk mengkhususkan kepentingan etnis tertentu, namun untuk mewakili setiap kelompok masyarakat dengan suatu fokus pada pembangunan ekonomi, keadilan (*equity*), yang disertai dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan keadilan sosial ekonomi yang lebih luas. Contoh Indonesia, mewakili identitas gabungan di mana tidak ada dominasi sekularisme maupun Islamisme, tapi beberapa unsur dari keduanya ada di dalam kerangka pengaturan demokratis. Menurut prinsip demokrasi Hotelling-Downs, jika ada dua partai politik besar atau kelompok mewakili preferensi para pemilih berhaluan sekularisme atau Islamisme, maka akan muncul suatu sistem politik yang stabil (Hossain, 2016).

Dalam sistem demokrasi yang disertai adanya sistem pemilihan, partai-partai politik ditempatkan di dua posisi: 'Tengah-Kiri' dan 'Tengah-Kanan' berkenaan dengan ideologi. Misalkan suatu partai sekularis mengambil posisi 'Tengah-Kiri' dan menyerukan sebuah pemerintahan sekularisme yang toleran, kemudian ada partai islamis menyerukan pemerintahan islam yang toleran. Untuk memperoleh kekuasaan, seiring berjalannya waktu partai-partai bersaing untuk menempatkan diri mereka sendiri ke dalam persepsi dan preferensi para pemilih atau masyarakat melalui strategi politik yang mempromosikan sistem pemerintahan yang bisa menampung semua aspirasi ragam etnis dan berupaya

untuk mempersatukan prinsip-prinsip sekuler dan Islamis. Argumen Hotelling-Down mengemukakan bahwa proses persaingan ini mengarah pada sistem politik yang stabil, toleran, dan moderat yang mencerminkan pandangan dunia dan aspirasi mayoritas utama. Dalam sistem seperti itu, tidak ada lagi ideologi politik murni karena prinsip ideologi telah bercampur menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Kaum sekuler mencoba menarik pemilih yang berpikiran Islam, sementara para Islamis mencoba menarik pemilih yang berpikiran sekuler. Menurut prinsip Hotelling – Downs, kedua pihak tersebut berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai prinsip yang utama dan menempatkan diri di posisi teratas, mewakili perpaduan dari sekularisme dan Islamisme (Hossain, 2016). Contoh negara-negara muslim yang menunjukkan indikasi *Post-Islamism* seperti Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Tunisia, Turki dan Syiria. Negara-negara tersebut tidak memperjuangkan pendirian negara syariat Islam, namun mereka memiliki kecenderungan politik demokratis dalam kerangka aturan hukum Islam yang etis dan moral. *Pos-Islamism* di negara-negara ini telah beralih dari interpretasi teokratis Islam menuju penekanan pada kontribusinya terhadap budaya dan peradaban (Hossain, 2016).

Post-Islamism dapat dilihat pada keputusan partai Ennahda pada kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016 yang mengeluarkan pernyataan resmi, bahwa partainya memisahkan diri dari aktivitas keagamaan dan politik. Segala aktivitas yang berhubungan dengan dakwah diberhentikan (Ibish, 2016), sehingga hal ini membuat partai Ennahda menjadi murni organisasi politik. Rachid Ghannouchi selaku pendiri partai Ennahda menjanjikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis, serta memberi sebutan baru bagi partainya dengan nama “Demokrat Muslim” sehingga gerakan partainya akan bersikap yang lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim.

Pada era perkembangan selanjutnya, realitas menunjukkan kesadaran masyarakat negara-negara muslim mengenai pentingnya kehadiran agama dalam aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi mulai meningkat dan optimisme terhadap

sistem sekularisme menurun. Sistem sekularisme asertif atau ‘tegas’ dinilai gagal menciptakan masyarakat yang manusiawi dan progresif di negara-negara mayoritas muslim. Adanya pemaksaan sistem sekularisme dari pemerintah ke rakyat gagal menciptakan suasana harmonis antara negara dan masyarakat muslim. Pemerintahan sekuler cenderung mengikuti gaya pemerintahan komunisme karena banyak kebijakan sekuler melarang aktivitas keagamaan, dan para pemuka agama dikriminalisasi. Hal ini terjadi di kebijakan pembangunan sekularis melarang kegiatan-kegiatan berbasis agama, dan banyak pemimpin agama dikriminalisasi, mengikuti jalur yang telah diambil oleh negara-negara komunis sebelumnya. Ini terjadi di Aljazair, Mesir, Iran, Tunisia dan Turki. Demi menjamin kelanggengan kekuasaan otoriter sekuler, negara-negara ini memberlakukan hukum yang keras untuk mengontrol gerakan-gerakan keagamaan dan politik yang reaksioner. Praktik kekuasaan otoriter sekuler seringkali memicu pemberontakan di negara-negara mayoritas muslim, seperti munculnya fenomena ‘*Arab Spring*’ pada akhir tahun 2010 di Tunisia yang berhasil menjatuhkan rezim Zine El Abidine Ben Ali pada 14 Januari 2011.

1.6 Argumen Utama

Keputusan Ennahda yang memisahkan aktivitas politik dan agama pada tahun 2016 terjadi karena gagasan Islamisme telah kehilangan daya tariknya. Sebab, kehadiran Islamisme dinilai tidak mampu menjawab persoalan-persoalan proses perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dari perkembangan dinamika global. Pelemahan daya tarik simbol gerakan Islamisme tersebut diindikasikan dengan adanya: tuntutan demokratisasi dari rakyat, kondisi lingkungan politik yang plural, tuntutan kompromistik dengan aktor-aktor politik oposisi, kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia, dan peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Ennahda.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya digunakan dalam penelitian akademik untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Menurut Nicholas Walliman, metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian (Bakry, 2016:11). Metode penelitian mewakili sejumlah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, memilah, memproses dan menganalisis informasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian (Bakry, 2016:11). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Susan E. Wyse, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (*understanding*) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh wawasan (*insights*) dalam suatu masalah serta membantu untuk mengembangkan ide-ide atau hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengungkap trends di balik sebuah pikiran dan pendapat, dan membuat kita dapat menyelam lebih dalam ke dalam masalah yang kita teliti. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) dan menafsirkan (*to interpret*) sebuah perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan makna (*meaning*), proses, dan konteks sebuah perilaku atau peristiwa sosial yang sedang diamati (Bakry, 2016:18). Sehingga analisis data melalui penelitian kualitatif ditujukan untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian. Oleh karena itu, fokus metode penelitian ini terletak pada interpretasi makna dan pemahaman terhadap suatu objek kajian.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data dan informasi. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapangan secara langsung, akan tetapi cukup merujuk pada informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap paling relevan

terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisis. Sedangkan menurut jenis data yang didapatkan, peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber kajian.

Menurut Kenneth D. Bailey, data sekunder adalah dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer (Bakry, 2016:172). Data sekunder tersebut didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, dan ragam informasi faktual lainnya yang terdapat di media internet. Pengumpulan data tersebut diperoleh melalui:

1. Buku;
2. Jurnal, reportase, dan publikasi ilmiah; serta
3. Media internet

1.7.2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha dari seorang peneliti untuk meringkas data yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data tertentu (Bakry, 2016:214). Analisis dimulai setelah beberapa data terkumpul (tidak harus seluruh data), yang kemudian berimplikasi pada langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengumpulan data (Bakry, 2016:191). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data sekunder yang telah didapatkan, kemudian dianalisis secara deskriptif.

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyusunnya mejadi beberapa bab, yaitu:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang secara umum hal-hal yang mendasari perubahan strategi politik Ennahda. Pada bab ini juga dijelaskan metodologi penelitian kualitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan metode *library research*. Dalam bab 1 ini nantinya akan dijelaskan mengenai kerangka konseptual yang memiliki fungsi untuk mendukung analisis penulis terkait perubahan strategi politik Ennahda, dengan menggunakan konsep *Post-Islamism*.

Bab 2. Ennahda Dalam Tatanan Politik Tunisia

Bab ini akan menjelaskan secara umum kiprah partai Ennahda dalam perpolitikan di Tunisia. Selain itu, bab ini akan menjelaskan rekam jejak partai Ennahda di Tunisia mulai dari awal kemunculannya pada tahun 2011 hingga 2016 saat kebijakan baru yang menandakan perubahan dalam strategi politik Ennahda.

Bab 3. Dinamika Politik Partai Ennahda di Tunisia

Bab ini menjelaskan realitas empirik yang menjadi sebab partai Ennahda mengubah haluan strategi politiknya. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Ennahda untuk mengadakan perubahan dalam strategi politiknya.

Bab 4. Alasan Perubahan Strategi Politik Pnnahda

Pada bab ini penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab Ennahda mengubah strategi politiknya di Tunisia. Fenomena politik domestik dan internasional (peristiwa yang menimpa Ikhwanul Muslimin di Mesir) memberikan *political learning* yang menjadi landasan utama bagi Ennahda untuk melakukan manuver politiknya. Dalam menjelaskan faktor-faktor

yang melandasi perubahan strategi politik tersebut, penulis menggunakan konsep *Post-Islamism*.

Bab 5. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tiap bab sebelumnya. Bab ini fokus memberikan kesimpulan dan opini penulis terhadap objek kajian yang dibahas.



BAB 2.

ENNAHDA DALAM TATANAN POLITIK TUNISIA

Pada bab 2 ini, penulis akan sedikit membahas mengenai kondisi geografis Negara Tunisia. Dalam tulisan ini akan dipaparkan juga mengenai sistem politik yang berlaku di Tunisia pada pasca revolusi Tunisia pada tahun 2010. Di samping itu, penulis akan membahas juga mengenai sejarah Tunisia sebelum revolusi dan rezim Bourguiba maupun rezim Ben Ali karena berkaitan dengan munculnya kelompok Islamis dalam panggung politik di Tunisia. Dalam bab ini juga bertujuan untuk memaparkan profil, dan rekam jejak Ennahda di Tunisia.

Sebelum membahas Ennahda, berarti harus membahas mengenai kemunculan kelompok Islamis. Kemunculan kelompok Islamis di Tunisia dalam panggung politik pada awalnya dipicu oleh kebijakan rezim Bourguiba yang bercorak sekularisme dan berusaha menghapus tradisi-tradisi Islam. Kebijakan rezim Bourguiba tersebut membuat kelompok Islamis yang awal mulanya hanya melakukan kegiatan dakwah, kemudian mengubah pola aktivitas mereka menjadi gerakan politik. Rezim yang merasa terancam dengan aktivitas-aktivitas kelompok Islamis meluncurkan beberapa kebijakan represif dan otoriter yang memicu konflik panjang antara masyarakat Tunisia dan pemerintah. Sehingga pada hasil akhirnya, rezim Bourguiba pun berhasil dijatuhkan oleh kudeta tak berdarah oleh Zine El Abidine Ben Ali. Pada awal mulanya, Ben Ali tampak harmonis dengan kelompok Islamis. Namun, pandangan Ben Ali tidak jauh berbeda dengan rezim pendahulunya bahwa kelompok Islamis hanyalah sebuah simbol kemunduran bagi kemajuan Negara Tunisia sehingga perlu disingkirkan.

Kelompok Islamis pada masa rezim Ben Ali mendapat izin untuk ikut berkontestasi dalam acara pemilihan parlemen. Meski kemunculan Ennahda saat itu terbilang baru, namun gerakan tersebut berhasil meraih suara yang cukup besar. Rezim kemudian merasa khawatir bahwa posisi kekuasaannya akan terancam dengan kemunculan kekuatan baru dalam panggung politik. Sehingga

sekali lagi kelompok Islamis menjadi sasaran dari kebijakan represif, dan otokrasi pemerintah.

Kelompok Islamis di bawah naungan Ennahda banyak mendapat simpati dari masyarakat Tunisia. Apalagi rezim Ben Ali gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kesulitan ekonomi, sehingga masyarakat semakin membenci rezim Ben Ali. Puncaknya di Sidi Bouzid, salah seorang pedagang sayur membakar diri sebagai bentuk aksi protes kepada polisi. Esok harinya meletus revolusi di Tunisia yang pada tahun 2010 menjadi awal mula fenomena Arab Spring. Setelah revolusi *Tsauratul al Karama (Revolusi Martabat)*, Ennahda mendapat poling suara yang besar dalam parlemen sehingga mendapat kekuasaan untuk menjadi pemerintah sementara di dalam parlemen.

Selama sekian tahun, Ennahda menjadi pemerintah bersama. Namun, Ennahda terpaksa harus mundur dari kekuasaan karena protes dari banyak pihak karena serangkaian peristiwa politik. Ennahda melakukan evaluasi terhadap pergerakan partainya. Pada hasil akhir dari Evaluasinya, Ennahda memutuskan untuk menjalin koalisi dengan kubu partai sekularis yang menjadi pemenang pemilihan pada tahun 2014. Tidak cukup itu, Ennahda membuat keputusan yang membuat partainya mendapat kecaman banyak pendukungnya dan mengumumkan keputusannya itu pada bulan Mei 2016. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Ennahda akan menghapus aktivitas dakwah dan hanya fokus bergerak dalam bidang politik (Bleiweis, 2016).

Penjelasan secara ringkas mengenai kemunculan dan sepak terjang politik Ennahda di Tunisia adalah sebagai berikut. Secara struktural organisasi, awal mula entitas Ennahda di Tunisia ialah gerakan dakwah yang bernama *al-Jamaa al-Islamiyya* (Kelompok Islam), yang didirikan pada tahun 1972. Pada tahap selanjutnya, gerakan tersebut berubah menjadi gerakan politik yang bernama MTI (*Mouvement de la Tendence Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*) pada tahun 1979 (Wolf, 2017:50). Namun karena regulasi pada masa rezim Ben Ali melarang penggunaan lambang agama sebagai gerakan politik, maka pada tahun 1989

kelompok tersebut mengubah namanya menjadi *Harakat* Ennahda atau 'Gerakan *Renaissance*' (Gerakan Kebangkitan). Meskipun bentuk organisasi tersebut kerap mengalami perubahan, misi yang dibawa oleh kelompok tersebut sama, bahwa agenda utamanya adalah memperjuangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek kehidupan sosial maupun politik. Tetapi ketika masa terpilihnya Ennahda menjadi kepala pemerintahan pada tahun 2011, partai tersebut secara perlahan menunjukkan sikap dan tindakan politik yang terbuka terhadap aspek serta prinsip-prinsip demokrasi. Namun Ennahda masih berupaya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam agenda politiknya, seperti usaha Ennahda dalam memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi Tunisia. Sebaliknya pada pasca kegagalan pemerintahannya di tahun 2013, Ennahda menjadi lebih kompromi dengan realitas politik yang ada dan mengedepankan pilihan rasional dalam menentukan sikap maupun pilihan politik. Sehingga, pada kongres ke-10 tanggal 20 Mei 2016, Ennahda yang sebelumnya dipandang sebagai partai yang menganut Islamisme, mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa partainya memisahkan diri dari aktivitas keagamaan dan politik.

Keputusan Ennahda untuk menghapus aktivitas dakwah dan mengkhususkan diri bergerak dalam bidang politik perlu ditelaah dengan konteks historis. Aspek historis tersebut akan membantu dalam memahami evolusi pergerakan partai Ennahda. Selain itu, bab ini juga akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai kondisi geografis dan sistem politik di Tunisia. Selanjutnya bab ini menjelaskan mengenai sejarah gerakan kelompok Islamis dan rekam jejak partai Ennahda di Tunisia. Adanya kultur sosial di tengah masyarakat Tunisia yang memegang teguh nilai-nilai religius dan tradisi Arab menjadi penyebab kemunculan ragam gerakan Islamis.

Dalam bab ini nantinya akan dijelaskan tentang meningkatnya minat publik terhadap nilai budaya Islam pada tahun 2000-an. Meskipun sebelumnya, Tunisia dipenuhi dengan proyek modernisasi dan westernisasi serta program pembangunan sosial-ekonomi rezim Bourguiba dan Ben Ali yang berorientasi sekularisme. Penulis mendeskripsikan beberapa faktor yang menyebabkan

bangkitnya minat warga Tunisia terhadap nilai dan aspek religius. Secara faktor domestik, popularitas Ben Ali menurun karena kecenderungan kebijakannya yang represif dan meningkatnya kesulitan ekonomi yang dialami warga Tunisia. Berikutnya, adanya peningkatan pengguna internet di tengah masyarakat Tunisia mulai sejak tahun 2007. Masyarakat Tunisia memanfaatkan internet sebagai sumber informasi untuk mempelajari tentang Islam dan budaya Arab meskipun seringkali ditafsir dan diterima secara konservatif. Hal ini membuat publik semakin mengkaitkan diri mereka dengan isu-isu politik internasional yang berkaitan dengan isu Islam dan Arab. Misalnya, warga Tunisia mengutuk kebijakan Amerika Serikat yang dinilai merugikan masyarakat muslim di dunia internasional dan khususnya terhadap masyarakat muslim Arab di Irak. Sehingga pada tahun 2007 peningkatan minat muslim Tunisia terhadap identitas pan-Arab dan Islam semakin jelas. Bahkan ada banyak masyarakat muslim Tunisia yang merasa ‘terpanggil’ untuk melakukan aksi jihad dan melibatkan diri ke dalam peperangan asing. Rezim pada akhirnya tidak mampu mengendalikan pemerintahannya akibat dari kegagalan dalam pengelolaan perekonomian negeri serta adanya fenomena peningkatan minat publik terhadap Islamisme. Hal-hal tersebut kemudian mengakibatkan rezim Ben Ali jatuh dalam peristiwa pemberontakan rakyat Tunisia *Tsauratu al Karama (revolusi Martabat)* pada tahun 2010, yang menjadi titik awal *Arab Spring*.

Pada akhirnya, bab ini mendeskripsikan tentang keberhasilan partai Ennahda dalam memperoleh suara mayoritas ketika pemilihan Majelis Konstituante pada tanggal 23 Oktober 2011. Sekertaris jenderal partai Ennahda, Hamadi Jebali, berhasil memperoleh posisi dalam pemerintahan sebagai perdana menteri. Dua partai lain yang memiliki suara terbanyak setelah Ennahda yaitu *Congrès pour la République (CPR)* dan *at-Takattul ad-Dīmuqrāṭī min ajl il-‘Amal wal-Ḥurriyyāt (Ettakol; Forum démocratique pour le travail et les libertés / FDTL)*, sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Ennahda yang dikenal dengan nama pemerintahan Troika. Pemerintah diberi mandat satu tahun untuk membuat konstitusi dasar Tunisia dan undang-undang pemilihan yang baru.

2.1 Kondisi Geografis dan Sistem Politik Tunisia

Tunisia adalah sebuah negara yang terletak di bagian Utara benua Afrika. Luas wilayah Tunisia 162.155 km². Tunisia merupakan salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim di belahan bumi bagian Afrika Utara. Tunisia terletak dipersimpangan antara Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Pada bagian Barat dan Selatan berbatasan dengan Aljazair (965 km), bagian Utara dan Timur berbatasan dengan Laut Mediterania, dan bagian Selatan dan Tenggara dengan Libya (459 km). Wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan benua Eropa (wilayah Selatan Italia) yang dipisahkan dengan laut Mediterania (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tanpa tahun).

Nama resmi negara Tunisia adalah *Republic of Tunisia* atau *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*. Sistem hukum di Tunisia mengikuti hukum sipil yang berasal dari Prancis dan beberapa aspek hukum syariat Islam. Sistem kepartaian di Tunisia memiliki pola sistem multipartai. Tunisia merupakan negara republik demokrasi representatif dengan sistem pemerintahan unitary semi-presidensial (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, tanpa tahun). Lembaga eksekutif berada di bawah kendali Presiden, sedangkan kabinet pelaksana pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Lembaga legislatif terdiri dari 217 kursi unikameral Dewan Perwakilan Rakyat atau *Assemblée des Représentants du Peuple (Majlis Nuwwab ash-Sha'b)*.

Dalam aspek pemilihan politik, secara umum Tunisia mengakui prinsip-prinsip sistem pemilihan umum pada tataran universal (dunia). Dalam artikulasi yang lebih ideal, Prinsip utama dalam sebuah praktik pemilihan umum yakni bertujuan untuk menerjemahkan kehendak masyarakat melalui sebuah representasi kenegaraan secara adil (The Carter Center, 2014). Akan tetapi, prinsip standard dunia internasional tersebut faktanya tidak memberikan tatacara yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut (The Carter Center, 2014). Sehingga dalam implementasinya pada beberapa negara, masih seringkali menuai kontra versi atau bahkan reduksi terhadap prinsip-prinsip tersebut, salah satunya yang terjadi di Tunisia.

Sistem pemilihan di Tunisia secara literal memang mengakui prinsip-prinsip kebebasan, adil dan praktik pemilihan umum secara berkala serta menjamin hak pilih dan kerahasiaan surat suara. Sebagaimana pemilihan pada umumnya, Presiden serta anggota dewan Tunisia dipilih melalui proses pemilu untuk lima tahun jabatan kerja. Kriteria peserta yang diperbolehkan dalam pemilihan umum di Tunisia pun juga telah diatur, yakni adalah warga negara yang berusia 18 tahun keatas. Kesemua prinsip tersebut tertulis dalam konstitusi Tunisia serta dianggap telah memenuhi standar dan komitmen pemilihan umum secara universal.

Secara nilai, mungkin Tunisia beranggapan telah memenuhi standard universal. Namun dalam praktiknya, Tunisia masih seringkali melakukan pelanggaran hak pilih yang tidak sesuai dengan nilai dasar sistem pemilihan universal. Pelanggaran tersebut salah satunya ditunjukkan dengan gagalnya institusi pemilihan umum di Tunisia untuk menjamin secara penuh hak pilih secara adil, khususnya berkaitan dengan suara representasi di parlemen negara ini (The Carter Center, 2014). Adapun pemilihan presiden diadakan setiap lima tahun sekali, begitu juga dengan pemilihan parlemen (The Carter Center, 2014). Sejak kurun waktu beberapa tahun ke belakang, pemilihan legislatif pertama di Tunisia diadakan pada tanggal 26 Oktober 2014 dan berikutnya akan diadakan pada tahun 2019 (CIA, 2019).

2.2 Sejarah Gerakan Kelompok Islamis dan Rekam Jejak Partai Ennahda di Tunisia

Dinamika politik di Tunisia berkaitan erat dengan keragaman kultur komunitas sosial dalam negeri tersebut. Sejak mendapatkan kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1956, suara politik yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di Tunisia berada di antara kelompok Islamis dan Sekularis. Budaya Islamis mulai muncul di komunitas masyarakat Tunisia sejak tahun 670 M. Sedangkan budaya sekularisme telah ada sejak Tunisia menyandang status sebagai negara protektorat Prancis pada tahun 1881 dan terus berada dalam pengaruh kekuasaan Perancis hingga memperoleh kemerdekaannya pada bulan Maret 1956 (International IDEA, tanpa tahun). Budaya sekularisme dari Perancis terus

berlanjut disebabkan oleh gerakan reformasi pada abad ke-19 di bawah rezim Habib Bourguiba dan Zine El Abidine Ben Ali. Meskipun tidak lagi menyanggah status protektorat Perancis, namun rezim Bourguiba dan Ben Ali menilai bahwa corak pemerintahan sekularisme merupakan solusi untuk Tunisia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan status Tunisia di kancah Internasional.

Sejak tahun 1967 hingga 1987 gerakan kelompok Islamis beberapa kali telah mengalami transformasi. Ragam transformasi tersebut mulai dari gerakan *al-Jama'a al-Islamiyya* yang fokus pada aktivitas dakwah; lalu ASQ (*Association for the Safeguard of the Qur'an*) yang dibentuk oleh rezim Bourguiba untuk memfasilitasi aspirasi dan kegiatan kelompok Islamis pada masa itu; MTI (*Mouvement de la Tendence Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*); hingga Ennahda (*Renaissance*). Tren kehidupan religius yang kuat di tengah masyarakat Tunisia menjadi penyebab kemunculan ragam transformasi gerakan kelompok Islamis tersebut. Secara historis, munculnya gerakan Ennahda terpaut erat dengan kultur sosial masyarakat serta dinamika politik yang terjadi di Tunisia.

Awal rekam jejak Ennahda muncul ke permukaan konstelasi politik Timur Tengah dapat ditelusuri sejak terbentuknya undang-undang yang melarang penggunaan atribut keagamaan dalam pergerakan politik pada tahun 1987. Nama Ennahda merupakan hasil dari perubahan akibat dari undang-undang tersebut di mana sebelumnya partai tersebut memiliki nama MTI (*Mouvement de la Tendence Islamique; Harakat al-Ittijah al-Islami*). Ennahda pernah memegang kendali pemerintahan Tunisia setelah berhasil memenangkan suara terbanyak di dalam parlemen pada pemilihan Majelis Konstituante tanggal 23 Oktober 2011. Sekertaris jenderal partai Ennahda, Hamadi Jebali, berhasil memperoleh posisi dalam pemerintahan sebagai perdana menteri. Namun, adanya insiden pembunuhan dua politisi oposisi dari kelompok sekularis, Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi, kemudian merusak citra pemerintahan partai Ennahda beserta koalisinya (yakni pemerintahan Troika). Insiden tersebut memicu aksi protes besar-besaran dan akhirnya memaksa pemerintahan Troika untuk mengundurkan diri.

Dalam merespon perkembangan konstelasi politik dan budaya masyarakat internasional yang semakin modern, kelompok Islamis mencoba berbenah diri untuk menemukan formula yang tepat agar mampu beradaptasi dengan realitas yang ada. Beberapa cendekiawan Islam yang terkenal di Tunisia, seperti Syaikh Mohammed al-Tahir ibnu Ashur dari Zaytouna, menyerukan untuk melakukan “*Ijtihad*”, yaitu upaya interpretasi hukum dalam Islam serta penggunaan penalaran independen yang merujuk kaidah khusus (Wolf, 2017:11). Ennahda ketika mundur dari kursi kekuasaan pada bulan Januari 2014, partai tersebut mencoba untuk mengevaluasi pergerakan politiknya. Ennahda menyimpulkan bahwa perjuangan partai untuk politik identitas (keagamaan) serta upaya pelestarian ‘warisan muslim Arab Tunisia’ harus diakhiri.

Ennahda kemudian lebih memilih untuk fokus menangani isu keamanan dan ekonomi negara yang sedang memburuk dan untuk mengatasi problematika yang ada. Ennahda menekankan perlunya membuka diri dengan melakukan berbagai konsesi serta ‘konsensus nasional’ dengan para lawan politiknya. Perubahan sikap partai Ennahda mendapat kecaman yang keras dari pendukung-pendukungnya khususnya dari sayap dogmatis partai tersebut. Namun, keputusan partai tersebut bisa muncul disebabkan dari sejarah panjang sepak terjang politik Ennahda di Tunisia serta beberapa peristiwa yang memicu manuver politik yang demikian.

2.2.1 Embrio Gerakan Kelompok Islamis di Tunisia

Tunisia menjadi negara yang merdeka sepenuhnya pada tahun 1956. Tunisia dideklarasikan sebagai republik pada bulan Juli 1957, hari yang sama ketika Habib Bourguiba dilantik menjadi presiden pertama di Tunisia (Nassar, 2016:51). Setelah resmi dilantik menjadi presiden, Bourguiba membuat pernyataan bahwa negara baru tersebut dalam konteks kebijakan dan gaya pemerintahannya akan menjadi seperti Barat (Wolf, 2017:25). Pernyataan Bourguiba tersebut menyiratkan penolakan suara kubu nasionalis Arab dalam membentuk masa depan negara. Padahal pada masa itu, banyak warga Tunisia yang tertarik pada janji Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang memiliki visi untuk menyatukan seluruh dunia Arab di bawah kepemimpinannya sebagai bentuk kebencian mereka

terhadap kolonial Barat. Hanya saja, rakyat Tunisia ingin menggabungkan nasionalis Arab dengan nilai-nilai Islam tradisional, berbeda dengan Mesir yang condong dengan sekularisme (Wolf, 2017:22).

Secara prinsip pendirian, Habib Bourguiba memang tertarik untuk mempromosikan pembangunan sosial ala Barat. Orientasi dan ketertarikan Bourguiba terhadap pemikiran pembangunangaya Barat timbul setelah memandang kegagalan corak pemikiran Islamisme gagal diterapkan di dunia Arab. Oleh karena itu, ketika Bourguiba terpilih menjadi presiden pertama di Tunisia, yang menjadi perhatian pertamanya adalah menyingkirkan pengaruh religius dari negara dan menyingkirkan lawan politiknya yang pro terhadap pan-Arab. Pada tahun 1959, lebih dari seratus aktivis dinyatakan bersalah atas tuduhan makar untuk membunuh Bourguiba. Langkah Bourguiba berikutnya ialah memerintahkan pembunuhan terhadap mantan sekretaris jenderal partainya⁶ sendiri yang pro terhadap kelompok Islamis, Salah Ben Youssef, pada bulan Agustus 1961 di Jerman (Edusfax, tanpa tahun). Pada kurun waktu yang sama, Bourguiba juga memerintahkan pembubaran lembaga-lembaga keagamaan. Serangkaian kebijakan Bourguiba tersebut, yang condong mengadopsi gaya pembangunan Barat dan mengucilkan kubu Islamis, kemudian memicu kelompok Islamis untuk melakukan aktivitas politik demi menjaga eksistensinya.

2.2.2 Latar Belakang Kemunculan Ennahda

Ada beberapa peristiwa yang mendasari munculnya Ennahda di Tunisia. Rangkaian peristiwa yang menjadi penyebab kemunculan Ennahda sudah ada sejak masa pemerintahan Habib Bourguiba hingga rezim Zine El Abidine Ben Ali. Kelompok Islamis di Tunisia pada awalnya berupaya untuk mempertahankan eksistensinya melalui pembentukan wadah organisasi keagamaan dan sosial dengan mempertahankan tradisi dakwah dan edukasi Islam terhadap masyarakat.

⁶ Bourguiba dan sekelompok nasionalis Tunisia membentuk partai *The New Constitutional Liberal Party / al-Ḥizb al-Ḥurr ad-Dustūrī al-Jadīd* atau dikenal dengan sebutan **Neo-Destour**. Partai ini dibentuk pada tahun 1934 di masa protektorat Perancis (Canada IRBC, 2004; Howling Pixel, tanpa tahun).

Namun, adanya program rezim pemerintah yang ingin menghapuskan tradisi konservatif dan religius dalam negeri dan menggantinya dengan budaya barat kemudian memicu masyarakat Tunisia untuk mengubah pola dakwah mereka menjadi aktivitas politik. Entitas gerakan dakwah dan edukasi keagamaan secara perlahan berubah menjadi partai politik kemudian aktif berupaya untuk menggulingkan rezim penguasa.

Pada masa pemerintahan Bourguiba, proyek modernisasi menjadi fokus awal dari program pemerintahan. Pada bulan Agustus 1956, lembaga pengadilan syariat Maliki dan Hanafi dibubarkan, dan undang-undang gender tradisional digantikan oleh *Personal Status Code* (Hukum Status Pribadi), seperangkat undang-undang yang mendukung hak-hak perempuan. Dalam pidatonya, Bourguiba menegaskan bahwa *Personal Status Code* adalah kelanjutan dari gerakan hak-hak perempuan yang diperjuangkan oleh Tahar Haddad, yang sebelumnya pada masa pra kemerdekaan ditentang oleh Bourguiba itu sendiri⁷. Bahkan Bourguiba sering terlihat di tv melepas kerudung pengamat wanita (Wolf, 2017:29).

Program rezim Bourguiba berikutnya yang memicu kelompok Islamis Tunisia untuk melakukan aktivitas politik pada masa itu ialah upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak kelompok Sufi yang dekat dengan kelompok pendukung Pan-Arabisme atau Arab-Nasionalisme dari kalangan Universitas Zaytouna dengan menuduh mereka bersekutu dengan Perancis dan Salah Ben Youssef⁸. Rezim secara perlahan mulai mengubah tradisi keagamaan Tunisia dengan program reformasi pendidikan melalui upaya westernisasi sistem pendidikan. Target utamanya adalah pembubaran lembaga yang berdiri atas tradisi

⁷ Pada masa pra kemerdekaan Tunisia, Bourguiba memerlukan kekuatan persatuan dari kelompok Islamis Tunisia untuk melawan Perancis. Sehingga Bourguiba mengecam proyek asimilasi budaya Perancis dengan Tunisia, lalu membela jilbab dan kerudung tradisional Tunisia yaitu sefsari. Bourguiba secara terbuka mengecam Tahar Haddad yang bersuara tentang hak-hak perempuan, dengan alasan bahwa usulan reformasinya akan menguntungkan para pejabat Protektorat dan tidak memiliki efek positif pada masyarakat Tunisia (Wolf, 2017:23).

⁸ Sebelumnya para aktivis pendukung Salah Ben Youssef dituduh berbuat makar untuk membunuh Bourguiba pada masa awal kemerdekaan tahun 1959 (Wolf, 2017:25).

keagamaan yakni Universitas Zaytouna. Pada bulan Juni 1958, Presiden mengkritik pedas kurikulum tradisional Zaytouna dan berupaya untuk menerapkan sistem pendidikan modern. Presiden mengubah Universitas Zaytouna menjadi Fakultas Syariah dan Teologi, di mana merupakan bagian dari Universitas Tunis (Wolf, 2017:29).

Tidak hanya itu, banyak dosen direkrut dari Perancis untuk memajukan program pendidikan Bourguiba dan membuka sistem bilingual (Daoud, 1991). Dengan demikian, mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam proses belajarnya semakin sulit untuk mendapatkan kesempatan lulus di Universitas Zaytouna dan secara tidak langsung budaya Barat secara perlahan menurunkan tradisi keagamaan yang ada. Selanjutnya, Bourguiba berupaya membersihkan praktik-praktik keagamaan yang mengakar di dalam masyarakat. Ini termasuk rukun-rukun Islam seperti menunaikan ibadah haji ke Mekah dan berpuasa di bulan Ramadhan. Namun, Presiden tetap menjaga dirinya dengan membingkai program reformasinya itu menggunakan bahasa Islam yang seakan merupakan kewajiban agama. Dengan demikian, kebijakannya mengenai tidak berpuasa dikemas sebagai bentuk “jihad melawan keterbelakangan” untuk mengatasi peningkatan ketidakberdayaan ekonomi. Presiden Bourguiba membuat alasan, pada masa awal Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berhenti berpuasa ketika peristiwa penaklukan kota Mekah (*fathu Makkah*) dan Islam merupakan agama yang mengutamakan aksi dan perbuatan baik (Wolf, 2017:30).

Ketidakpuasan terhadap rezim Bourguiba terus meningkat dan diperkuat oleh krisis ekonomi yang semakin mendalam. Pada awal tahun 1960-an, Presiden menerapkan sistem pembangunan ekonomi sosialis dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi. Demi memperjelas pergeseran menuju sosialisme tersebut, pada tahun 1964 Neo-Destour mengubah namanya menjadi *the Destourian Socialist Party (Parti Socialiste Destourien, PSD)*. Mantan pejabat Serikat Buruh Umum Tunisia (*Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT*), Ahmed bin Salah, ditugaskan untuk menjalankan pembangunan berbasis negara yang fokus

pada koperasi pertanian dan industrialisasi sektor publik. Namun, pembangunan ekonomi sosialisme yang diterapkan Bourguiba gagal (Encyclopaedia Britannica, tanpa tahun). Rezim memilih untuk mengendalikan perpolitikan melalui kepemimpinan otoriter.

Kekecewaan terhadap rezim membuat masyarakat Tunisia khususnya kelompok Islamis ingin melakukan aksi nyata untuk melakukan perubahan dalam negerinya namun mereka belum memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Bourguiba dengan cepat melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam negeri yang lebih luas lagi. Untuk mengendalikan gerakan kelompok Islamis, maka pada tahun 1967 Bourguiba membentuk Asosiasi Penjaga Al-Quran, (*Association for the Safeguard of the Qur'an*, ASQ). ASQ difungsikan untuk sebagai pengganti dari Universitas Zaytouna dan sebagai saluran untuk mengekspresikan kegiatan keagamaan mereka. Bagi kelompok muslim, tidak ada pilihan alternatif selain bergabung dengan ASQ sehingga pada saat itu banyak aktivis muslim bergabung juga dengan ASQ (Alexander, 2016:47). Tetapi, kelompok Islamis mengeluhkan pembatasan ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah terhadap mereka.

Pada tahun 1964, Rachid Ghannouchi⁹ beserta sekelompok aktivis kecil mencari suaka di Mesir karena tertarik dengan ideologi pan-Arab Gamal Abdel Nasser, dan juga mendaftarkan diri di Universitas Kairo. Sebab, Universitas Zaytouna saat itu telah menjadi kebarat-baratan dan nilai-nilai tradisionalnya semakin hilang. Namun hanya beberapa bulan kemudian, otoritas Mesir mengeluarkan Rachid dan rekan-rekannya karena hubungan Bourguiba dan Nasser meningkat dan kedutaan Tunisia di Kairo meminta otoritas Mesir untuk mengusir mereka karena dianggap sebagai penentang rezim. Selanjutnya,

⁹ Rachid Ghannouchi, salah satu pemikir paling terkemuka dalam bidang pemikiran Islam kontemporer. Rachid Ghannouchi merupakan tokoh penting dalam rekam jejak partai Ennahda. Ia adalah salah seorang yang memprakarsai terbentuknya MTI (*Mouvement de la Tendance Islamique; Harakat al-Ittihad al-Islami*) dan Ennahda. Rachid Ghannouchi telah menjadi ideolog sentral, kekuatan pemersatu, ahli strategi dan pemimpin pengasingan gerakan Islam Tunisia Ennahda (Tamimi, 2001:vi).

Ghannouchi dikejutkan dengan kebijakan Nasser yang menindak keras terhadap Ihwanul Muslimin dan peningkatan hubungannya dengan Bourguiba. Hal tersebut membuat Ghannouchi kecewa dengan Nasser dan menjauhkan diri dari pan-Arabisme. Sehingga Ghannouchi memutuskan untuk pindah ke Suriah di mana ia dipengaruhi oleh Islam Politik. Ketika melanjutkan studinya di Suriah, Ghannouchi menjadi semakin yakin bahwa nasionalisme Nasser telah menjadi sesat karena dinilai menentang Islamisme. Ghannouchi menyatakan dirinya pindah haluan menjadi Islamisme pada tanggal 15 Juni 1966 (Tamimi, 2001:22).

Pada tahun 1967, Arab kalah melawan Israel dalam peristiwa Perang Enam Hari (*Six Day War*). Dalam Enam Hari, pasukan Israel tidak hanya mengalahkan Mesir, Yordania, dan Suriah, tetapi telah mengambil kendali atas jalur Gaza, Semenanjung Sinai Mesir, *West Bank*, dan Dataran Tinggi Golan Suriah. Lebih parah lagi, Bourguiba satu-satunya pemimpin di dunia Arab yang tidak menganjurkan konfrontasi langsung dengan Israel. Hal tersebut mengundang kekecewaan banyak pihak terhadap pemikiran sekularisme dan nasionalisme Arab pada masa itu. Kemenangan Israel pada peristiwa Perang Enam Hari menjadi pemicu bangkitnya gerakan Islamisme di seluruh dunia Arab.

Rachid Ghannouchi, yang awalnya studi di Suriah kemudian melanjutkan studinya ke Paris untuk meraih gelar pasca sarjana. Di Paris juga, Rachid bertemu dengan cabang *Jama'at al-Tabligh* dari Pakistan yang merupakan gerakan Islamis yang sangat berpengaruh pada masa itu. Gerakan tersebut fokus dalam bidang dakwah dan edukasi Islam. Gerakan tersebut mempercayai bahwa umat Islam telah tersesat akibat jauh dari ajaran agama. Bagi gerakan tersebut, reformasi Islam bisa diraih melalui perbaikan kualitas kepribadian manusia karena individu adalah landasan masyarakat. Dengan demikian, reformasi Islam dapat terjadi melalui proses kebangkitan Islam secara *bottom-up*. Para anggota gerakan tersebut berupaya untuk menciptakan individu-individu yang '*shaleh*' dengan mengajarkan mereka sunnah (segala ucapan dan perbuatan yang diyakini telah dilakukan oleh Nabi) dengan tujuan besar untuk menciptakan masyarakat Islami yang sesungguhnya. Di Paris, Ghannouchi menjadi sosok terkemuka serta dipercaya

untuk menjadi imam jamaah shalat, dan ia pun menjadi terinspirasi oleh kelompok itu (Tamimi, 2001:24-25).

Antusias yang begitu tinggi untuk menjadi aktivis Islam semakin muncul. Hal itu makin dipicu dengan adanya perselisihan yang terus menerus terjadi di antara kelompok kiri dan rezim penguasa. Pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, Rachid Ghannouchi beserta aktivis Islam politik lainnya yaitu Hmida Ennaifer, dan Abdelfattah Mourou mendirikan organisasi yang baru bernama *al-Jama'a al-Islamiyya* (kelompok Islam). Melalui organisasi ini, kelompok Islamis bertujuan untuk ikut andil memberi kontribusi tidak hanya dalam ruang privat, namun menghidupkan kembali Islam dalam ruang publik, termasuk masjid-masjid, asosiasi-asosiasi dan fasilitas pendidikan. Banyak dari anggota ASQ tertarik untuk bergabung dengan *Jama'a al-Islamiyya* yang dinilai lebih bersemangat membela Islam. Salah satu pendiri *al-Jama'a al-Islamiyya* juga yakni Abdelfattah Mourou, merupakan mantan anggota ASQ. Program kegiatan *al-Jama'a al-Islamiyya* tidak hanya seputar masalah keaslian budaya dan agama saja, namun juga melakukan serangkaian kegiatan sosial seperti acara sosial, olahraga, belajar dan musik. Sehingga *al-Jama'a al-Islamiyya* mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai lapisan masyarakat (Wolf, 2017:32-38).

Pada awalnya, Bourguiba tidak menganggap keberadaan *al-Jama'a al-Islamiyya* sebagai kelompok yang berbahaya. Sebab beberapa anggota partai Bourguiba, PSD, menjalin hubungan yang dekat dengan aktivis *al-Jama'a al-Islamiyya*. Bourguiba bahkan membiarkan faksi partainya menyerukan Islamisasi dan Arabisasi masyarakat, membiarkan mereka mendekati para pemimpin aktivis *al-Jama'a al-Islamiyya* dalam upaya untuk meyakinkan mereka (*al-Jama'a al-Islamiyya*) supaya mempengaruhi garis politik rezim. Namun, tindakan dari anggota partai tersebut dianggap sebagai perantara untuk mendekati diri dengan masyarakat muslim. Sebab Bourguiba pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, perhatiannya fokus untuk melawan kelompok gerakan vokal sayap kiri. Bourguiba memerlukan pengaruh kelompok Islamis untuk melawan kelompok gerakan vokal sayap kiri, sehingga mencoba mengendalikan kelompok Islamis.

Bourguiba memfasilitasi pertumbuhan kelompok Islamis dan membiarkan kelompok Islamis mengutuk 'Marxisme yang tak bertuhan', salah satu konsep dari ajaran komunisme (Wolf, 2017:39).

Pada tahun 1970 Anwar Sadat mengambil alih kekuasaan di Mesir setelah kematian Nasser (Hasan, 2017). Anwar Sadat menjauhkan diri dari proyek pan-Arab Nasser dan malah menyebut dirinya 'Presiden yang beriman'. Sadat mulai membebaskan tahanan Ikhwanul Muslimin dan mengizinkan mereka beroperasi di tempat terbuka dan menerbitkan majalah bulanan. Sebagai akibatnya, aliran literatur Ikhwanul Muslimin meningkat di seluruh wilayah.

Ketika Bourguiba menindak keras kelompok kiri, kelompok Islamis mendapat pengaruh yang lebih luas lagi, khususnya di bidang pendidikan. Pengaruh perlawanan kelompok Islamis terhadap ajaran komunisme dan banyaknya literature yang masuk dari Ikhwanul Muslimin Mesir ke Tunisia, membuatnya semakin diminati oleh masyarakat muslim Tunisia. Banyak masyarakat muslim, bahkan dari kalangan terkemuka di Tunisia tertarik pada *al-Jama'a al-Islamiyya*. Misalnya, Nejjib Karoui, putra Hamed Karoui, seorang pejabat senior yang akan menjadi perdana menteri di bawah rezim Ben Ali, bergabung dengan *al-Jama'a al-Islamiyya* dan kemudian menjadi pemimpin terkemuka dalam gerakan tersebut (Wolf, 2017:38).

Pada tahun 1970-an, pengaruh *al-Jama'a al-Islamiyya* meluas hingga ke ranah institusi perguruan tinggi. Kelompok Islamis tersebut aktif melakukan berbagai kegiatan di wilayah kampus seperti mengaktifkan kegiatan masjid, melakukan dakwah dan ikut berpartisipasi dalam perkumpulan diskusi yang diorganisir oleh kelompok kiri. Kelompok *al-Jama'a al-Islamiyya* menyadari bahwa ideologi yang mereka miliki belum mampu untuk menghadapi perdebatan politik yang memanas di wilayah kampus. Sehingga *al-Jama'a al-Islamiyya* membuka diri untuk mempelajari karya-karya Marxis untuk memahami ideologi kelompok kiri dan menemukan cara untuk menentang ajarannya secara efektif.

Oleh karena itu secara khusus, kelompok kiri menentang kemunculan aktivis *al-Jama'a al-Islamiyya*.

Pada tahun 1970-an, kelompok kiri mampu mengalahkan mahasiswa PSD yang selalu mendominasi dalam pemilihan organisasi kemahasiswaan di Universitas Manouba, Serikat Umum Mahasiswa Tunisia, UGET (*L'Union Générale des Étudiants de Tunisie*). Mahasiswa pendukung PSD tidak menerima kekalahan dalam pemilihan tersebut. Hal itu menjadi pemicu konflik antara pendukung PSD, kelompok kiri, dan nantinya pada pertengahan 1970 an aktivis Islamis. Pada tahun 1977, ketegangan antara mahasiswa pendukung *al-Jama'a al-Islamiyya*, PSD, dan kelompok kiri meningkat menjelang pemilihan mahasiswa UGET berikutnya. Anggota UGET ingin memenangkan kandidat dari kelompoknya tanpa ada pesaingnya. Sehingga mahasiswa yang tidak setuju dengan UGET mengorganisir rapat umum untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka yang kemudian berubah menjadi bentrokan kekerasan. Peristiwa tersebut menyebabkan mahasiswa *al-Jama'a al-Islamiyya* membuat pernyataan pertama mereka yang mengutuk penggunaan kekerasan. Pernyataan itu ditandatangani oleh para Mahasiswa yang menamakan diri mereka “Gerakan Tendensi Islam” (*Mouvement de la Tendence Islamique*, MTI; *Harakat al-Ittijah al-Islami*) (Wolf, 2017:43-44).

Fokus pergerakan MTI berbeda dengan *al-Jama'a al-Islamiyya*. Bila *al-Jama'a al-Islamiyya* berfokus pada pembinaan ahlak individu, dakwah nilai-nilai moralitas dan ilmu keislaman, maka MTI berfokus pada kegiatan yang menyerukan aksi sosial dan politik untuk melawan rezim sekularisme Bourguiba. MTI memandang bahwa masyarakat muslim harus terjun ke dunia politik untuk mengatasi problematika dekadensi negara dan masyarakat Islam, untuk mengatasi nilai-nilai keislaman yang mulai hilang di dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Banyak mahasiswa di Tunisia yang tertarik mengikuti gerakan Islam politik tersebut untuk memperjuangkan Islam.

Peristiwa revolusi Iran pada 1979 yang mengakibatkan jatuhnya dinasti Pahlevi, menunjukkan kepada kelompok gerakan Islam politik di Tunisia bahwa gerakan Islam mampu melangkah lebih jauh daripada bergerak seputar dakwah teoritis dan akhlak. Revolusi Iran 1979 mengilhami aktivis gerakan Islam Politik di Tunisia untuk meningkatkan aksi politiknya. Pada bulan Juli 1979, kelompok Islamis mengadakan kongres di Manouba. Mereka sepakat untuk mengubah nama organisasinya secara resmi menjadi Gerakan Tendensi Islam (*Mouvement de la Tendence Islamique, Harakat al-Ittijah al-Islami, MTI*). Para aktivis Islam politik menggunakan nama pergerakan yang pernah dipakai di kampus untuk menekankan relevansinya dengan situasi pada saat itu sekaligus sebagai bentuk kesediaan mereka untuk bergerak di sosial-ekonomi dan politik (Wolf, 2017:50).

Pada bulan Juli 1981, satu bulan setelah MTI mengajukan permohonan izin, permintaan untuk melegalkan partai politiknya ditolak. Beberapa bulan berikutnya, lebih dari ratusan aktivis Islamis dipenjara atas tuduhan penyebaran informasi palsu, operasi asosiasi yang tidak sah, hasutan untuk melakukan kekerasan terutama di wilayah kampus. Penindasan tersebut memperkuat citra publik MTI dan banyak warga Tunisia mengancam tindakan keras rezim. Kekecewaan rakyat terhadap rezim semakin meningkat setelah pemilu 1981, presiden memalsukan hasil untuk memberikan PSD 94,6% suara, sehingga tidak ada partai lain yang mencapai 5% suara yang diperlukan untuk diakui secara hukum (Wolf, 2017:57-58).

Pada tanggal 7 November 1987, Zainal Abidine Ben Ali melakukan kudeta tak berdarah terhadap Bourguiba. Ketika awal-awal mengambil alih kekuasaan, ia mengendalikan keamanan negara dengan cara memenjarakan 157 anggota MTI karena dianggap berpotensi sebagai ancaman keamanan negara. Namun, Ben Ali berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan Bourguiba yang gagal mencegah perkembangan gerakan Islamisme melalui cara represif. Sehingga beberapa bulan berikutnya, presiden Ben Ali menghentikan tindakan kerasnya dan antara bulan November 1988 dan April 1989 ia membebaskan semua tahanan MTI. Ben Ali mengancam kebijakan-kebijakan Bouguiba dan menjanjikan pemerintahan Tunisia

yang belandaskan demokrasi yang bertanggung jawab. Ia juga berjanji untuk mengeluarkan rancangan undang-undang yang memastikan bahwa partai - partai politik dan media akan memainkan peran yang lebih besar dalam mengembangkan Tunisia. Hal-hal ini membuat banyak pihak menaruh harapan bahwa Ben Ali akan mewujudkan pemerintahan baru yang sesuai dengan harapan masyarakat Tunisia (Wolf, 2018).

Seorang diplomat asing mengamati bahwa pada tanggal 20 Maret 1988 untuk pertama kalinya di dalam sejarah Tunisia, partai-partai oposisi yang sah diizinkan berpartisipasi di dalam parade. Pada tahun awal kepresidenan Ben Ali berlalu, tidak ada kebijakan pembatasan media massa atau buku-buku, dan tidak ada kasus yang berakhir dengan hukuman mati (Wolf, 2018). Ben Ali juga menghapus aturan undang-undang yang berlaku di masa Bourguiba mengenai "presiden seumur hidup" dan mengumumkan program privatisasi sementara untuk meningkatkan perekonomian. Untuk menunjukkan komitmen barunya terhadap demokrasi serta melepaskan diri dari citra pemerintahan Bourguiba, Ben Ali menamai ulang Partai Bourguiba *Parti Socialiste Destourien* (PSD) menjadi *Rassemblement Constitutionnel Démocratique* (RCD) (Encyclopaedia Britannica, tanpa tahun).

Ben Ali ingin membuat dirinya dekat dengan kelompok Islamis dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap mereka dan berusaha untuk tidak meniru kebijakan keras Bourguiba terhadap mereka. Ben Ali mengizinkan anggota MTI untuk menjadi bagian dari komite yang bertugas menegosiasikan 'Pakta Nasional', yang ditandatangani oleh 16 partai dan organisasi pada tahun 1989. Pakta Nasional mengabadikan dukungan para peserta penandatanganan untuk HAM (Hak Asasi Manusia) dan *Personal Status Code*, di samping kebebasan berpendapat dan asosiasi 'dalam konteks hukum' (Wolf, 2018). Ben Ali juga memilih untuk menyiarkan azan di radio dan televisi. Selain itu, langkah Ben Ali selanjutnya yakni membuka kembali tiga kajian / mata kuliah kampus Islam di Universitas Zaytouna dan memulihkan statusnya sebagai universitas pada tahun 1987.

Tak berselang lama setelah itu, Ben Ali juga mendirikan kementerian agama, pusat kajian agama Islam di kota suci Kairouan, dan Dewan Tinggi Agama Islam yang bertugas memastikan undang-undang yang dibuat sesuai dengan kaidah Islam. Presiden Ben Ali juga menetapkan kebijakan untuk menentukan bulan Ramadhan dengan metode melihat bulan, yang pada masa rezim Bourguiba menggunakan kalender Gregorian. Pada tahun 1989, presiden mengadakan Ramadan Untuk Semua, yang mengklaim memberikan makanan gratis untuk keluarga atau masyarakat terpinggirkan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan Ben Ali (Wolf, 2017:69).

Upaya-upaya pendekatan rezim Ben Ali terhadap masyarakat Tunisia dapat dinilai untuk meredakan amarah kelompok Islamis terhadap pemerintah yang dianggap berupaya menghapus tradisi religius yang ada sejak rezim Bourguiba. Namun, dalam perihal kekuasaan, Ben Ali tidak memberi kesempatan kepada kelompok religius untuk menjadi kekuatan politik di Tunisia. Steffen Erdle di dalam buku Anne Wolf *Political Islam in Tunisia The History of Ennahda*, berpendapat bahwa Ben Ali mempertegas bahwa 'Islam memang harus diberi ruang yang selayaknya di masyarakat, namun itu tidak sepatutnya diberi ruang kekuasaan untuk mengatur masyarakat'. Pada tahun 1988, Presiden mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi semua kegiatan dan pertemuan di masjid oleh orang-orang selain yang ditunjuk oleh Departemen Agama. Selain itu, undang-undang partai politik yang baru, di mana enam partai oposisi yang terdaftar, melarang pembentukan partai dengan latar belakang keagamaan, ras, etnis, dan wilayah. Oleh karena itu pada tahun 1988, kelompok Islamis mengubah nama MTI menjadi *Harakat Ennahda* atau 'Gerakan *Renaissance*' (Gerakan Kebangkitan) (Wolf, 2017:69).

2.2.3 Ennahda dan Rezim Ben Ali

Ben Ali mengadakan pemilihan presiden dan parlemen pada tahun 1989. Pada bulan Juni 1989, Ennahda berupaya memperoleh lisensi dari pemerintah untuk menjadi partai politik yang resmi. Namun, permohonan Ennahda untuk

status partai ditolak. Dalam sebuah pernyataan Juni 1989, Ben Ali menegaskan sikapnya mengenai Ennahda dengan menyatakan bahwa:

'We say to those who mix religion with politics that there is no way of allowing them to form a party' ('kami katakan kepada mereka yang mencampurkan agama dengan politik bahwa tidak ada cara untuk memungkinkan mereka membentuk sebuah partai') (Wolf, 2018).

Konsesi yang jelas dari rezim Ben Ali adalah mengizinkan Ennahda pada bulan Januari 1990 untuk tetap memproduksi literatur sendiri, *al-Fajr*. Namun, konsesi tersebut adalah jebakan untuk Ennahda. Rezim membiarkan Ennahda menerbitkan *al-Fajr* agar mengetahui pemikiran dan program Ennahda. Jadi beberapa bulan setelah *al-Fajr* diterbitkan, direktornya ditangkap dan dituduh membuat artikel yang berisi fitnah. Publikasi *al-Fajr* dilarang pada bulan Januari 1991 (Wolf, 2017:72).

Beberapa aktivis sekuler, meskipun dalam minoritas, juga meminta presiden untuk melegalkan Ennahda. Namun faktor-faktor eksternal, terutama munculnya *al-Jabha al-Islamiyya lil-Inqadh* atau *Front Islamique du Salut* (FIS) di negara tetangga, Aljazair, memperkuat tekad Ben Ali untuk melawan musuh-musuh dari kelompok Islamis. Di Aljazair, proses pembukaan politik memuncak dalam pemilihan lokal bebas pada bulan Juni 1990 di mana FIS muncul sebagai partai dominan. Ben Ali khawatir hasil pemilihan di Algeria akan meningkatkan kepercayaan diri Ennahda, Sehingga Ben Ali berusaha sangat keras untuk merusak penyebaran informasi tentang kemenangan FIS, dan menegakkan kontrol media yang lebih ketat. Hasil pemilihan di Aljazair membuat Ben Ali mengambil kesimpulan bahwa metode mengintegrasikan Ennahda ke dalam politik bukanlah solusi yang tepat untuk 'mengekan' kaum Islamis. Oleh karena itu dalam bulan-bulan berikutnya, Ben Ali memperkuat represi, sementara Rachid Ghannouchi mendorong rakyat Tunisia untuk meniru *'intifada* (perlawanan) Aljazair pada tahun 1988' (Wolf, 2017:72-73)

Pada tahun 1980-an, konfrontasi antara pendukung Ennahda dan rezim semakin meningkat. Banyak mahasiswa yang tergolong milisi dari kelompok

Islamis ditangkap, dipenjara dan disiksa hanya karena berpartisipasi dalam demonstrasi di kampus. Insiden penembakan seorang siswa pada bulan September 1990 ketika melakukan demonstrasi, memicu aksi protes yang lebih besar. Dalam menanggapi kebijakan represif rezim, beberapa oposisi membalas tindakan pemerintah tersebut dengan aksi yang lebih radikal. Para aktivis yang memiliki hubungan dengan Ennahda melakukan aksi bakar kantor partai RCD di Bab Souika, daerah Tunis Tengah, pada bulan Februari 1991. Salah satu penjaga RCD tewas dalam kebakaran. Rezim Ben Ali menangkap mereka, menyajikan bukti terbatas untuk keterlibatan dua puluh delapan orang yang kemudian ditangkap dan diadili dalam proses yang dianggap tidak adil oleh asosiasi HAM internasional. Lima tersangka pelaku utama menerima hukuman mati; para tahanan lainnya dijatuhi hukuman tiga puluh sembilan tahun penjara. Mantan anggota biro politik RCD mengakui bahwa insiden Bab Souika dieksploitasi untuk memenjarakan kaum Islamis dan untuk menerapkan solusi radikal, sehingga tidak ada lagi upaya dialog namun hanya penggunaan kekerasan (Wolf, 2017:73-74).

Dua bulan setelah insiden Bab Souika, para pejabat pemerintah mengklaim telah mengungkap makar yang lebih besar yaitu bahwa Ennahda sedang berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Abdallah Kallel, seorang menteri dalam negeri di bawah rezim Ben Ali pada masa itu, mengumumkan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai telah mempersiapkan rencana untuk menjatuhkan rezim. Ada 300 orang Islam, termasuk 100 orang dari militer, ditangkap di Barraket Essahel. Insiden penangkapan tersebut kemudian dikenal peristiwa Barraket Essahel. Bahkan lebih banyak orang yang ditangkap pada bulan-bulan berikutnya (Wolf, 2017:74-75).

2.2.4 Meningkatnya Minat Publik terhadap Islam

Setelah beberapa kali insiden perselisihan antara kelompok Islamis dan rezim Ben Ali, pemerintah merasa bahwa Ennahda telah kehabisan kekuatan untuk menentang rezim. Pemerintah mulai bersikap lunak secara bertahap dan melonggarkan beberapa kebijakan represif terhadap aktivis kelompok Islamis. Pada tahun 2000-an, banyak tokoh Ennahda dibebaskan dari tahanan. Para tokoh

Ennahda kemudian mencoba memulihkan kembali instisusi dan basis keanggotaan Ennahda. Struktur keorganisasian, misalnya seperti Biro Eksekutif Ennahda, secara diam-diam dan bertahap mulai dibangun kembali. Untuk memulihkan citranya, Ennahda membuat dua rumusan strategi. Pertama, meningkatkan hubungan antara gerakan Ennahda dengan masyarakat dan kedua, restrukturisasi internal gerakan Ennahda. Selain itu, Ennahda berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan aktor-aktor kunci di kancah internasional serta berupaya menggambarkan perjuangannya sebagai seruan untuk hak asasi manusia dan demokratisasi. Dalam batas tertentu upaya tersebut berhasil karena sejak pertengahan tahun 2000-an, semakin banyak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional mendokumentasikan penindasan Ben Ali terhadap pergerakan.

Dalam upaya rekonstruksi internal gerakan Ennahda, para pemimpinnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan internal. Ada 350 orang yang kemungkinan semua anggota gerakan bawah tanah Ennahda pada waktu itu, berpartisipasi dalam proyek. Selama diskusi kelompok, muncul dua tren utama. Di satu sisi, para pemimpin Ennahda ingin menghidupkan kembali kegiatan politik dan di sisi lain, menginginkan proyek sosial murni yakni memperbaiki situasi sosial dan ekonomi mereka, memberikan bantuan keuangan, dan menghidupkan kembali ide-ide Islamis di masyarakat. Namun, para pemimpin itu dengan keras mempertahankan pendekatan politik. Akar-akar rumput khususnya prihatin dengan situasi sosial ekonomi mereka, karena banyak keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada 2000-an, aktivis Ennahda di Sousse membentuk dana yang mendistribusikan sekitar 3.000 dinar Tunisia (sekitar \$ 1.500) per bulan kepada anggota yang membutuhkan. Namun, ini masih jauh dari cukup untuk mendukung orang miskin di kota (Wolf, 2017:118).

Pada tahun 2000-an, meningkatnya ketertarikan warga Tunisia untuk menjadi pribadi agamis begitu tampak jelas. Tren pemakaian jilbab di kalangan para wanita meningkat pesat. Pemakaian hijab tidak hanya di kalangan orang tua saja namun di kalangan remaja juga dan meluas mulai dari daerah pedesaan

hingga perkotaan. Fenomena yang sebelumnya tidak terduga, toko-toko yang menjual pakaian-pakaian *syar'i* semakin meluas dan ramai dibuka. Mohamed Kerrou dalam buku Anne Wolf *Political Islam in Tunisia – The History of Ennahda*, berpendapat bahwa fenomena meningkatnya pengguna hijab atau jilbab merupakan cara masyarakat mengekspresikan diri untuk melawan rezim (Wolf, 2017:108). Pemakaian hijab juga dinilai bentuk identitas diri sebagai perlawanan terhadap budaya asing yang sering menampilkan pakaian yang tidak senonoh. Rezim Ben Ali mengambil tindakan tegas mengenai tren penggunaan jilbab atau hijab dengan memberlakukan kembali regulasi era Bourguiba pada tahun 1981 yaitu peraturan nomor 108. Peraturan tersebut menjelaskan tentang larangan bagi pegawai negeri, siswa, dan guru mengenakan 'pakaian sektarian' di depan umum (Wikileaks, 2006).

Selain itu, ada banyak warga Tunisia juga tertarik untuk belajar di Universitas Zaytouna. Sekitar 1412 mahasiswa baru diterima di universitas tersebut pada periode 2010-2011 (sebelum adanya peristiwa pemberontakan atau revolusi martabat). Meskipun jumlah pendaftar di Zaytouna pada tahun 2000-an masih lebih rendah dibanding sebelum Ben Ali menindak kelompok Islamis, meningkatnya permintaan akan pendidikan agama jelas merupakan indikasi dari pencarian jati diri yang baru untuk nilai keagamaan. Banyak pejabat pemerintah terkejut karena melihat kembalinya identitas agama di Tunisia. Padahal saat itu orientasi negara sejak lima puluh tahun yang lalu ialah melarang poligami, memeluk sekularisme, dan mengembangkan industri anggur domestik (Wolf, 2017:108-109).

Ada beberapa faktor domestik dan internasional yang menyebabkan bangkitnya minat warga Tunisia terhadap nilai dan aspek religius. Secara domestik, popularitas Ben Ali menurun karena kecenderungan kebijakannya yang represif dan meningkatnya kesulitan ekonomi yang dialami warga Tunisia. Meskipun Bank Dunia pada masa rezim Ben Ali memuji pencapaian ekonominya, namun hal itu dinilai hanya menguntungkan Ben Ali dan para pendukungnya. Di sisi lain, tradisi lokal yang mulai hilang dan meningkatnya kecenderungan

konsumerisme membuat masyarakat kesal dengan rezim. Hal ini ditunjukkan secara simbolis pada tahun 2001 ketika supermarket Perancis Carrefour dibuka di Tunisia dan empat tahun kemudian diikuti oleh Géant. Dekade berikutnya, banyak didirikan bangunan dan pertokoan baru yang meniru gaya Barat. Perubahan pola perilaku sosial yang cenderung mengikuti gaya budaya barat mengakibatkan nilai hangatnya kebersamaan dalam masyarakat dan identitas jati diri masyarakat menjadi hilang. Selain itu, meskipun pada pemilihan presiden pada tahun 2009 Ben Ali mengklaim telah memperoleh 89,62% suara, banyak warga Tunisia yang marah dengan Ben Ali setelah adanya tindak kecurangan (Wolf, 2017:109)

Adanya peningkatan pengguna internet juga menjadi faktor penting dalam kebangkitan minat terhadap Islam. Pada tahun 2007, 17 persen warga Tunisia menggunakan internet dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Banyak warga Tunisia menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk mempelajari tentang Islam dan budaya Arab meskipun seringkali ditafsir dan diterima secara konservatif. Ben Ali tidak memiliki pilihan kecuali menyesuaikan kebijakan politiknya dengan kondisi masyarakat yang semakin tertarik pada aspek religius namun tetap melarang praktik dan simbol Islam yang berpotensi mengancam keamanan rezim (Wolf, 2017:110).

Secara internasional, peristiwa perang Irak pada tahun 2003 sangat berkontribusi pada meningkatnya ketertarikan terhadap ekspresi keagamaan. Banyak kalangan muslim khususnya dalam hal ini warga Tunisia mengutuk kebijakan Amerika Serikat yang dinilai merugikan masyarakat muslim di dunia internasional dan khususnya terhadap masyarakat muslim Arab di Irak. Bahkan sejak insiden serangan di New York pada tahun 2001 dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, memberikan pengaruh sangat signifikan yang menjadi alasan mereka mengenakan jilbab dan mengekspresikan identitas Muslimnya lebih jelas dan di depan umum (Haugbølle, 2015). Sehingga pada tahun 2006 dan 2007, gerakan Islam fundamentalis di Tunisia menjadi semakin besar dan lebih berani menunjukkan aksi jihadnya dengan melibatkan diri ke medan peperangan di luar negeri Tunisia.

Ada banyak masyarakat muslim Tunisia yang merasa ‘terpanggil’ untuk melakukan aksi jihad dan melibatkan diri ke dalam peperangan asing. Bahkan sejak tahun 1980-an, beberapa penganut Salafi di Tunisia yang ultra-Konservatif pergi meninggalkan Tunisia pada 1980-an untuk bergabung dengan Mujahidin di Afghanistan. Dalam negeri Tunisia pada pertengahan tahun 2000-an, banyak yang tertarik untuk bergabung dengan al-Qaeda dan perlawanan Irak. Pemuda yang asalnya dari kelompok kiri, komunis, *Ba'ath*, bahkan yang dibesarkan dari keluarga paling sekuler semakin mendukung ideologi ekstremis (Wolf, 2017:124). Sebuah rekaman dari gerilyawan Irak menginformasikan 24 warga Tunisia di antara 700 milisi asing telah memasuki negara Irak antara bulan Agustus 2006 dan Agustus 2007. Hampir setengah dari mereka ditugaskan misi bunuh diri. Ada sekitar 10 warga Tunisia tertangkap dan dipenjarakan di Guantanamo. Milisi lain yang tidak berhasil berangkat ke Irak, mereka memutuskan untuk melakukan jihad di tanah Tunisia (Wolf, 2017:124-125).

Pada tahun 2006, lima warga Tunisia dan satu orang Mauritania mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Kelompok Soliman (Wolf, 2017:125). Pada bulan Desember 2006 terjadi sebuah insiden, ketika sekelompok pria bersenjata ditangkap di kota Soliman, 30 km selatan Tunis. Media Tunisia milik negara pada awalnya menggambarkan kelompok itu sebagai 'penjahat', tetapi isu yang tersebar di kalangan wartawan dan warga Tunisia bahwa kelompok itu terdiri dari kaum Salafi yang tergabung dalam jaringan al-Qaeda. Selama persidangan para anggota kelompok itu pada tahun 2007 kemudian menjadi jelas, bahwa mereka adalah pejuang jihad yang pergi ke Irak. Tetapi kelompok tersebut juga bertujuan untuk memberontak melawan pemerintahan Tunisia (rezim Ben Ali) (Haugbølle, 2015).

Ennahda memanfaatkan peristiwa Soliman tersebut untuk memperkenalkan eksistensinya sebagai kelompok Islamis yang moderat dan berbeda dari kelompok ekstremis Salafi. Sebuah pernyataan deklarasi telah beredar setelah kongres kedelapan Ennahda pada bulan Mei 2007 yang menyatakan bahwa, 'para peserta [Kongres] mengatakan [Ennahda] memiliki peran kunci dalam memperkenalkan ideologi [dan implementasi] moderat sebagai perlawanan terhadap sikap ekstrem

dan tindak kekerasan' serta menekankan bahwa 'sikap politik yang tertutup akan berdampak negatif terhadap keseluruhan kualitas kehidupan sosial, ekonomi dan budaya' (Wolf, 2017:126).

Menanggapi fenomena terorisme di Tunisia, rezim Ben Ali menerapkan strategi ganda. Pertama berusaha untuk memonopoli Islam, sebab semakin banyaknya rakyat Tunisia yang tertarik terhadap aspek religius. Upaya rezim Ben Ali misalnya, pembuatan Radio Zaytouna 2007. Radio Zaytouna dimanfaatkan oleh rezim Ben Ali untuk menjelaskan bahwa ide-ide ekstremis merupakan ancaman terhadap kehidupan masyarakat dunia dan juga mempropagandakan ide-ide pasifis serta tradisi keagamaan Tunisia. Pada tahun 2007 juga, pengadilan administratif membatalkan surat edaran nomor 102 (yang dikeluarkan pada tahun 1986) mengenai regulasi pelarangan pemakaian jilbab di lembaga-lembaga publik, terutama di sekolah-sekolah dan universitas (Wolf, 2017:126-127).

Strategi Ben Ali yang kedua, mengintensifkan tindakan keras terhadap para jihadis. Teman atau anggota keluarga dari tersangka secara khusus dianggap bersalah juga oleh asosiasi. Penindasan ini mencapai puncaknya pada tahun 2008, antara 1.000 dan 2.000 warga Tunisia telah dipenjarakan di bawah undang-undang terorisme tahun 2003. Mayoritas dari mereka tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Penindasan rezim tersebut terjadi saat ketegangan sosial dan ekonomi meningkat. Saat masa genting tersebut, terjadi peningkatan arus informasi dari media luar negeri seperti TV satelit Arab, Al-Jazeera, Al-Arabiyya, dan TV Abu Dhabi. Informasi dari media luar negeri bertentangan dengan retorika resmi negara, kemudian ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang semakin termarginalkan khususnya di provinsi pedalaman, memicu protes masyarakat yang mengarahkan ke peristiwa revolusi *Arab Spring* (Wolf, 2017:127).

2.2.5 Pemberontakan Rakyat Tunisia: *Tsauratu al Karama* (Revolusi Martabat); Awal dari *Arab Spring*

Kebijakan represif dan prospek ekonomi yang terpuruk membuat rakyat kecewa terhadap rezim Ben Ali. Puncaknya pada tanggal 17 Desember 2010 di daerah Sidi Bouzid, seorang pedagang kaki lima yang bernama Tarek al-Tayeb Mohammed Bouazizi, membakar dirinya setelah seorang polisi wanita menyita keranjang sayurnya. Peristiwa ini kemudian memicu kemunculan protes besar-besaran dari warga Tunisia terhadap pemerintahannya pada tahun 2010 yang menjadi titik awal fenomena “*Arab Spring*”. Satu hari pasca insiden tersebut, protes massa dengan cepat menyebar ke seluruh negeri hingga mengakibatkan pemberontakan rakyat Tunisia yang dinamakan *Tsaurat al Karama* (Revolusi Martabat) (Ayari, 2015). Perdana menteri, Mohammed Ghannouchi, membentuk pemerintahan baru dan mengumumkan pemilihan parlemen awal. Namun, permintaan yang terus menerus untuk 'revolusi penuh' membuatnya mengundurkan diri pada 27 Februari. Selanjutnya, Beji Caid Essebsi (seorang menteri luar negeri di bawah Bourguiba dan juru bicara parlemen di bawah Ben Ali) ditunjuk sebagai perdana menteri sementara. Beji Caid Essebsi membubarkan RCD (*Rassemblement Constitutionnel Démocratique*) dan mengumumkan pemilihan untuk Majelis Konstituante akhir tahun itu untuk menulis ulang konstitusi Tunisia. Essebsi juga membebaskan semua tahanan politik dan mengesahkan sejumlah partai, termasuk Ennahda. Protes dan pemberontakan warga Tunisia tersebut pada akhirnya berhasil membuat Zine El Abidine Ben Ali pada 14 Januari 2011 melarikan diri menuju Arab Saudi (Wolf, 2017:129).

Pada tanggal 30 Januari 2011, Rachid Ghannouchi beserta para pemimpin Ennahda lainnya, kembali ke Tunis dan disambut kerumunan sekitar 10.000 pendukung (BBC, 2011). Para anggota Ennahda kemudian berusaha untuk membangun kembali struktur organisasi mereka di seluruh negeri sebelum pemilihan Majelis Konstituante berlangsung. Pada pertengahan bulan Maret, tepat setelah Ennahda menerima lisensi partai (diterima sebagai partai politik yang sah), anggota senior Ennahda Abdelhamid Jlassi mengklaim bahwa dalam periode

kurang dari enam minggu mereka mendirikan 2.064 kantor Ennahda, termasuk dua puluh empat biro yang mewakili berbagai gubernur. Kantor yang baru didirikan menjadi titik pertemuan bagi mantan tahanan politik dan keluarga mereka. Para aktivis mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan Ennahda untuk Tunisia pasca runtuhnya rezim Ben Ali (Wolf, 2017:132).

Pasca pemberontakan terhadap rezim Ben Ali, Ennahda memilih untuk tidak menerapkan strategi politik 'balas dendam' terhadap para mantan pejabat pemerintahan Ben Ali dan musuh politiknya dari RCD. Menjelang pemilihan majelis konstituante pada tanggal 23 Oktober 2011, partai-partai politik di Tunisia melakukan kampanye termasuk Ennahda. Beberapa partai sekuler misalnya PDP (*Progressive Democratic Party; al-Hizb al Dimuqrati al Taqaddumi*), melakukan kampanye dengan menggunakan retorika anti-Islam yang mengklaim bahwa Ennahda akan membawa Tunisia kembali ke zaman abad pertengahan. Terlebih lagi, partai-partai berhaluan sekuler merasa yakin bahwa mereka memiliki cukup pendukung untuk memenangkannya sehingga mereka tidak membentuk koalisi. Oleh karena itu, kekuatan partai-partai sekuler menjadi lemah.

Sebaliknya, Ennahda melakukan kampanye yang cerdas dengan beradaptasi terhadap karakteristik dan demografi lokal tertentu. Misalnya, Ennahda berkampanye di kota Hammam-Lif dengan menampilkan konser musik serta pidato dari seorang akademisi perempuan, yang menekankan peran perempuan dalam pemberontakan. Bahkan Ennahda membujuk seorang aktivis yang tidak berhijab dan mantan anggota UGTE (*Union Générale Tunisienne des Étudiants*)¹⁰, Souad Abderrahim, untuk mencalonkan diri dalam 2 daftar pemilihan Tunis agar meyakinkan kembali para pemilih yang kurang religius serta konservatif, dan mitra Barat atas kesediaan mereka untuk menggabungkan 'Islam dengan modernitas'. Sebaliknya, dalam lingkungan yang kurang sosial seperti di

¹⁰ Persatuan Umum Mahasiswa Tunisia (*Union Générale Tunisienne des Étudiants/ UGTE*) merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa pada tahun 1985 untuk membela kepentingan mahasiswa. Organisasi ini memiliki kecenderungan untuk memihak kepada MTI. Sehingga pada tahun 1991, rezim Ben Ali melarang pergerakan organisasi tersebut karena hubungannya dengan MTI (Encyclopedia.com, tanpa tahun).

kota selatan Hajeb El Ayoun, Ennahda berkampanye dengan menyoroti masalah kesehatan setempat. Strategi pemilihan yang rumit seperti itu, dikombinasikan dengan pengaruh kelembagaan dan organisasional Ennahda, memberi partai tersebut keuntungan yang sangat besar dibanding kubu sekuler yang strukturnya terbatas pada wilayah pesisir dan ibukota (Wolf, 2017:133).

Tabel 2.1 Hasil pemilihan Majelis Konstituante Nasional (NCA) di Tunisia.

Distribution of Seats in Tunisia's National Constituent Assembly ⁷			
Party / List	Percentage of Vote	Number of Seats	Percentage of Seats
Ennahda	37.04%	89	41.01%
Congress for the Republic (CPR)	8.71%	29	13.36%
Popular Petition (Aridha Chaabia)	6.74%	26	11.98%
Ettakatol (FDTL)	7.03%	20	9.22%
Democratic Progressive Party (PDP)	3.94%	16	7.37%
The Initiative (Al-Moubadara)	3.19%	5	2.31%
Democratic Modernist Pole (PDM/Al-Qutb)	2.79%	5	2.31%
Afek Tounes	1.89%	4	1.84%
Tunisian Workers' Communist Party (Al-Badil al-Thawri)	1.57%	3	1.38%
Other	27.10%	20	9.22%
Total	100%	217	100%

(Sumber: NDI, 2011).

Tabel di atas menunjukkan hasil pemilihan Majelis Konstituante Nasional (NCA) pada tanggal 23 Oktober 2011, bahwa Ennahda berhasil memperoleh 37,04% suara (89 kursi dari 217 kursi). Partai lainnya berada di bawah Ennahda yaitu CPR (*Congrès pour la République*) memperoleh 8,71% suara (29 kursi dari 217 kursi); *Popular Petition (Aridha Chaabia)* 6,74% suara (26 dari 217 kursi); Dan *at-Takattul ad-Dīmuqrāfī min ajl il-'Amal wal-Hurriyyāt* (Ettakol; FDTL / *Forum démocratique pour le travail et les libertés*) 7,03% suara (20 dari 217 kursi). Namun, Ennahda gagal mencapai suara mayoritas absolut disebabkan oleh perpecahan di dalam internal partai Islamis sendiri (Wolf, 2017:133-134).

Pecahnya kekuatan-kekuatan partai sekuler membuat Ennahda menjadi partai yang paling mendominasi di dalam parlemen. Hanya CPR dan Ettakol yang setuju untuk bergabung dengannya dalam pemerintahan koalisi, yang kemudian dikenal sebagai Troika (Wolf, 2017:134). Selanjutnya, koalisi pemerintah Troika setuju untuk bekerja sama dalam parlemen dan berbagi tiga posisi tertinggi dalam negara. Karenanya, Ennahda mendukung pemilihan sekretaris jenderal Ettakatol, Mustapha Ben Jaafar sebagai ketua parlemen dan pemimpin CPR, Moncef Marzouki, sebagai presiden sementara. Sebagai gantinya, Troika langsung menunjuk sekretaris jenderal partai Ennahda, Hamadi Jebali, sebagai perdana menteri. Pemerintah diberi mandat satu tahun untuk membuat undang-undang dasar dan undang-undang pemilihan yang baru (Ayari, 2015).

2.2.6 Peranan Ennahda dalam Menyusun Konstitusi

Pasca pemberontakan, kelompok Islamis menghadapi tantangan untuk menemukan jati diri dari masyarakat Tunisia. Banyak dari ideologi kelompok Islamis dibangun atas dasar perjuangan melawan rezim Habib Bourguiba dan Ben Ali. Namun, para aktivis Ennahda tidak bisa menyepakati isu-isu mendasar seperti peran hukum Islam dalam masyarakat. Sebelum pemilihan, kepemimpinan Ennahda telah berjanji untuk tidak memasukkan rujukan syariah dalam konstitusi. Tetapi sayap dogmatis dari partai Ennahda mengecam sikap tersebut. Selain itu, di dalam Majelis Konstituante, perwakilan dari *Popular Petition (Aridha Chaabia)* secara terbuka meminta rujukan hukum Islam dimasukkan ke dalam konstitusi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum syariat Islam menjadi salah satu topik yang paling diperdebatkan di parlemen (Wolf, 2017:138-139).

Banyak dari warga Tunisia mendukung peningkatan peran agama dalam politik. Sebuah polling yang dilakukan pada akhir 2011 menemukan bahwa 56% warga Tunisia percaya bahwa syariah harus dijadikan hukum resmi. Namun, hanya sebagian kecil (42%) berpikir bahwa pengadilan agama harus mengawasi hukum keluarga dan properti. Di antara warga Tunisia yang meyakini bahwa *syariah* harus dijadikan hukum resmi, 44% juga menyukai hukuman seperti memotong tangan para pencuri. Meskipun ini adalah angka yang tinggi, itu jauh

lebih sedikit daripada, misalnya, Mesir (81%) atau Yordania (76%). Adanya suara dukungan terhadap syariat Islam yang begitu besar mencerminkan kegundahan mayoritas masyarakat Tunisia terhadap corak pemerintahan sekularisme sejak pasca kemerdekaan (Wolf, 2017:139).

Tetapi pada tanggal 26 Maret 2012, Ennahda membuat keputusan bahwa *syariah* tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebab, hasil dari negosiasi di dalam parlemen menetapkan bahwa sistem parlemen yang diterapkan adalah sistem parlementer campuran¹¹. Sebagai hasil dari kesediaan Ennahda untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem, konstitusi baru memperjuangkan mekanisme demokrasi, peraturan hukum, dan berbagai hak-hak agama, sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan (Ghannouchi, 2016). Keputusan tersebut mendapat kecaman keras dari sayap partai yang lebih dogmatis dan doktrinal. Ribuan orang turun ke jalan untuk menanggapi pengumuman tersebut. Selain itu, diperkirakan 10 persen dari cabang pemuda Ennahda kemudian meninggalkan partai, menuduh kepemimpinan mengkhianati prinsip-prinsip Islam. Beberapa dari aktivis muda ini kemudian bergabung dengan kelompok Islam fundamentalis, yakni Salafi (Wolf, 2017:139-140).

Keputusan Ennahda tersebut tidak bisa diartikan sebagai menghindari agenda Islamis secara total. Sebuah konstitusi yang ditetapkan pada bulan Januari 2014, memberikan kemungkinan bagi partai politik untuk mengislamisasi masyarakat secara diam-diam. Pasal 6 mendefinisikan peran negara dalam agama dalam istilah yang tidak jelas dan kontradiktif. Di satu sisi, 'Negara ... menjamin kebebasan hati nurani dan kepercayaan, pelaksanaan ibadah keagamaan yang bebas dan netralitas masjid dan tempat-tempat ibadah.' Di sisi lain, negara 'berkomitmen untuk ... perlindungan bagi yang sakral dan larangan untuk pelanggaran apa pun terhadapnya'. Sebagai hasil dari kompromi politik yang luas, ketentuan yang tidak jelas ini dapat digunakan untuk menumbuhkan ketaatan hukum Islam yang lebih ketat, misalnya melalui pengadilan penistaan agama dan pembatasan hak-hak perempuan (Wolf, 2017:140).

¹¹ Ennahda pada awalnya menyerukan sistem parlementer secara eksklusif (Ghannouchi, 2016).

Pembahasan kajian mengenai peran gender menjadi sangat panas ketika Majelis Konstituante menerbitkan rancangan konstitusi pertama pada musim panas tahun 2012. Pasal 28 memicu kegemparan di antara banyak wanita sekuler, yang mengecamnya sebagai merendahkan kaum wanita menjadi 'pelengkap' (*complement*) atau 'rekan' pria. Rancangan pasal 28 berbunyi:

تضمن الدولة حماية حقوق المرأة و دعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا مع الرجل في بناء الوطن و يتكامل دورهما داخل الأسرة. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

(Negara harus menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan mendukung prestasinya sebagai mitra sejati bagi laki-laki dalam pembangunan bangsa dan memiliki peran yang saling melengkapi di dalam keluarga. Negara harus menjamin tersedianya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab. Negara harus menjamin penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan) (Zarrugh, 2014).

Kata *yatakamalu* (يتكامل) di sini diterjemahkan sebagai 'pelengkap, terpenuhi, atau saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan'. Penggunaan istilah *yatakamalu* dinilai sebagai kontradiksi dengan pasal lainnya dari rancangan konstitusi yang menekankan kesetaraan gender. Istilah 'kesetaraan' (Perancis: '*égaux*' dan '*égalité*'; Bahasa Arab: '*al-masawa* (المساوى)') digunakan dalam berbagai konteks dalam rancangan konstitusi termasuk dalam preambuli konstitusi. Pasal 1.6 membahas hak yang sama (*equal*) di antara warga negara; Pasal 2.21 membahas tentang hak-hak keluarga dan secara eksplisit menyatakan 'kesetaraan (*equality*) antara pasangan'; Pasal 2.22 menyatakan kesetaraan (*equality*) antara warga negara; Dan Pasal 2.30 memastikan 'kesetaraan (*equality*) antara orang-orang dengan kebutuhan khusus dan warga negara lain'. Tidak adanya istilah 'kesetaraan' dari pasal 28 yang secara langsung membahas hak-hak perempuan menjadi sebuah kritik dari beberapa kelompok perempuan terhadap pemerintah dan meminta kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut (Zarrugh, 2014).

Hak-hak perempuan menjadi semakin intens diperdebatkan beberapa bulan kemudian, ketika diskusi tentang *Personal Status Code* Tunisia. Meskipun para

pemimpin Ennahda telah berjanji pada masa sebelum pemilihan, untuk tidak memasukkan *syariah* ke dalam konstitusi. Beberapa pengikut Ennahda mengklaim bahwa beberapa prinsip *Personal Status Code* bertentangan dengan *syariah*. Setelah beberapa kali musyawarah, pimpinan Ennahda meyakinkan para anggotanya yang lebih dogmatis untuk menerima perundang-undangan pada prinsipnya. Dalam sebuah wawancara, Rachid Ghannouchi mengatakan:

“Women’s rights ‘are nowadays part of Tunisian identity. So Tunisia’s Islamists try to adapt Islam to [this] reality” (Hak-hak perempuan ‘saat ini menjadi bagian dari identitas Tunisia. Jadi para Islamis Tunisia mencoba menyesuaikan Islam dengan kenyataan [ini]). (Wolf, 2017:141).

Peranan Ennahda dalam menyusun konstitusi Tunisia terus berlanjut hingga masa-masa akhir bagi koalisi pemerintahan Troika. Sebelum menyerahkan kekuasaan pada bulan Januari 2014 akibat tekanan dari berbagai pihak, Ennahda berhasil memasukkan gagasan Islam ke dalam konstitusi. Pasal 1 dalam undang-undang, yang pada 27 Januari 2014, telah menetapkan Islam sebagai agama resmi Tunisia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi segala sesuatu yang dinilai sakral (Ayari, 2015). Preambul konstitusi tersebut merefleksikan identitas muslim Arab Tunisia. Selain itu, adanya kalimat ‘negara sebagai pelindung segala sesuatu yang dianggap sakral’ dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah penistaan terhadap agama. Terlepas dari peranan tersebut, Ennahda hanya menduduki kekuasaan di Tunisia tidak lebih dari tiga tahun. Pada bab selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan insiden pembunuhan dua politisi dari kelompok oposisi yang pada akhirnya memaksa pemerintahan Troika untuk menyerahkan kekuasaannya.

BAB 3.

DINAMIKA POLITIK PARTAI ENNAHDA DI TUNISIA

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pemberontakan rakyat Tunisia yang disebut dengan *Tsauratu al Karama* (Revolusi Martabat). Peristiwa itu memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap perkembangan bagi Ennahda di mana dengan manuver politiknya mampu mendulang suara terbanyak di dalam pemilihan Majelis Konstituante pada tanggal 23 Oktober 2011. Ennahda berhasil menjadi partai yang paling mendominasi di dalam parlemen. Dua partai yang berhasil mendapat suara terbesar di bawah Ennahda, yaitu CPR dan Ettakol setuju untuk bergabung dengannya dalam pemerintahan koalisi, yang kemudian dikenal sebagai Troika.

Koalisi pemerintahan Troika mendapat mandat untuk menyusun konstitusi Tunisia dan undang-undang pemilihan yang baru. Dalam proses perancangan undang-undang tersebut, ada banyak kalangan masyarakat maupun perwakilan dari parlemen yang meminta untuk menjadikan *syariah* sebagai hukum resmi negara. Namun, Ennahda menetapkan keputusan pada tanggal 26 Maret 2012 bahwa *syariah* tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi. Keputusan tersebut membuat kelompok Islam Fundamentalisis, Salafi, mengecam Ennahda beserta koalisinya sebagai kelompok Islam yang tidak taat pada ajaran agama (Wolf, 2017:139-144).

3.1 Kebangkitan Gerakan Salafisme di Tunisia

Pasca pemberontakan rakyat Tunisia atau '*Tsaurat al Karama*', perdana menteri sementara Beji Caid Essebsi membebaskan semua tahanan politik, termasuk tahanan ultra-konservatif dan beberapa kelompok Soliman. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung munculnya banyak aktor politik dan sosial yang baru. Namun, munculnya aktor salafi menawarkan interpretasi Islam konservatif yang jauh lebih radikal dalam kehidupan sosial dan politik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pembahasan kebangkitan gerakan Salafisme di

Tunisia, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa poin penting mengenai Salafisme di Tunisia. Penjelasan terkait Salafisme ini diperlukan untuk memahami ragam pola gerakan Salafisme, khususnya dalam konteks di wilayah Tunisia.

3.1.1 Salafisme

Definisi salafisme sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan. Namun ada sebuah interpretasi klasik mengenai pembahasan salafisme pada era kemunculan reformisme Islam di abad ke-19. Jika mengacu kepada istilah asalnya yaitu bahasa Arab, salafisme merupakan turunan kata dari *salaf* atau *salafiyyun* yang memiliki arti leluhur. Dalam konteks Islam, *salafiyyun* mengacu pada tiga generasi muslim pertama yang dinilai sebagai para penganut Islam yang paling taat dan beriman. Istilah *Salafiyyah* yaitu ajakan untuk kembali kepada keaslian Islam yang ada saat awal kemunculannya, dengan cara memurnikan agama dari segala elemen luar yang mencampuri esensinya. Adapun penggunaan kata salafisme sebenarnya sebuah istilah yang kemunculannya relatif baru setelah banyaknya fenomena terkait aktivitas kelompok salaf. Namun penyebutan salafisme dalam kaitannya dengan keorganisasian memiliki makna yang spesifik (Torelli *et.al.*, 2012).

Menurut Wiktorowicz, ada tiga bentuk salafisme: Puris, politik, dan jihadis. Salafi puris memiliki fokus utama pada penjagaan kemurnian Islam sesuai dengan ketentuan al Quran dan *as Sunnah* serta ketentuan *ijma'* (konsensus) dari sahabat rasulullah saw. Untuk aktivisme politik, kaum puritan lebih menyukai aksi dakwah dan *tarbiyyah* (edukasi keagamaan). Sebab asumsi kaum puritan ialah proses Islamisasi seharusnya dari bawah (*bottom up*) dan tidak mengganggu proses operasional institusional negara. Aksi politik dinilai kerap mengundang kekerasan atau kebijakan represif, sehingga cara demikian bisa mengancam eksistensi negara. Dalam perspektif ini, gerakan politik Salafi jihadis mendapat kritik karena aksi-aksinya *counterproductive* dan akan menyebabkan aktivisme Islam yang represif. Strategi salafisme puris ini merupakan cara isolasionisme atau mundur dari institusi sosial dan politik. Pendekatan politik ini terinspirasi dengan khotbah Rasulullah saw pada periode Mekah ketika kondisi lingkungan

yang memusuhi Nabi saw, mendorong beliau untuk melakukan aksi komunikasi sosial dan politik secara horizontal daripada melakukan aksi politik (Torelli *et.al.*, 2012).

Sebaliknya, pilihan aktivisme politik hanyalah salah satu opsi yang dilakukan karena frustrasi terhadap kelompok salafisme puritan yang tetap berpendirian teguh berada di luar arena politik. Oleh karena itu, salafisme politik bertindak secara langsung memberikan pengaruhnya ke dalam sistem politik. Strategi ini didorong oleh keperluan penanganan masalah secara cepat, dan salafisme politik menyangsikan sikap puritan yang cenderung apatis dan isolasionis terhadap realitas yang ada, serta menilai kelompok puritan menjadikan Islam tidak relevan lagi bagi umat muslim (Torelli *et.al.*, 2012). Sejak 1980-an, gerakan Salafi perlahan mulai berkembang di Tunisia. Alison Pargeter mendeskripsikan salafisme kontemporer ini sebagai 'ultra-konservatif, introspektif, dan tampaknya merupakan suatu bentuk pelarian yang sebelumnya menutup dirinya sendiri di masa lalu dalam penekanan pusat perhatian pada pembahasan apa yang halal dan apa yang haram' (Wolf, 2017:122). Dalam artian, salafisme kontemporer tidak hanya sekadar pembahasan mengenai dakwah, ahlak dan syariat Islam. Namun, salafisme kontemporer telah berkembang serta berupaya untuk menegakkan syariat Islam di ranah sosial, budaya dan bahkan negara, sebagai hasil interpretasinya dari ajaran agama yang diyakininya.

Berikutnya, salafisme Jihadis adalah suatu bentuk perlawanan keras terhadap “pemerintahan yang zalim”, dan memiliki agenda untuk mendirikan negara Islam (*Islamic state*). Berbeda dengan salafisme politik, yang pembentukannya berdasarkan teks klasik salafisme di universitas Islam. Jihadis menerima ajaran politik dan pelatihan mengenai aksi di medan perang. Misalnya, sekelompok *mujahidin* bersenjata di Afghanistan melawan invasi Uni Soviet pada tahun 1980-an (Torelli *et.al.*, 2012).

Kategorisasi di atas sangat membantu dalam kasus Tunisia, sebab ada perbedaan di antara berbagai kelompok salafi yang aktif di Tunisia. Hal yang

menarik adalah hubungan kelompok-kelompok tersebut dengan institusi demokrasi yang baru lahir serta aktor sosial-politik lainnya yang telah membangun Tunisia secara asas demokrasi, seperti Ennahda. Memahami hubungan seperti yang telah dijelaskan tadi menjadi penting karena tiga alasan. Pertama, sektor salafisme secara bertahap masih bisa dimasukkan ke dalam mekanisme demokrasi dan legitimasi institusional negara melalui proses moderasi yang serupa dengan Ennahda. Apabila pemerintah Tunisia berhasil merangkul kelompok salafi yang sebelumnya anti terhadap proses politik, maka hasilnya akan memperkuat proses demokrasi karena berhasil menciptakan kondisi 'siapa pun bebas menyalurkan ekspresi atau aspirasinya ke dalam proses pemerintahan'. Kedua, kelompok salafi yang anti pemerintah semakin menjadi kuat disebabkan oleh kemandekan pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum yang tidak adil, kesenjangan mendalam antara sistem politik yang ada dengan masyarakat, dan ketidakmampuan negara dalam mengatasi tuntutan sosial-ekonomi. Masalah-masalah tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan yang begitu kuat terhadap sistem demokrasi. Dengan adanya ketersediaan serta keterbukaan untuk menyalurkan aspirasi publik, kelompok Islamis dapat memberi suaranya dan mempertanyakan laju proses reformasi kepada institusi negara yang legal, yakni Ennahda. Dengan begitu, gerakan-gerakan radikalisme dan ekstremisme dapat dikurangi. Ketiga, strategi inklusif terhadap setiap aktor politik, khususnya kelompok Salafi, selain mengurangi gerakan radikalisme dan ekstremisme juga penting untuk menurunkan tensi politik dari kubu sekularis yang anti Islam di Tunisia. Sedangkan strategi eksklusif serta apatis hanya akan menguntungkan gerakan kelompok Islamis garis keras yang memang memiliki kapabilitas untuk merekrut anggota baru (Torelli *et.al.*, 2012).

3.1.2 Gerakan dan Institusi Salafi di Tunisia

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai peningkatan minat masyarakat Tunisia terhadap Islam dan upaya mereka untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sosialnya. Pria yang memakai janggut panjang dan gamis putih serta wanita yang memakai *niqab* atau hijab semakin meningkat. Padahal

era rezim Bourguiba dan Ben Ali telah menerapkan sistem yang berorientasi pembangunan ala Barat serta kebijakannya yang konfrontatif terhadap kelompok Islamis. Khususnya pada era rezim Ben Ali, pemerintah telah menindak keras gerakan ekstremis yang dilakoni oleh kelompok salafi pada peristiwa Soliman tahun 2007. Atas kemunculan fenomena baru tersebut, ada banyak pihak yang menuduh Ennahda telah melakukan proyek Islamisasi dalam negeri Tunisia.

Namun pasca pemberontakan, pemerintah sementara yang dipimpin oleh Essebsi mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan semua tahanan politik, termasuk tahanan ultra-konservatif dan beberapa kelompok Soliman. Di antara para tahanan tersebut, ada jihadis yang nantinya akan menjadi tokoh penting dalam peristiwa yang membuat koalisi pemerintahan Troika mengalami kemunduran. Tokoh tersebut bernama Seifallah Ben Hassine alias Abou Iyadh al-Tunisi. Setelah keluar dari penjara, Abou Iyadh mendirikan *Ansar al-Shari'a* pada bulan April 2011. Setahun setelah didirikan, gerakan ini berkembang pesat, seperti yang ditunjukkan dengan adanya demonstrasi massa di Qayrawan untuk merayakan ulang tahun pertamanya, yang dihadiri oleh ribuan orang. Organisasi tersebut dengan cepat berubah menjadi gerakan Salafi terbesar di Tunisia (Wolf, 2017:144).

Abu Ayyad al-Tunisi adalah seorang jihadis yang pernah berjuang di pertempuran Tora Bora dan pada tahun 2003 dideportasi ke Tunisia atas tuntutan terorisme internasional (Torelli *et.al.*, 2012). Meskipun profil kepemimpinannya menunjukkan bahwa Ansar al-Sharia adalah gerakan revolusioner atau jihad, kekerasan bersenjata pada awal pasca Ben Ali belum terjadi. Gerakan ini lebih memilih untuk melakukan aksi sosial berupa kegiatan amal dan dakwah. Pilihan ini pada masa itu merupakan opsi yang pragmatis sekaligus ideologis untuk membangun basis pendukung gerakan tersebut. Para anggota gerakan tersebut menyediakan makanan dan pakaian untuk orang miskin dan memberikan layanan pendidikan dan keamanan di lingkungan yang miskin, seperti di pinggiran Ettadhamen di Tunis barat. Hasilnya, basis keanggotaan Ansar al-Shari'a meluas dan struktur keorganisasiannya dengan cepat mencakup ke seluruh penjuru negeri.

Dalam aktivitasnya, anggota Ansar al-Sharia secara perlahan mulai menanamkan propaganda bahwa agenda gerakan tersebut adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang telah gagal diwujudkan oleh koalisi pemerintahan Troika. Banyak pengikut Ansar al-Sharia mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tersebut, termasuk aktivitas terkait aksi kekerasan. Agenda akhir dari kelompok ini adalah bergabung dengan aktivis jihad di luar negeri internasional dan ikut berjuang bersamanya. Abu Ayyad sendiri yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari Ansar al-Sharia adalah berjihad di luar negeri dan Tunisia hanya menjadi “tanah ibadah”. Ada beberapa kali pemimpin Ansar al-Sharia memuji dan membenarkan tindakan jihadis global di luar negeri. Melalui beberapa siaran pers yang dikeluarkan oleh blog Yayasan Media al-Qayrawan, Abu Ayyad memuji Osama bin Laden pada saat kematiannya, memanggilnya seorang *syahid* dan menyebut mantan kepala al-Qaeda sebagai “pemimpin kita” (Torelli *et.al.*, 2012). Pemerintah Troika merespon aksi Ansar al-Sharia yang memuji sosok jihadis Osama Bin Laden dalam situs internetnya dengan memblokir website resmi gerakan tersebut (Wolf, 2017:144).

Memang pada dasarnya, Ansar al-Sharia merupakan salah satu kelompok Islamis yang secara terbuka menentang prinsip demokrasi di dalam Tunisia. Sebab secara ideologis, demokrasi dinilai sebagai suatu ‘ajaran’ asing dan jauh dari kehidupan Islam. Sehingga, Ansar al-Sharia fokus pada upaya dakwah sebagai sarana kontrol atas kondisi sosial-budaya masyarakat dan menanamkan pemikiran *shirathal mustaqim* (jalan yang lurus) dalam penafsiran yang ketat dari sumber ajaran Islam. Adapun agenda kelompok tersebut: Pertama, kelompok tersebut berusaha merebut masjid dan mengusir para imam yang dituduh pendukung setia kepada rezim. Kedua, melakukan upaya advokasi dan lobi kepada pemerintah untuk mengintervensi atas nama Ansar al-Sharia mengenai permasalahan para tahanan Tunisia di penjara Irak. Dalam tahap lebih lanjut, kelompok tersebut mengorganisir aksi-aksi bela simbol agama, dengan tujuan membuat tindakan penistaan menjadi pelanggaran pidana, memperkenalkan pemisahan gender di ruang publik dan mendorong kegiatan amal sosial (Torelli *et.al.*, 2012).

Dalam upaya untuk menahan laju penyebaran pengaruh politik aktivisme Islam garis keras, pemerintahan Troika mencoba merangkul kelompok Salafi yang masih dinilai mengedepankan toleransi. Para elit Ennahda menyatakan bahwa partai tersebut tidak ingin mengulang kebijakan represif yang diterapkan pada masa rezim Ben Ali. Sehingga Ennahda mengedepankan strategi inklusif agar setiap aktor sosial dan politik bebas menyalurkan aspirasinya melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Ennahda berusaha membujuk kelompok Salafi 'moderat' untuk mewujudkan agenda mereka melalui prosedur hukum, seperti membuat partai. Pada tanggal 29 Maret 2012, pemerintahan Troika memberi lisensi atas Partai Front Reformasi Salafi (*Hizbu Jabhat al-Islah*) (Wolf, 2017:145). Waktu pengesahan tersebut dekat dengan tanggal keputusan Ennahda untuk tidak memasukkan *syariah* ke dalam konstitusi di mana keputusan tersebut mengasingkan banyak dari kelompok Salafi. Partai Front Reformasi Salafi (*Hizbu Jabhat al-Islah*) dipimpin oleh Mohammed Khouja, salah seorang pendiri TIF (Front Islam Tunisia, *Tunisian Islamic Front*) pada 1980-an, namun mengklaim akan meninggalkan semua aktivitas kekerasan dan ingin berpartisipasi dalam politik demokratis. Meskipun komitmennya untuk meninggalkan segala aktivitas kekerasan, Khouja sebagai aktor politik, ingin memanfaatkan mekanisme sistem demokrasi untuk memajukan *syariah* dalam masyarakat. Khouja menegaskan bahwa tugas seorang politisi adalah membedakan antara hal-hal yang haram dan halal (Wolf, 2017:145-146).

Salah satu tujuan utama Khouja adalah merangkul para salafi muda dan mencegah mereka bergabung dengan kelompok Islam garis keras. Namun, langkah Khouja mendapat kecaman keras dari kelompok ultra-konservatif atau dari Salafi garis keras, dengan menyatakan bahwa partai Khouja tidak lain hanyalah alat Ennahda dan mereka tidak percaya pada politik (Wolf, 2017:146). Kelompok ultra-konservatif menolak adanya institusionalisme Salafi dan lebih suka melakukan aktivisme secara *bottom-up*. Dalam artian, kelompok Salafi garis keras menentang proses Islamisasi masyarakat secara bertahap melalui proses

politik dan lebih memilih opsi gerakan sosial melalui aktivitas dakwah serta amal.

Pada tanggal 12 Juli 2012, pemerintahan Troika mengesahkan *Hizbu al-Tahrir*. Bila Partai Front Reformasi Salafi (*Hizbu Jabhat al-Islah*) menginginkan menjadi partai massa, maka *Hizbu al-Tahrir* bertujuan untuk membentuk elit ultra-konservatif yang sepenuhnya didedikasikan untuk menciptakan kekhalifahan. Meskipun pada awalnya, *Hizbu al-Tahrir* menerima sistem multipartai sebagai cara untuk memajukan agenda Isamisasi masyarakat secara menyeluruh, namun kelompok ini ingin mendirikan kekhalifahan melalui revolusi Islam atau kudeta. Berita mengenai disahkannya partai *Hizbu al-Tahrir* segera mencapai ke penjuru negeri. Walaupun berita banyak meliput tentang partai tersebut, basis dukungan *Hizbu al-Tahrir* tetap terbatas, dengan aksi unjuk rasa umumnya menarik paling banyak beberapa ratus orang. Sebab, sebagian besar dari kelompok ultra-konservatif jauh lebih tertarik untuk bergabung dengan gerakan salafi populer seperti Ansar al-Shari'a dan mereka menolak 'elitisme' *Hizb al-Tahrir* dan Partai Front Reformasi (Wolf, 2017:146-147).

Strategi Ennahda untuk mengisolasi gerakan ekstremis menjadikan hubungannya timpang dengan kelompok Salafi garis keras. Apalagi Ennahda pada tanggal 26 Maret 2012 membuat keputusan bahwa *syariah* tidak akan dimasukkan ke dalam konstitusi, memperjelas posisi jarak ideologis antara partai tersebut dengan kelompok Salafi jihadis. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan di *Le Monde*, seorang elit Ennahda Ali Larayedh, mendeskripsikan Salafi jihadis sebagai bahaya terbesar bagi Tunisia dan perlu dibasmi (Lusardi, 2017). Abu Iyadh menanggapi sikap Ennahda dengan pernyataannya bahwa pemerintahan sedang menjalankan pemerintahan diktator dan oleh karena itu, Ennahda adalah musuh Islam (Lusardi, 2017).

Tidak hanya mengenai ekstremisme dan terorisme, Ennahda berupaya menjaga stabilitas negara agar para investor asing tetap memberikan kontribusinya untuk memulihkan perekonomian Tunisia. Penolakan untuk memasukkan *syariah*

ke dalam konstitusi dapat meyakinkan Barat bahwa mereka akan baik-baik saja apabila melakukan investasi di Tunisia. Memang, tugas pemerintahan Troika tidak hanya menyusun konstitusi, namun juga berusaha menyelamatkan perekonomian negara akibat dari kegagalan rezim Ben Ali dan ketidakstabilan yang ada pasca pemberontakan. Selain itu, 'kejelasan status' kerjasama Tunisia dengan Uni Eropa mengenai pembentukan kawasan *free-trade area* juga menjadi pertimbangan pemerintahan Troika. Keputusan untuk melanjutkan pembicaraan tentang status lanjut dimotivasi oleh komisar Uni Eropa, sebagai akibat dari reformasi politik pasca-Ben Ali di Tunisia. Dengan adanya negosiasi tersebut, memasukkan *syariah* dalam konstitusi baru akan membahayakan kemajuan. Pertimbangan yang sama juga berlaku atas masalah dukungan A.S. Hillary Clinton, yang mengumumkan bahwa Washington akan memberikan \$100 juta kepada pemerintah Tunisia untuk bantuan fiskal jangka pendek. Dana ini akan menjadi sumber tambahan untuk perjanjian *sovereign-loan-guarantee* (\$ 30 juta) (Lusardi, 2017).

Terlepas dari kebijakan Ennahda terhadap Salafi garis keras, masyarakat menyesalkan sikap partai tersebut karena tidak menindak tegas mengenai eksistensi kelompok radikal. Insiden penyerangan jurnalis yang dilakukan oleh sekelompok Salafi adalah salah satu contoh dari disesalkan oleh publik. Awalnya, hasil persidangan ketua Nassma Tv, Nabil Karoui, ialah "melanggar nilai-nilai sakral" karena telah menayangkan film *Persepolis*. Khususnya di dalam film tersebut, ada salah satu unsur yang dianggap menista agama Islam karena animasinya menggambarkan sosok Tuhan sehingga mengundang kritik keras dari muslim Tunisia. Pada bulan Mei 2012, Nabil Karoui dinyatakan bersalah karena mengganggu 'ketertiban umum' serta 'mengancam moral publik' dan dikenakan denda \$1600 (Wolf, 2017:142). Meski pengadilan tingkat pertama di Tunis telah menyatakan bersalah, sekelompok Salafi tetap menyerang mahasiswa dan jurnalis yang menunjukkan simpatinya terhadap Nabil Karoui. Peristiwa ini dikecam oleh Perdana Menteri Hamadi Jebali, tetapi tidak ada tindakan nyata untuk menghukum aksi radikal tersebut (Lusardi, 2017).

Hubungan Salafi Jihadis dengan pemerintahan Troika semakin tegang ketika adanya peristiwa penistaan agama yang mirip dengan kasus film *Persepolis*. Pada bulan September 2012, jihadis yang terkait dengan kelompok *Anshar al-shari'a*, membuat kerusuhan dan menyerang kedutaan Amerika Serikat di Tunis. Mereka marah karena Youtube menayangkan *trailer* film produksi Amerika Serikat, *Innocence of Muslim*, yang berisi penistaan agama. Presiden Marzouki harus memerintahkan pengawal presiden untuk mengamankan kedutaan setelah jelas bahwa pasukan polisi dan militer tidak dapat menangani kerumunan. Empat warga Tunisia terbunuh dan sekitar tiga puluh orang terluka dalam insiden kedutaan itu. Aparat pemerintahan menyalahkan *Anshar al-shari'a* atas insiden tersebut. Sebuah sekolah Amerika di Tunis juga diserang dan diledakkan. Pengadilan Tunisia menjatuhkan hukuman dua puluh orang ke penjara karena keterlibatan mereka dalam kerusuhan. Ketua kelompok Salafi Jihadis *Anshar al-shari'a*, Seifallah Ben Hassine alias Abu Iyadh, berhasil melarikan diri ke Libya. Dari Libya, Abu Iyadh terus memberi komando pada *Anshar al-shari'a* (Wolf, 2017:149).

Simpatisan terhadap kelompok jihadis Salafi terus bertambah disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap reformasi ekonomi pemerintah yang dinilai lamban. Banyak simpatisan berasal dari pengangguran dan orang-orang yang kecewa dengan program ekonomi yang tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Para pemuda mengeluhkan kondisi negara tidak ada perubahan sejak pemberontakan tahun 2010. Kelompok ultra-konservatif (Jihadi Salafi) menyalahkan pemerintah (yakni Troika atau koalisi Ennahda dengan kelompok sekuler) atas kondisi terpuruknya keadaan sosial-ekonomi dan mengecam mereka sebagai 'kelompok yang tidak beriman' (Wolf, 2017:150-151).

Kelompok Salafi garis keras kerap melakukan aksi-aksi ekstremisme di dalam negeri. Presiden Moncef Marzouki dalam sebuah wawancara bulan Desember 2012 mengakui bahwa pejabat negara telah meremehkan ancaman Jihadi Salafi (Wolf, 2017:150). Kurang dari setahun kemudian, ada seseorang yang meledakkan dirinya dengan bom di sebuah pantai di resor wisata Sousse.

Pada hari yang sama polisi menggagalkan serangan terkoordinasi terhadap makam mantan presiden Habib Bourguiba di Monastir. Meskipun kedua serangan itu berhasil digagalkan, namun kedua hal tersebut mencerminkan bahwa kelompok Salafi Jihadis merupakan ancaman serius bagi Tunisia (Wolf, 2017:150).

Atas posisinya sebagai sebuah kelompok yang melawan pemerintah, kelompok ultra-konservatif (Salafi Jihadis) begitu mudah merekrut masyarakat untuk dijadikan anggota baru. Tidak hanya untuk urusan di dalam negeri Tunisia, bahkan untuk melakukan pertempuran di luar negeri. Sekelompok pakar dari PBB mengklaim bahwa pada pertengahan 2015 'ada sekitar 4.000 warga Tunisia di Suriah, 1.000-1.500 di Libya, 200 di Irak, 60 di Mali, dan 50 di Yaman'. Sebagian besar dari mereka telah bergabung dengan kelompok-kelompok jihad yang terkait dengan *al-Qaeda* atau ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Jaringan rekrutmen dibangun antara Tunisia dan Libya, dengan perekrut diduga menerima antara \$3.000 dan \$10.000 per pejuang baru. Namun, informasi angka-angka berasal dari Kementerian Dalam Negeri Tunisia. Sehingga, ada beberapa pihak yang menduga bahwa data-data angka tersebut sengaja dilebih-lebihkan untuk menerima lebih banyak bantuan keamanan dari mitra Barat khususnya Amerika Serikat (Wolf, 2017:151).

Setelah serangkaian insiden yang terjadi seputar masalah kelompok Jihadi Salafi, Ennahda akhirnya mulai menegaskan hubungannya dengan kubu ultra-konservatif. Pada awalnya, para pengikut Ennahda berisikeras untuk mengajak dialog kepada kelompok Salafi Jihadis agar melakukan kegiatannya dalam kerangka kerja yang sah dan damai. Ennahda berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengulangi kesalahan Ben Ali, di mana tindakan tegasnya terhadap aktivis agama hanya akan mendorong terciptanya 'gerakan Salafi'. Ennahda juga menekankan bahwa mereka berasal dari keluarga ideologis yang sama. Meskipun pengikut Ennahda memilih untuk pendekatan bertahap menuju Islamisasi masyarakat, sementara Salafi bertujuan untuk segera menerapkan hukum Islam.

Rachid Ghannouchi bahkan mengklaim dalam sebuah wawancara pada pertengahan 2012 bahwa gerakan Salafi mengingatkannya pada masa mudanya sendiri (Ayari, 2015:139). Namun seiring berjalannya waktu, sikap Rachid Ghannouchi terhadap kubu ultra-konservatif berubah. Ghannouchi segera berusaha untuk menampilkan perbedaan yang lebih jelas antara Ennahda dan kubu ultra-konservatif. Dalam sebuah wawancara, Ghannouchi mengklaim bahwa pengikutnya telah 'berkembang', dan tidak lagi mengejar tujuan 'utopis' namun 'berhadapan dengan realitas'. Ghannouchi juga menekankan bahwa gerakannya mengecam aktivis agama yang menggunakan kekerasan dengan menyebutnya sebagai 'teroris' (Wolf, 2017:151).

Aksi kelompok Salafi Jihadis berikutnya membuat pemerintah berada dalam krisis yang serius. Pada bulan Februari dan Juli 2013 di Tunisia, terjadi sebuah insiden pembunuhan dua politisi oposisi, Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi. Seorang warga negara Tunisia keturunan Perancis yang nantinya bergabung dengan kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*), Abou Bakr al-Hakim (alias Abou Mouqatel), pada bulan Desember 2014 mengklaim bahwa dirinya yang melakukan aksi pembunuhan tersebut. Insiden tersebut memicu aksi protes besar-besaran dan akhirnya memaksa pemerintah Troika untuk mengundurkan diri (Wolf, 2017:151-152).

3.1.3 Terbunuhnya Dua Politisi dari Oposisi Pemerintahan Troika

Banyak warga Tunisia sekuler menuduh Ennahda menutup mata terhadap kebangkitan para jihadi Salafi. Bahkan ada pihak yang menuduh Ennahda terlibat dalam insiden pembunuhan dua politisi oposisi yakni Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi, dan melakukan kolusi dengan gerakan kelompok terorisme. Oleh karena itu pada Agustus 2013, keluarga para korban membentuk sebuah asosiasi yaitu Inisiatif untuk Mengungkap Kebenaran tentang Pembunuhan Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi. Untuk merespons tuduhan tersebut, perdana menteri Hamadi Jebali (seorang elit Ennahda) meminta pemerintah Tunisia untuk mengundurkan diri. Jebali mengusulkan aktor politik dari teknokrat independen

untuk menggantikan dirinya dan bertugas menyelesaikan konstitusi serta mempersiapkan pemilihan berikutnya. Namun, para elit Ennahda sangat tidak menyetujui keputusan Jebali dengan alasan bahwa pengunduran diri pemerintah Tunisia akan melemahkan transisi demokrasi dan memperlambat proses penyusunan konstitusi. Namun, perdana menteri Hamadi Jebali tetap memutuskan untuk mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh Ali Larayedh, seorang mantan menteri dalam negeri (Wolf, 2017:152).

Perdana menteri yang baru, Ali Larayedh, berjanji untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap kaum ultra-konservatif untuk memulihkan kepercayaan publik. Upaya pertama untuk membuktikan janjinya tersebut adalah pelarangan aksi demonstrasi *Ansar al-Shari'a* di Kairouan yang telah dijadwalkan pada bulan Mei 2013. Bahkan setelah insiden pembunuhan Mohammed Brahmî pada bulan Juli 2013, Ali Larayedh memberi pernyataan resmi bahwa *Ansar al-Shari'a* sebagai organisasi teroris. Namun hal itu dinilai sebagai upaya pemerintah untuk meredam keributan rakyat atas insiden pembunuhan dua tokoh oposisi tersebut daripada berusaha mencari bukti yang kuat mengenai keterlibatan *Ansar al-Shari'a* terhadap insiden tersebut. Hubungan antara *Ansar al-Shari'a* dan Abou Mouqatel, pejuang ISIS yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan itu, juga tidak terbukti (Wolf, 2017:152-153).

Ketegangan antara Ennahda dan kelompok Salafis memberi keuntungan bagi kubu sekularis. Kelompok-kelompok sekularis yang awalnya terfragmentasi di dalam parlemen menjadi bersatu secara bertahap akibat dari insiden pembunuhan dua oposisi pemerintah. Momen penting bagi kubu sekularis adalah terbentuknya partai sekularis, Nidaa Tounes, yang disahkan pada tanggal 6 Juli 2012. Partai tersebut didirikan oleh mantan perdana menteri, Beji Caid Essebsi, untuk menyaingi dominasi Ennahda. Ada ragam aktor politik yang bergabung dengan partai tersebut, seperti mantan anggota RCD, kubu kiri, tokoh serikat perdagangan, tokoh independen, aktivis perempuan sekularis, dan anggota veteran dari gerakan Destour. Nidaa Tounes dan beberapa kelompok aktivis sekularis mendirikan *Jabhat al-Inkadh al-Watani (National Salvation Front)* pada tanggal

26 Juli 2013, satu hari pasca insiden pembunuhan Brahmi. Tujuan utama dari *Jabhat al-Inkadh al-Watani* adalah untuk menjatuhkan Ennahda dari kekuasaan (Wolf, 2017:153-154).

Upaya dari kubu sekularis berhasil menarik perhatian massa serta kelompok oposisi pemerintah. Protes secara besar-besaran anti-Troika serta kuatnya tekanan oposisi setelah pembunuhan Brahmi pada bulan Juli 2013, membuat sekitar seperempat dari wakil-wakil Majelis Konstituante mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Bahkan salah satu mitra koalisi Troika, yakni Ettakol, mendukung seruan Front Keselamatan Nasional untuk membubarkan pemerintah. Setelah kuatnya desakan terhadap pemerintah, para pejabat Ennahda akhirnya setuju untuk mengundurkan diri dari kekuasaan dengan syarat setelah perancangan konstitusi terselesaikan. Sehingga tugas yang diamanatkan pada pemerintahan koalisi dapat dituntaskan dan hal tersebut bisa dinilai sebagai penghargaan kepada Troika atas pencapaian penting tersebut. Ennahda mengundurkan diri dari kekuasaan pada bulan Januari 2014. Konstitusi yang diadopsi pada tanggal 27 Januari 2014, menetapkan Islam sebagai agama Tunisia dan negara berperan sebagai pelindung segala sesuatu yang dinilai sakral (Wolf, 2017:156).

3.2 Jatuhnya Ikhwanul Muslimin pada Tahun 2013

Peristiwa kudeta militer atas Ikhwanul Muslimin Morsi di Mesir dimanfaatkan oleh kelompok oposisi Ennahda di Tunisia pada masa protes anti pemerintahan Troika menguat. Seorang elit partai Nidaa Tounes dari kelompok sekuler membuat pernyataan bahwa ‘Kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir telah menunjukkan bahwa Islam politik sudah ketinggalan zaman. Semua cabang regional Ikhwanul Muslimin, termasuk Ennahda, sekarang akan ditutup secara otomatis’ (Wolf, 2017:154). Memang, elit-elit Ennahda pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, khususnya pasca peristiwa Perang Enam Hari (*Six Day War*). Oleh

karena itu, penulis akan membahas mengenai lengsernya Ikhwanul Muslimin Mohamed Morsi dari kursi kekuasaan di Mesir pada tahun 2013.

Pasca rezim Husni Mubarak mengundurkan diri yang disebabkan desakan rakyat pada tanggal 11 Februari 2011, Ikhwanul Muslimin muncul sebagai salah satu kekuatan politik utama di Mesir. Mohammad Morsi Isa El-Ayyat maju menduduki posisi presiden di Mesir pada tanggal 30 Juni 2012. Morsi merupakan presiden pertama Mesir dari kalangan sipil dan terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum yang jujur dan adil (Tempo.co, 2013a). Partai yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin pada bulan Juni 2011 dan diketuai oleh Dr. Mohamed Morsi, FJP (*Freedom and Justice Party*), juga berhasil memenangkan pemilihan parlemen pertama setelah pemberontakan terhadap rezim Husni Mubarak. Namun, hanya dalam kurun waktu sekitar satu tahun, Morsi tidak dapat menjalankan negara secara efektif dan gagal memenuhi tuntutan pemberontakan pada bulan Januari (pemberontakan terhadap rezim Husni Mubarak). Aksi protes massa pada tanggal 30 Juni 2013, mengakibatkan militer untuk mengambil kendali pemerintahan dalam kudeta pada tanggal 3 Juli 2013 (al-Anani, 2015).

Kudeta Mesir tahun 2013 dapat terjadi disebabkan Morsi gagal memenuhi tuntutan reformasi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi pasca penggulingan rezim Husni Mubarak. Dalam aspek sosial-ekonomi, FJP harus memulihkan kondisi perekonomian negara yang memburuk sebagai hasil dari era rezim Husni Mubarak. Era rezim Mubarak mewariskan inflasi perekonomian sekitar 30 persen dan tingkat pengangguran 30 persen, juga dengan lemahnya pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 5 persen. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional tidak mampu mengimbangi peningkatan populasi Mesir yang tumbuh cepat dari sekitar 50 juta pada awal 1980-an menjadi lebih dari 83 juta pada 2010 (Saikal, 2011).

Platform FJP tidak berhasil dalam menangani permasalahan ekonomi di Mesir. Hal ini dapat ditinjau dari pertumbuhan PDB riil Mesir yang tetap lambat yaitu 2,1 persen pada tahun fiskal 2012/2013, mengikuti tingkat pertumbuhan

yang sama lemahnya sebesar 2,2 persen pada tahun fiskal 2011/2012. Nilai mata uang Mesir (Pound Mesir) mengalami penurunan 13,6 persen terhadap dolar Amerika Serikat pada akhir Juni 2013, walaupun pernah mengalami kenaikan 1,9 persen pada akhir November 2013 (CBE, 2013). Meskipun tingkat kemiskinan ekstrem telah turun dari 4,8 persen menjadi 4,4 persen, namun jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Mesir meningkat menjadi 26,3 persen dari populasi pada tahun 2012/2013 dibandingkan dengan 25,2 persen pada tahun 2010/2011 (Alsahary, 2014). Untuk mengatasi krisis ekonomi, kabinet Mursi mencoba bernegosiasi dengan IMF (*International Monetary Fund*) untuk memperoleh pinjaman dana sebesar US\$4,8 miliar (Tempo.co, 2013a). Tetapi, FJP terjebak dengan pilihan dilematis bila pinjaman ini terjadi karena alasan janji partai tersebut mengenai kebijakan populis, sementara di sisi lain pinjaman internasional tersebut amat dibutuhkan. Untuk melunasi hutang negara tersebut, maka pemerintah akan terpaksa menerapkan regulasi pemotongan subsidi yang ketat meskipun dalam situasi krisis sosial ekonomi. Akibatnya, potensi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran dan mobilitas massa akan meningkat.

Bila meninjau program politik Ikhwanul Muslimin pada tahun 2004 tentang Inisiatif Untuk Reformasi Domestik, maka telah dijelaskan platformnya berkaitan dengan hak individu atas partisipasi politik, perubahan pada sistem pemilihan dan dalam pendidikan, pembangunan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, memerangi korupsi, menghilangkan penyiksaan, membatasi kekuasaan presiden, dan penghapusan aturan darurat. Dalam programnya juga disebutkan bahwa Ikhwanul Muslimin meyakini sistem ekonomi yang berasal dari Islam sebagai agama dan memuat pedoman hidup yang lengkap, sebagai sistem komprehensif yang memuat pentingnya kebebasan aktivitas ekonomi. Namun, hak pemenuhan kebutuhan hidup, prinsip privatisasi, liberalisasi kebijakan perdagangan, dan memperketat hukuman terhadap korupsi dinilai sebagai suatu prinsip luar ideologi Islamisme. Dokumen tersebut menekankan bahwa nilai-nilai moral Islam harus menembus bidang pendidikan dan penelitian ilmiah, tetapi pada kenyataannya

sebagian besar berurusan dengan masalah-masalah duniawi seperti 'meningkatkan misi ilmiah di luar negeri' dan 'pemberdayaan guru'. Bidang kemiskinan dan hubungan sosial diperlakukan dengan cara yang sama. Hanya bidang perempuan dan budaya yang mengandung penekanan lebih besar pada nilai-nilai moral Islam (Dalacoura, 2018). Adanya platform tersebut menunjukkan bahwa gerakan Islamis Ikhwanul Muslimin telah menerima beberapa aspek modernitas dan demokrasi. Program Inisiatif tersebut berfokus pada bidang politik, ekonomi, dan sosial dengan sedikit mencampurnya dengan agama.

Platform FJP tidak begitu berbeda dengan organisasi induknya, Ikhwanul Muslimin. Hal ini dapat dilihat dari daftar isi; Pada bagian 2 memuat pembahasan mengenai reformasi dan politik; Pada bagian 3 memuat mengenai keadilan sosial; Pada bagian 4 memuat mengenai pembangunan terintegrasi; Dan pada bagian 5 memuat tentang kepemimpinan daerah (Dalacoura, 2018). Namun, dalam konteks liberalisme ekonomi di Mesir, liberalisasi ekonomi lebih berpihak pada sektor finansial dan komersial dibandingkan sektor manufaktur. Liberalisasi tersebut lebih menguntungkan bisnis besar daripada UKM (Usaha Kecil Menengah), dan tidak mempromosikan integrasi bisnis islami dengan pasar. Kehadiran negara yang masih terus berlangsung dalam perekonomian Mesir menjadi salah satu alasan akan ketergantungan para pebisnis besar, sekularis dan 'muslim kelas menengah atas', terhadap negara untuk aliran profit. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya peran 'muslim kelas menengah atas' dalam perpolitikan Mesir. Di sisi lain, 'kelas menengah yang baru terbentuk' menjadi tulang punggung ekonomi alternatif bagi konstituensi Islam. Liberalisasi ekonomi di Mesir membatasi peran kesejahteraan sosial negara dan privatisasi layanan kesejahteraan (Gumuscu, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut tidak merangkul sistem demokrasi seutuhnya dan masih menganut prinsip Islamisme dengan ditunjukkan melalui keengganannya terhadap konsep privatisasi dalam proses reformasi ekonomi.

Dalam aspek politik, Morsi menghadapi persoalan pada proses pemerintahan disebabkan ketidakpercayaan oleh lembaga-lembaga negara terhadap Ikhwanul Muslimin. Meskipun Morsi menduduki kekuasaan, namun Ikhwanul

Muslimin tidak mampu mengendalikan birokrasi, institusi, dan aparatur negara dengan baik. Memang, ada media yang anti Ikhwanul Muslimin, terus memberitakan mengenai nepotisme yang dilakukan oleh pemerintahan Morsi. Klaim mengenai proses “Ikhwanisasi” negara terus dihembuskan oleh kelompok kontra Morsi. Alasan pendukung kelompok kontra adalah kurangnya keinginan untuk mereformasi atau merestrukturisasi institusi negara untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel. Pasukan revolusioner menuduh Ikhwanul Muslimin bersekutu dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga "sisa kekuatan rezim lama" seperti polisi dan militer untuk merusak revolusi. Sebaliknya, dalam media yang pro terhadap Ikhwanul Muslimin, informasi yang beredar ialah bahwa Morsi dalam masa kepresidenannya yang singkat, tidak memiliki kendali atas institusi-institusi penting seperti kementerian dalam negeri, kehakiman dan utamanya yaitu militer. Bahkan, Ikhwanul Muslimin nyaris tidak memperoleh kontrol yang baik atas beberapa lembaga lainnya seperti kementerian investasi, agrikultur, perencanaan dan kooperasi internasional (al-Anani, 2015). Ini terjadi disebabkan sisa pengaruh rezim Mubarak yang melarang anggota Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam pemerintahan atau militer. Oleh karena itu, setiap upaya Ikhwanul Muslimin yang mencoba mereformasi dan restrukturisasi institusi negara akan mendapat stigma negatif dan perlawanan baik dari oposisi maupun lembaga negara. Terlepas dari pro dan kontra informasi yang ada, hal tersebut menunjukkan bahwa kader dari Ikhwanul Muslimin kurang memiliki skill dan taktik tata kelola pemerintahan yang diperlukan untuk menangani problematika kesejahteraan sosial dan ekonomi di Mesir.

3.3 Perubahan Strategi Politik Partai Ennahda

Pada tanggal 26 Oktober 2014, partai Nida Tounes memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan parlemen Tunisia. Dari jumlah total 217 kursi legislatif, Nida Tounes berhasil memperoleh 86 kursi legislatif, kemudian diikuti Ennahda yang berhasil mendapatkan 69 kursi. Berikutnya UPL (*Free Patriotic Union*) sebanyak 16 kursi, kemudian kelompok kiri dari *Popular Front* 15 kursi, dan kelompok liberal Afek Tounes sebanyak 8 kursi. Dalam pemilihan umum

presiden yang diadakan pada bulan Desember 2014, strategi politik Ennahda tidak mengedepankan kandidat presiden mana pun, sehingga tidak memicu kekhawatiran lawan-lawannya bahwa Ennahda akan kembali mencoba untuk mendominasi politik. Beji Caid Essebesi dari partai Nida Tounes menjadi pemenang di pemilihan umum presiden Tunisia dan mengalahkan Moncef Marzouki yang dinilai dekat dengan haluan Islamis (Wolf, 2017:157-158).

Dalam parlemen yang terdapat 217 kursi, Nidaa Tounes memiliki 86 kursi dan mendapat dukungan dari kubu liberal, partai sekuler UPL, yang memiliki 16 kursi. Tetapi tanpa dukungan kubu Islamis, Ennahda, partai tersebut kekurangan 109 mayoritas yang mereka butuhkan untuk meratifikasi kabinet (Al Jazeera, 2015). Sehingga Ennahda bergabung ke dalam parlemen meskipun berkoalisi dengan partai sekuler Nida Tounes demi terbentuknya kabinet pemerintahan yang stabil. Kabinet pemerintahan dipimpin oleh seorang politisi independen dan dekat dengan Nida Tounes, Perdana Menteri Habib Essid, yang merupakan mantan pejabat Ben Ali. Kabinet tersebut terdiri dari 28 menteri dan 14 sekretaris negara. Ennahda mendapat posisi Kementrian Ketenagakerjaan serta sekretaris negara untuk keuangan, investasi, dan kesehatan. Pimpinan parlemen adalah Abdelfattah Mourou menjadi wakil ketua parlemen yang dulunya pernah diduduki oleh Mohammed Ennaceur. Meskipun pemetaan jabatan dalam pemerintahan tampak berjalan lancar, partisipasi Ennahda pada awalnya hanya bersifat simbolis. Selain itu, para pemimpin Ennahda menerima posisi jabatan di mana mereka tidak mungkin berhasil karena kondisi perekonomian negara yang terus menerus dalam kondisi stagnan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para mitra koalisi tidak percaya dengan Ennahda dengan membatasi peranan Ennahda di dalam pemerintahan. Namun Ennahda lebih memilih memperoleh peranan kekuasaan yang terbatas daripada menjadi pihak oposisi yang secara tradisional memiliki sedikit pengaruh kekuasaan. Dengan bergabung pada kabinet penguasa, Ennahda juga akan terhindar dari lawan-lawannya yang berusaha menyalahkannya mengenai kasus-kasus kekerasan kelompok agama yang menguat di beberapa daerah pasca terselenggaranya pemilihan (Wolf, 2017:158-159).

Adanya insiden kekerasan atas nama agama di beberapa daerah seperti di Bardo, Sousse dan Ben Gardane membuat beberapa faksi Nida Tounes berselisih. Mereka menilai bahwa Perdana Menteri Habib Essid tidak memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjaga keamanan Tunisia. Perselisihan di antara faksi Nida Tounes mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Januari 2016. Ada 28 anggota legislatif Nidaa Tounes telah mengundurkan diri dari partai, mengurangi kursi parlemennya dari 86 menjadi 58 kursi. Dengan demikian, Ennahda yang memiliki 69 kursi sekali lagi menjadi kekuatan terbesar di parlemen (Wolf, 2017:160).

Pada perkembangan selanjutnya, Ennahda terus mengembangkan diri melalui manuver diplomatik dan fleksibilitas politiknya sehingga partai tersebut banyak memperoleh dukungan dari para konstituen utama. Pada bulan Mei 2016, Ennahda mengadakan kongres ke-10 di Hammamet. Dari 1200 delegasi Ennahda yang berkumpul di Hammamet, diperoleh 93,5% suara voting elektronik yang menyatakan mendukung pemisahan aktivitas keagamaan dan politik (Souli, 2016a). Dalam kongres ke-10 tersebut, Rachid Ghannouchi mengumumkan bahwa Ennahda telah meninggalkan 'Islam politik' dan akan menjalankan 'demokrat Muslim' (Ibish, 2016).

BAB 5.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia pada tahun 2016 karena adanya: tantangan politik yang baru, yakni kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dalam rangka membangun masyarakat madani (*civil society*); kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia; peristiwa kudeta militer atas Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2013, dan; peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai tersebut.

Faktor adanya kondisi lingkungan politik yang plural dan tuntutan kompromistik dengan aktor-aktor politik oposisi dalam rangka membangun masyarakat madani (*civil society*), tampak pada keputusan akhir Ennahda yang bersedia untuk berkompromi dan bekerja di dalam sistem parlemen campuran. Padahal sebelumnya Ennahda pada awalnya menyerukan sistem parlementer secara eksklusif. Berikutnya, adanya desakan dari kelompok perempuan sekuler terhadap pemerintahan koalisi pimpinan Ennahda terkait pasal 28 pada rancangan konstitusi awal dinilai merendahkan martabat perempuan menjadikan partai tersebut pada akhirnya juga mendukung gagasan kesetaraan gender perempuan dan laki-laki. Ennahda juga menyetujui untuk menyusun konstitusi baru Tunisia berdasarkan mekanisme demokrasi, peraturan hukum, dan berbagai hak-hak agama, sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pendiri Ennahda, Rachid Ghannouchi, menjelaskan bahwa tujuan partai tersebut adalah untuk memberikan perlindungan konstitusi bagi kelompok non-muslim maupun yang atheis. Perubahan strategi politiknya yang dicirikan dengan identitas baru sebagai 'demokrat muslim' dimaksudkan agar partai Ennahda bersikap lebih moderat terhadap kelompok muslim maupun kelompok non-muslim.

Faktor berikutnya yaitu kemunculan gerakan Islam garis keras serta kelompok ekstremis di Tunisia. Adanya kelompok Islam garis keras

mengakibatkan masyarakat Tunisia menyandangkan stigma negatif atas gerakan Islamisme. Hal ini tampak pada sikap masyarakat yang menuduh Ennahda terlibat dalam insiden pembunuhan dua politisi oposisi pada bulan Februari dan Juli 2013, yakni Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi; dan partai tersebut dianggap melakukan kolusi dengan gerakan kelompok terorisme. Oleh sebab itu, Ennahda mengubah haluan strategi politiknya pada tahun 2016, yang awalnya berorientasi pada Islamisme, kemudian berubah menjadi *Post-Islamism*. Ennahda secara tegas mengubah struktur partainya pada tahun 2016 menjadi entitas murni ‘partai politik’ yang tidak lagi menyandang simbol atau memperjuangkan agenda-agenda Islamisme. Tujuan Ennahda adalah untuk membuat perbedaan yang jelas antara kelompok ekstremisme serta terorisme dengan partainya sebagai gerakan politik yang moderat. Selain memisahkan diri dari kelompok Islam garis keras serta terorisme, tujuan Ennahda juga untuk memerangi ekstremisme yang ada di Tunisia.

Penyebab berikutnya yang menjadi pertimbangan bagi Ennahda untuk mengubah strategi politiknya pada tahun 2016 adalah adanya peristiwa kudeta militer atas Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2013. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan koalisi pimpinan Ennahda. Seorang elit partai Nidaa Tounes dari kelompok sekuler mengkaitkan kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang notabene pengusung Islam politik dengan tata kelola pemerintahan Ennahda di Tunisia. Untuk menyelamatkan Ennahda dari nasib yang sama dengan Ikhwan di Mesir, Rachid Ghannouchi segera mengeluarkan pernyataan bahwa ‘Mohammed Morsi telah melakukan kesalahan’ dan menekankan bahwa Ennahda merupakan sebuah partai di Tunisia yang mendukung gagasan kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Bahkan Rachid Ghannouchi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pembenaran untuk Islam Politik di Tunisia.

Faktor terakhir dari penyebab terjadinya perubahan strategi politik partai Ennahda di Tunisia pada tahun 2016 adalah adanya peningkatan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan Ennahda. Ketidakmampuan

Ennahda dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi dalam negeri Tunisia, mengatasi gerakan kelompok ekstremis dan teroris yang semakin meningkat, dan konflik kepentingan antar aktor politik mengakibatkan ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis tersebut. Puncaknya, insiden pembunuhan dua politisi oposisi pada bulan Februari dan Juli 2013, yakni Chokri Belaid dan Mohammed Brahmi, kian membuat Ennahda kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga memicu aksi protes besar-besaran dan akhirnya memaksa koalisi pemerintahan pimpinan Ennahda untuk mengundurkan diri pada bulan Januari 2014. Adanya realitas masyarakat yang menuduh Ennahda terlibat dalam pembunuhan dua politisi oposisi, menunjukkan bahwa perlunya pembenahan pergerakan politik dalam aspek ideologis dari partai tersebut. Sehingga menurut hemat penulis, pelemahan daya tarik simbol gerakan Islamisme yang ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan publik terhadap koalisi pemerintahan pimpinan partai Islamis Ennahda; menjadi penyebab yang mempengaruhi sikap dan perubahan strategi politik partai tersebut di Tunisia pada tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexander, C. 2016. *Tunisia From Stability To Revolution In The Maghreb*. New York: Routledge.

Bakry, U. S. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'oed, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Tamimi, A. S.. 2001. *Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism*. New York: Oxford University Press.

Tibi, B. 2012. *Islamism and Islam*. New Haven & London: Yale University Press.

Wolf, A. 2017. *Political Islam in Tunisia The History of Ennahda*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

al-Anani, K. 2015. Upended path: the rise and fall of Egypt's muslim brotherhood. *The Middle East Journal* . Vol. 69, No.4, Hal. 527-543.

Ayari, F. 2015. Ennahda movement in power: a long path to democracy. *Contemporary Review of the Middle East*. Vol. 2, No.1-2, Hal. 135-142.

Bayat, A. 1996. The coming of a post-islamist society. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*. Vol. 5, No. 9, Hal. 43-52.

Charrad, M. M., & Zarrugh, A. 2014. Equal or complementary? Women in the new tunisian constitution after the arab spring. *The Journal of North African Studies*. Vol. 19, No.2, Hal. 230-243.

- Dalacoura, K. 2018. Islamism, secularization, secularity: the muslim brotherhood in Egypt as a phenomenon of a secular age. *Economy and Society*. Vol. 47, No. 2, Hal. 313-334.
- Daoud, M. 1991. Arabization in Tunisia: The Tug of War. *Issues in Applied Linguistics*. Vol. 2, No. 1, Hal. 7-29.
- Guazzone, L. 2013. Ennahda islamist and the test of government in Tunisia. *The International Spectator*. Vol. 48, No. 4, Hal. 30-50.
- Gumuscu, S. 2010. Class, status, and party: the changing face of political islam in Turkey and Egypt. *Comparative Political Studies*. Vol. 43, No. 7, Hal. 835-861.
- Hasan, N. 2015. New horizon of reading islam and politics: post-islamism in Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*. Vol. 4 No. 2, Hal. 285-316.
- Haugbølle, R. H. 2015. New expressions of islam in Tunisia: an ethnographic approach. *The Journal of North African Studies*. Vol. 20, No. 3, Hal. 319-335.
- Hossain, A. A. 2016. Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh. *Asian Journal of Political Science*, Vol. 24, No. 2, Hal. 214-236.
- Louden, S. R. 2015. Political islamism in Tunisia: a history of repression and a complex forum for potential change. *Mathal*. Vol. IV, No. 1, Hal. 2.
- Machairas, D. 2017. The strategic and political consequences of The June 1967 War. *Cogent Social Sciences*. Vol. 3, No. 1.
- Mahmudah, S. 2018. Islamisme: kemunculan dan perkembangannya di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*. Vol. 3, No. 1.
- Marks, M. 2015. Tunisia's Ennahda: Rethinking Islamism in the context of ISIS and the Egyptian coup. *Rethinking Political Islam Series*.

- Meriboute, Z. 2013. "Arab spring": the influence of the muslim brotherhood and their vision of islamic finance and the state. *International Development Policy: Religion and Development*. Hal. 128–143.
- Mushlih, A., & Hurriyah. 2016. Aktor politik dan gagalnya transisi demokrasi Mesir tahun 2011-2013. *Jurnal Politik*. Vol. 2, No. 1, Hal. 41-69.
- Saikal, A. 2011. Authoritarianism, revolution and democracy: Egypt and beyond. *Australian Journal Of International Affairs*. Vol. 65, No. 5, Hal. 530—544.
- Torelli, S. M., Merone, Fabio., & Cavatorta, Francesco. 2012. Salafism in Tunisia: Challenges and Opportunities for Democratization. *Middle East Policy*. Vol. 19, No. 4, Hal. 140-154.
- Wolf, A. 2018. 'Dégage RCD!' The rise of internal dissent in Ben Ali's Constitutional Democratic Rally and the Tunisian uprisings. *Mediterranean Politics*. Vol. 23, No. 2, Hal. 245-264.

Artikel & Reportase

- Arieff, A. 2011. *Political Transition in Tunisia*. Washington, D.C.: Congressional Research Service.
- CBE. 2013. *Central Bank of Egypt - Annual Report 2012/2013*. Central Bank of Egypt.
- International Republican Institute. 2014. *Survey of Tunisian Public Opinion June 22-July 1, 2014*. International Republican Institute.
- NDI. 2011. *Final Report On The Tunisian National Constituent Assembly Election*. National Democratic Institute.
- Nassar, A. A. 2016. *Events of the Tunisian Revolution The Three First Years*. Department of Peace and Conflict Research. Uppsala: Universitetsstryckeriet.
- The Carter Center. 2014. *Legislative and Presidential Elections in Tunisia*. Atlanta: The Carter Center.

Situs Internet

- Affan, M. 2016. *The Ennahda Movement ... A Secular Party?*. ALSHARQ FORUM: <http://www.sharqforum.org/2016/06/14/the-ennahda-movement-a-secular-party/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Ahramonline. 2012. *Egypt President Morsi visits China seeking investment*. Ahramonline: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/51452/Business/Economy/Egypt-President-Morsi-visits-China-seeking-investm.aspx>. [Diakses pada 4 Juli 2019].
- Al Arabiya English. 2016. *Al Arabiya profiles: Beji Caid Essebsi, the veteran Tunisia needed*. Al Arabiya: <http://english.alarabiya.net/en/media/inside-the-newsroom/2016/07/04/Al-Arabiya-documentary-Beji-Caid-Essebsi-the-veteran-Tunisia-needed.html>. [Diakses pada 24 Juli 2019].
- Al Jazeera. 2015. *Tunisia's Ennahda to join coalition government*. Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2015/02/tunisia-ennahda-join-coalition-government-150201172336735.html>. [Diakses pada tanggal 16 Juni 2019]
- Alsahary, I. 2014. *CAPMAS: Poverty in Egypt increases to 26.3% in 2012/2013*. Egypt Independent: <https://www.egyptindependent.com/capmas-poverty-egypt-increases-263-20122013/>. [Diakses pada tanggal 19 Juni 2019].
- BBC. 2011. *Tunisian Islamist leader Rachid Ghannouchi returns home*. BBC: <https://www.bbc.com/news/world-africa-12318824>. [Diakses pada tanggal 20 Mei 2019].
- Bilecen, C. (t.thn.). *NASSERISM AND SIX-DAY WAR: RISE AND FALL OF AN IDEOLOGY*. Academia: https://www.academia.edu/27447656/NASSERISM_AND_SIX-DAY_WAR_RISE_AND_FALL_OF_AN_IDEOLOGY. [Diakses pada tanggal 14 Desember 2018].
- Bleiweis, S. 2016. *Muslim Democrats? Tunisia's Delicate Experiment*. Foreign Policy Association: <http://foreignpolicyblogs.com/2016/09/30/muslim-democrats-tunisia-experiment/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Canada: Immigration and Refugee Board of Canada. 2004. *Tunisia: The Destour Democratic Party; its founding members and founding date; its political persuasion and ideology; its relationship with other established parties*;

its relationship with the authorities. Canada IRBC: <https://www.refworld.org/docid/41501c650.html>. [Diakses pada tanggal 30 April 2019].

CIA. 2019. *The World Factbook Africa: Tunisia*. Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html>. [Diakses pada tanggal 30 Januari 2019].

Constitute. (t.thn.). *Egypt's Constitution of 2012*. constituteproject.org: https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2012.pdf?lang=en. [Diakses pada tanggal 4 Juli 2019].

Edusfax. (t.thn.). *Salah Ben Youssef*. Edusfax: <http://www.edusfax.com/sfaxreader/english/1961BenYoussef.pdf>. [Diakses pada tanggal 15 Mei 2019].

Electionguide. (t.thn.). *Tunisian Republic Election For President*. Electionguide: <http://www.electionguide.org/elections/id/2826/>. [Diakses pada 1 Maret 2018].

Encyclopaedia Britannica. (t.thn.). *Democratic Constitutional Rally*. Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Democratic-Constitutional-Rally>. [Diakses pada tanggal 13 Mei 2019].

Encyclopedia.com. (t.thn.). *General Tunisian Union Of Students (UGTE)*. Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa: <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/general-tunisian-union-students-ugte>. [Diakses pada tanggal 20 Mei 2019].

Ghannouchi, R. 2016. *From Political Islam to Muslim Democracy The Ennahda Party and the Future of Tunisia*. Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/tunisia/political-islam-muslim-democracy>. [Diakses pada tanggal 15 Januari 2017].

Hasan, A. M. 2017. *Membunuh Anwar Sadat*. Tirto.id: <https://tirto.id/membunuh-anwar-sadat-cxSV>. [Diakses pada tanggal 14 Mei 2019]

Howling P. (t.thn.). *Destour*. Howling Pixel: <https://howlingpixel.com/i-en/Destour>. [Diakses pada 24 Juli 2019].

- Ibish, H. 2016. *'Islamism Is Dead!' Long Live Muslim Democrats*. The New York Times: https://www.nytimes.com/2016/06/03/opinion/tunisi-as-new-revolution.html?_r=1. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Imonti, F. 2013. *Morsi, Egypt Face Economic Meltdown*. Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/economy-egypt-morsi-revolution.html>. [Diakses pada tanggal 3 Juli 2019].
- International IDEA. (t.thn.). *Constitutional History of Tunisia*. CONSTITUTIONNET: <http://constitutionnet.org/country/constitutional-history-tunisia>. [Diakses pada tanggal 17 Januari 2019].
- Internationalrelations.Org. (t.thn.). <http://internationalrelations.org/ennahda/>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].
- Jaouad, H. 2011. *From The Streets Of Tunisia To Wall Street*. Huffpost: https://www.huffpost.com/entry/tunisia-elections_b_1025803. [Diakses pada 7 Maret 2018].
- Julio, E. 2017. *HISTORIPEDIA: Militer Gulingkan Presiden Mesir Mohamed Morsi*. Okenews: <https://news.okezone.com/read/2017/07/02/18/1726772/historipedia-militer-gulingkan-presiden-mesir-mohamed-morsi?page=1>. [Diakses pada tanggal 3 Juli 2019].
- Jusuf, W. 2017. *Mengenang 5 Tahun Berkuasanya Mursi*. Tirto.id: <https://tirto.id/mengenang-5-tahun-berkuasanya-mursi-crpfZ>. [Diakses pada tanggal 3 Juli 2019].
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (t.thn.). *PROFIL NEGARA REPUBLIK TUNISIA. KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK TUNISIA*: <https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx>. [Diakses pada tanggal 6 Januari 2019].
- Koch, R. 2014. *Islam and Politics in Tunisia*: https://www.sciencespo.fr/kuwait-program/wp-content/uploads/2018/05/KSP_Paper_Award_Spring_2015_KOCH_Rebecca.pdf. [Diakses pada tanggal 24 Juni 2019].
- Lusardi, R. 2017. *Tunisia's Islamists: Ennahda and the Salafis Is a Divorce Underway?*. Middle East Policy Council: <http://www.mepec.org/comment>

[ary/tunisian-islamists-ennahda-and-salafis](#). [Diakses pada tanggal 1 Juni 2019].

Marks, M., & Ounissi, S. 2016. *Ennahda from within: Islamists or “Muslim Democrats”?* A conversation. Brookings: <https://www.brookings.edu/research/ennahda-from-within-islamists-or-muslim-democrats-a-conversation/>. [Diakses pada tanggal 26 Juli 2019].

Souli, S. 2016a. *What is left of Tunisia's Ennahda Party?*. Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/left-tunisia-ennahda-party-160526101937131.html>. [Diakses pada tanggal 14 Desember 2016].

_____. 2016b. *Why Tunisia’s Top Islamist Party Rebranded Itself*. Al-Monitor: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/tunisia-ennahda-islamist-party-rebranding-congress.html>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].

Tempo.co. 2013a. *Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan*. Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/493383/empat-alasan-presiden-mesir-digulingkan/full&view=ok>. [Diakses pada tanggal 8 April 2019].

_____. 2013b. *Teks Lengkap Ultimatum Militer Mesir untuk Mursi*. Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/492829/teks-lengkap-ultimatum-militer-mesir-untuk-mursi>. [Diakses pada 4 Juli 2019].

The Guardian. 2014. *Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists*. The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamists>. [Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018].

Wikileaks. 2006. *Tunisian Government Cracks Down on Hijab*. Wikileaks: https://wikileaks.org/plusd/cables/06TUNIS2565_a.html. [Diakses pada tanggal 18 Mei 2019].